



KABUPATEN BULUKUMBA

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

Jl. Jend Sudrman. No.1 Tlp/FAX. 0413 81004 BULUKUMBA 92511



<http://setda.bulukumbakab.go.id>



@organisasiblk@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Serikaya No.2 Bulukumba Telp.(0413) 81070

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Bulukumba, 29 Maret 2023

Inspektur Daerah,

TALFIK, SH, MH

NIP. 19631231 199203 1 102



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se-Kabupaten Bulukumba, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.

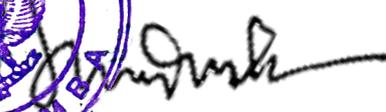
Laporan Kinerja (LKj) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai sasaran strategis.

Laporan Kinerja (LKj) berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta secara aktif baik dari aparatur pemerintah daerah, masyarakat umum maupun dunia usaha. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam menyusun laporan kinerja sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami telah berupaya secara maksimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan kinerja di tahun yang akan datang. Semoga pada penyampaian laporan tahun berikutnya dapat lebih terarah dan dapat memenuhi harapan sesuai ketentuan.

Wabillahi taufiq Walhidayah

Bulukumba, Maret 2023

 **BUPATI BULUKUMBA**

MUCHTAR ALI YUSUF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022, yang diformulasikan dari hasil kinerja Perangkat Daerah. Hal ini dikarenakan setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak- pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Laporan kinerja tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dilaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Laporan kinerja ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Laporan Kinerja Kabupaten Bulukumba tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban tahun pertama atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba 2021-2026. Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk mewujudkan “Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba menunjukkan beberapa kesimpulan:

Pertama: Terdapat 5 sasaran strategis yang mencapai hasil di atas 100 persen (sangat berhasil) yaitu sasaran strategis (4),(7),(8),(10),(11): 0 sasaran tercapai dengan predikat berhasil; sasaran tercapai dengan predikat cukup berhasil yaitu sasaran strategis (1), (2), (3), (6), (9) dan (13); dan 3 sasaran tercapai dengan predikat kurang berhasil yaitu sasaran strategis (5) dan (12); Dan 0 sasaran yang tidak berhasil Secara kumulatif, rata-rata capaian ke-33 sasaran strategis sebesar 101,58 persen atau dengan predikat Sangat Berhasil.

Kedua: Dari 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD, maka terdapat 10 indikator kinerja yang telah memenuhi kriteria sangat berhasil atau 40 persen, 3 indikator kinerja yang telah

memenuhi kriteria berhasil atau 12 persen, 6 indikator kinerja dengan kriteria cukup berhasil atau 24 persen, 2 indikator kinerja dengan kriteria kurang berhasil atau 8 persen dan 4 indikator kinerja lainnya dengan kriteria tidak berhasil atau 16 persen.

Ketiga: 3. Dari 261 indikator sasaran strategis tahun 2022 terhadap target jangka menengah didapatkan hasil yaitu 164 indikator sasaran dengan notifikasi hijau (sudah tercapai/on track/on trend) atau 62.84 persen, 38 indikator sasaran dengan notifikasi kuning (butuh kerja keras) atau 14.56 persen, dan 59 indikator sasaran dengan notifikasi merah (sulit tercapai) atau 22.61 persen.

Keempat: 4. Pendapatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp 1.464.329.512.889,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.375.869.878.068,34 atau 93,97 persen. Target pendapatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022 mengalami Penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Target pendapatan tahun 2020 sebesar Rp 1.450.653.482.748,00 dan di tahun 2022 naik menjadi Rp 1.464.329.512.889,00 atau naik 0.93 persen. Sedangkan realisasi pendapatan mengalami peningkatan yaitu dari Rp 1.369.368.335.163,92 pada tahun 2021 dan meningkat menjadi Rp 1.375.869.878.068,34 pada tahun 2022 atau meningkat 0.47 persen, sedangkan Target belanja daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Target belanja tahun 2021 sebesar Rp 1.505.415.493.238,00 dan di tahun 2022 naik menjadi Rp 1.581.422.605.370,00 atau naik 4,81 persen. Sedangkan realisasi belanja mengalami peningkatan yaitu dari Rp 1.355.511.903.577,49 pada tahun 2021 dan turun menjadi Rp 1.344.950.356.924,50 pada tahun 2022 atau turun 0.79 persen. Alokasi Anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2022 sebesar Rp 1.581.422.605.370,00 terealisasi sebesar Rp 1.344.950.356.924,50 atau 85.05 persen, dengan rincian sebagai berikut: belanja operasi sebesar Rp.1.344.950.356.924,50 terealisasi sebesar Rp 911.207.258.499,88 atau 90,31 persen, belanja modal sebesar Rp.381.691.934.815,00 dan terealisasi sebesar Rp.255.053.250.411,62 atau 66.82 persen, belanja tak terduga sebesar Rp.10.631.393.294,00 dan terealisasi sebesar Rp.658.045.600,00 atau 6.19 persen dan belanja transfer sebesar Rp.180.155.094.847,00 dan terealisasi sebesar Rp.178.031.802.413,00 atau 98,82 persen.

Kelima: Anggaran belanja daerah sebesar Rp1.581.422.605.370,00 terealisasi sebesar Rp1.344.950.356.924,50 atau 85.05 persen dari anggaran. dari besaran belanja daerah tersebut, anggaran yang langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja daerah yang ada dalam RPJMD tahun 2022 sebesar Rp Rp913.159.428.804,00 0 terealisasi sebesar Rp729.285.440.169,00 atau 79.86 persen dari anggaran, dan selebihnya merupakan belanja pendukung pada anggaran pokok (program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program dan kegiatan seluruh kecamatan) sebesar Rp 668.263.176.566,00 terealisasi sebesar Rp 615.664.916.755,50 atau 92.13 persen dari anggaran.

Keenam: Dari hasil kinerja pemerintah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 telah berhasil meraih beberapa penghargaan yaitu:

PENGHARGAAN/PRESTASI TINGKAT NASIONAL:

1. SAKIP Award Tahun 2023 Predikat Nilai "B" oleh Menteri PAN RB diserahkan langsung oleh Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo dan diterima oleh Sekertaris Daerah pada tanggal 6 desember 2022.
2. BKN Award tahun 2022 kategori penilaian kompetensi diserahkan oleh wakil kepla BKN RI Supranawab Yusuf kepada Wakil Bupati Andi Edy Manaf selasa 20 September 2022
3. Kementerian keuangan melalui KPPN Bantaeng, terbaik kedua atas tata kelola dana desa tahun anggaran 2021 Kategori Kabupaten lebih dari 100 desa di Provinsi Sulawesi Selatan diserahkan kepada Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf pada 5 Juli 2022
4. Baznas Award desa zakat community development terbaik diserahkan oleh ketua baznas pusat kepada wakil bupati Andi edy manaf 17 januari 2022.
5. Penyerahan Piala Adipura Kategori Kota Sedang diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada bupati bulukumba pada tanggal 28 february 2023
6. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021
7. 300 Besar Desa Wisata, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 (Desa Lembanna) Menteri Sandiaga dan sejumlah menteri lain
8. Penghargaan Pembina Program Kampung Iklim (Proklim) yang diserahkan langsung oleh ibu Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
9. Penghargaan Program Kampung Iklim Tahun 2022 Kategori Utama diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R. I Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M. Sc dan didampingi Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A. IPU.
10. Penghargaan Inseminator Terbaik IB dan Kawin Alam (Juara I Lomba Petugas Reproduksi Tahun 2022) diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Dr. Ir Nasrullah, M Sc bertempat The Sahira Hotel Bogor, Kamis, 24 November 2022.

PENGHARGAAN/PRESTASI TINGKAT PROVINSI:

1. Baznas Award Tahun 2022 (Program Zakat Community Development di Desa Kahayya)
2. Penghargaan Nilai Tertinggi Penilaian Survey Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan Subhan Djoer.
3. Penghargaan FASS Award 2022 sebagai Forum Anak dengan Program Kerja Hak Sipil dan Kebebasan Terbaik
4. Penghargaan Peringkat Ke-2 Kinerja Terbaik Pengelolaan Dana Desa Kategori Lebih dari 100 Desa diserahkan oleh Plt. Kepala KPPN Bantaeng, Andi Yusuf;
5. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Pratama
6. Adiwiyata Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Madrasah Ibtidiyah Negeri 3 Bulukumba) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pendidikan lingkungan hidup

7. TOP Government Publik Relation (GPR) 2022 diserahkan oleh Founder dan Direktur GPR Institute, Arief Munajad
8. Penghargaan Produk Unggulan Berpotensi oleh Tas Anyaman Daun Lontar yang diberikan langsung oleh Ketua Dekranasda Sulsel, Naomi Octarina
9. Penghargaan Finalis Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Tahun 2022 (Bidang Pangan) yang diberikan langsung Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Asrorun Nia'm Sholeh
10. KPID Award 2022 Kategori Siaran Perempuan dan Anak yang diserahkan langsung gubernur sulawesi selatan
11. Top 30 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Sulawesi Selatan Tahun 2022 yang diserahkan langsung gubernur sulawesi selatan
12. Penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (Kategori Peduli) Plt Direktur Jenderal HAM, Dr. Muallimin Abdi
13. Penghargaan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penguatan Layanan Administrasi Kependudukan yang diserahkan langsung gubernur sulawesi selatan
14. Penghargaan Sebagai Pokok Lelang Tertinggi (Non Eksekusi) yang diserahkan langsung gubernur sulawesi selatan
15. Penghargaan Peringkat ke-3 Terbaik Kesesuaian Penyelesaian Antara Temuan BPK dengan Rekomendasi yang diserahkan langsung gubernur sulawesi selatan
16. Penghargaan Kategori Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang diserahkan langsung gubernur sulawesi selatan

Bulukumba, Maret 2023

BUPATI BULUKUMBA



MUCHTAR ALI YUSUF

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BABI Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Sejarah Singkat Kabupaten Bulukumba	2
1.4 Kondisi Geografis Daerah	3
1.5 Gambaran Demografi Daerah.....	6
1.6 Kondisi Perekonomian Daerah	9
1.7 Struktur Pemkab Bulukumba.....	15
1.8 Sumberdaya Manusia Pemkab Bulukumba.....	18
1.9 Metode Pengukuran Kinerja.....	21
1.10 Permasalahan Utama.....	22
1.10 Sistematika Penulisan	23
BAB II Perencanaan Kinerja	
2.1 RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021	24
2.2 Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran	31
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Capaian Kinerja IKU	47
3.2 Capaian Kinerja IKD	49
3.3 Realisasi Anggaran	159
BAB IV Penutup.....	167
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rata-rata PDRB Perkapita Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2022 (Juta Rupiah).....	10
Tabel 2	Perkembangan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2014-2022	11
Tabel 3	Peranan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2018-2022.....	12
Tabel 4	Laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2018-2022 (persen)	13
Tabel 5	Rata-rata PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-2022 (juta rupiah)	14
Tabel 6	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemkab Bulukumba Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2022	19
Tabel 7	Rencana Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022.....	42
Tabel 8	Alokasi Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	43
Tabel 9	Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022	199
Tabel 10	Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	164

Daftar Gambar

Gambar 1 Peta Administrasi (Desa/Kelurahan) per kecamatan Kabupaten Bulukumba	3
Gambar 2 Luas wilayah Kabupaten Bulukumba menurut kecamatan (Km ²) Tahun 2021.....	4
Gambar 3 Jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba menurut kecamatan (jiwa)Tahun 2021	6
Gambar 4 Persentase jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba berdasarkan jenis kelamin Tahun 2021	6
Gambar5 Relevansi perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba (metode baru) dengan IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan IPM nasional (Indonesia) Tahun 2018-2022	7
Gambar 6 Perkembangan IPM Kabupaten Bulukumba metode lama dengan metode baruTahun2012-2022.....	8
Gambar 7 Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Bulukumba Tahun2012-2022(jiwa).....	9
Gambar 8 PerkembanganTingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2022(persen).....	9
Gambar 9 Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan menurut kabupaten/kota tahun 2022 (persen).....	11
Gambar10 Pertumbuhan PDRB Kab.Bulukumba Tahun 2014- 2022 ADHB dan ADHK	11
Gambar11 Persentase jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Berdasarkan jenis kelamin.....	18
Gambar12 Persentase jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) Pemkab. Bulukumba Tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin.....	18
Gambar13 Persentase jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kab. Bulukumba Tahun 2022 berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan.....	20
Gambar14 Persentase jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) Pemerintah Kab. Bulukumba Tahun 2022 berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan.....	20
Gambar15 Persentase jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bulukumba berdasarkan golongan Tahun 2022	20
Gambar16 Persentase jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja Kabupaten Bulukumba berdasarkan Golongan Tahun 2022.....	21
Gambar17 Perbandingan antara target dan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020- 2021	22
Gambar18 Perbandingan antara target dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020- 2021	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Semangat reformasi dan otonomi daerah telah menimbulkan perubahan yang strategis dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintah semakin menjadi sorotan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), sedikitnya harus terdapat 3 prinsip utama yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan tersebut yaitu: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Berdasarkan prinsip tersebut, maka penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam mengukur keberhasilan/kegagalan proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuannya memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani diawal tahun dengan fokus utama pada pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas atas penggunaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka laporan kinerja tingkat pemerintah kabupaten disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPPN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba selama tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi.

Tujuan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberimandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Sejarah Singkat Kabupaten Bulukumba

Bulukumba lahir dari suatu proses perjuangan panjang yang mengorbankan harta, darah, dan nyawa. Perlawanan rakyat Bulukumba terhadap Kolonial Belanda dan Jepang menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 diawali dengan terbentuknya “Barisan Merah Putih” dan “Laskar Brigade Pemberontakan Bulukumba Angkatan Rakyat”.

Organisasi yang terkenal dalam sejarah perjuangan ini, melahirkan pejuang yang berani mati menerjang gelombang dan badai untuk merebut cita-cita kemerdekaan sebagai wujud tuntutan hak asasi manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Dari sisi budaya Bulukumba telah tampil menjadi sebuah “legenda modern”, dalam kancah percaturan kebudayaan nasional. Bahkan melalui industri budaya dalam bentuk perahu baik itu perahu jenis *Pinisi*, *Padewakkang*, *Lambo*, *Pajala*, maupun jenis *Lepa-lepa* yang telah berhasil mencuatkan nama Bulukumba di dunia internasional. Kata layar memiliki pemahaman terhadap adanya subyek yang bernama perahu sebagai suatu refleksi kreativitas masyarakat Bulukumba.

Masyarakat Bulukumba juga telah bersentuhan dengan ajaran agama Islam sejak awal abad ke-17 Masehi, yang diperkirakan tahun 1605 M. Ajaran Agama Islam ini dibawa oleh 3 ulama besar dari Pulau Sumatera yang masing-masing bergelar Dato Tiro (Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar), dan Dato Patimang (Luwu). Ajaran Agama Islam yang berintikan tasawwuf ini menumbuhkan kesadaran religius bagi penganutnya dan menggerakkan sikap keyakinan mereka untuk berlaku zuhud, sucilahir batin selamat dunia dan akhirat dalam kerangka tauhid “*appasewang*” atau meng-Esakan Allah SWT.

Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978 tentang Lambang Daerah. Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya), maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Hari Jadi Kabupaten Bulukumba. Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan Bupati pertama yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960.

1.4. Kondisi Geografis Daerah

1.4.1. Batas Administrasi

Kabupaten Bulukumba berjarak ± 153 km dari Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan) terletak di bagian selatan dari jazirah Sulawesi Selatan, berada diantara 05°20'-05°40' LS dan 119°58'-120°28' BT dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Sinjai;
- Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone;
- Sebelah Selatan berbatasan Pulau Selayar;
- Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Bantaeng;



Gambar 1.

Peta Administrasi (Desa/Kelurahan) per kecamatan Kabupaten Bulukumba.

sumber : Perda RTRW Kab.Bulukumba tahun 2012-2032

Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan, 109 desa, dan 27 kelurahan, dengan perincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (km ²)
1	Gantarang	18	3	15,03	21	173,51
2	Ujungbulu	0	9	1,25	9	14,44
3	Ujung Loe	12	1	12,50	13	144,31

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (km ²)
4	Bontobahari	4	4	9,40	8	108,60
5	Bontotiro	12	1	6,78	13	78,34
6	Herlang	6	2	5,96	8	68,79
7	Kajang	17	2	11,18	19	129,06
8	Bulukumpa	14	3	14,84	17	171,33
9	Rilau Ale	14	1	10,18	15	117,53
10	Kindang	12	1	12,88	13	148,67
	Bulukumba	109	27	100,00	136	1.154,58

Dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba, 7 kecamatan diantaranya termasuk daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, dan Kecamatan Herlang. Sedangkan 3 kecamatan lainnya merupakan sentra pengembangan pertanian dan perkebunan yaitu: Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, dan Kecamatan Bulukumpa.

Selain itu Kabupaten Bulukumba juga mempunyai 2 buah pulau yang terdapat di Kecamatan Bontobahari yakni Pulau Liukang Loe (berpenghuni) dan Pulau Kambing (tidak berpenghuni).

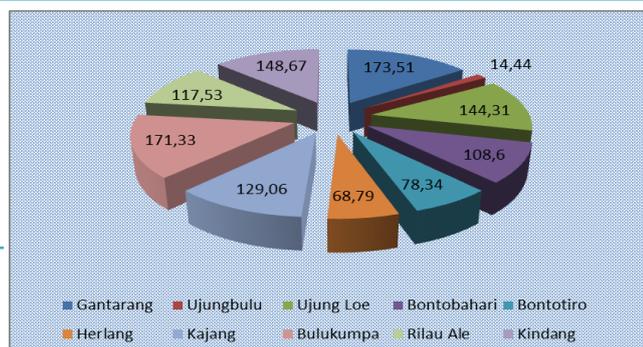
Panjang garis pantai Kabupaten Bulukumba yakni 128 km dengan luas laut ± 204,83 km² menjadikan Kabupaten Bulukumba sebagai daerah bahari/maritim dengan salah satu potensinya di bidang perikanan dan kelautan.

1.4.2. Luas Wilayah

Kabupaten Bulukumba tercatat memiliki luas 1.154,58 km² atau 1,85 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditinjau dari segi luas wilayah maka Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Bulukumpa merupakan dua wilayah kecamatan terluas masing-masing seluas 173,51 km² dan 171,33 km² atau sekitar 30 persen dari luas kabupaten. Kemudian disusul kecamatan lainnya dan yang terkecil adalah Kecamatan Ujung bulu yang merupakan pusat kota kabupaten dengan luas 14,44 km² atau hanya sekitar 1 persen.

Gambar 2.

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba menurut kecamatan



Sumber: BPS Kab. Bulukumba
(Bulukumba Dalam Angka Tahun 2022)

1.4.3. Kondisi Topografi

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai 50,28 persen maka dataran tinggi mencapai 49,72 persen.

Berdasarkan ketinggian tempat maka wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki topografi yang bervariasi antara 0 meter hingga di atas 1.000 meter dari permukaan laut (mdpl) yang dapat dibagi ke dalam 3 satuan ruang morfologi yaitu:

- **Morfologi Daratan**

Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s.d. 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, dan Kecamatan Herlang.

- **Morfologi Bergelombang**

Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s.d. 100 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa, dan Kecamatan Rilau Ale.

- **Morfologi Perbukitan**

Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke Utara dengan ketinggian 100 s.d. di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa, dan Kecamatan Rilau Ale.

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C–27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan dengan klasifikasi iklim lembab atau agak basah.

Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah *Latosol* dan *Mediteran*. Secara spesifik terdiri atas tanah *Alluvial Hidromorf* coklat kelabu dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat di pesisir pantai dan sebagian di daratan bagian utara. Sedangkan tanah *regosol* dan *mediteran* terdapat pada daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat.

1.5. Gambaran Demografi Daerah

1.5.1. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulukumba berjumlah 443.292 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan.

Dari 10 kecamatan tersebut, Kecamatan Gantarang mempunyai jumlah penduduk terbesar yaitu 82.494 jiwa atau 18,61% dan Kecamatan Bontotiro tercatat memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 27.560 jiwa atau 6.2%.



Gambar 3.

Jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba menurut kecamatan

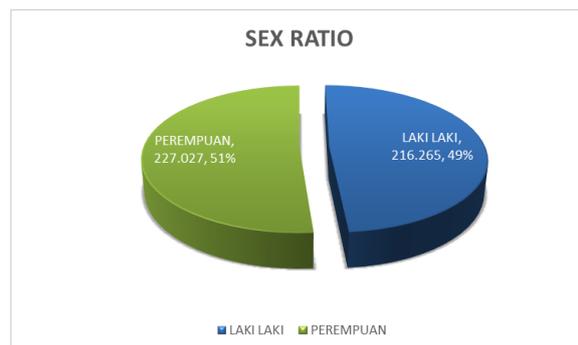
Sumber: BPS Kab. Bulukumba

Terjadi peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba jika dibandingkan dengan tahun lalu yaitu dari 440.090 jiwa tahun 2021 menjadi 443.292 jiwa di Tahun 2022, sehingga bertambah sebanyak 3.202 jiwa dibandingkan tahun lalu.

Penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin laki-laki yaitu 227.027 jiwa perempuan atau 51,21 persen dan 216.265 jiwa laki-laki atau 48,79 persen, dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) 96, yang berarti dalam setiap 100 orang penduduk perempuan maka terdapat 95 orang penduduk laki-laki.

Gambar 4.

Persentase jumlah penduduk Kab. Bulukumba berdasarkan jenis kelamin Tahun 2022.

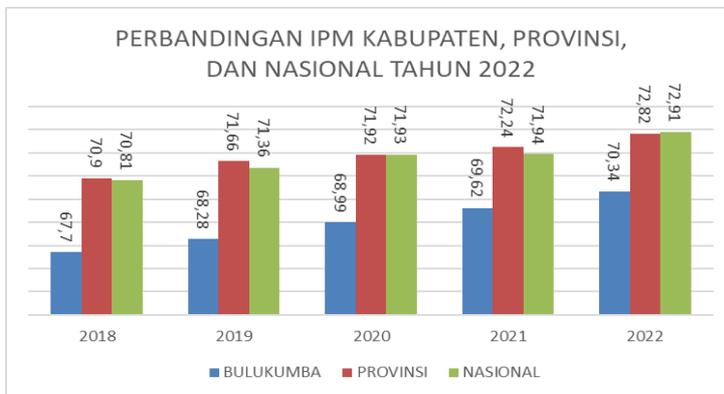


Sumber: BPS Kab. Bulukumba (Bulukumba Dalam Angka Tahun 2021)

Kepadatan penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2021 yaitu 381,17 jiwa per/km². Kepadatan Penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Ujung bulu dengan kepadatan sebesar 3.390,17 jiwa/km², hal ini disebabkan karena kecamatan tersebut merupakan ibukota Kabupaten Bulukumba dan Kecamatan terendah di Kecamatan Kindang sebesar 220,35 jiwa/km².

1.5.2. Kondisi IPM

Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana yang ada di Provinsi Sulawesi selatan yaitu 72.82. IPM tertinggi Tahun 2022 ditempati oleh Kota Makassar yaitu sebesar 83.12 sedangkan IPM yang terendah masih ditempati oleh Kabupaten Jeneponto yaitu sebesar 65,13.



Gambar 5.

Relevansi perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba (metode baru) dengan IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan IPM Indonesia (Nasional) Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Provinsi Sulsel tahun 2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 70.34. Angka ini tumbuh sebesar 0.72 persen dibandingkan dengan IPM tahun 2021 yang sebesar 69,62. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 menduduki peringkat ke 14 dari 24 kabupaten/kota

Trend peningkatan IPM Kabupaten Bulukumba dari tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan dan perkembangannya relevan dengan peningkatan IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan IPM Nasional. Posisi IPM Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 yaitu 70.34 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 69,62, angka tersebut masih di bawah IPM Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 72.82 dan IPM Indonesia secara nasional yaitu 72.91 meningkat 0.97 poin (1.33 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Saat ini perhitungan IPM oleh BPS di Indonesia menggunakan metode baru. Metode tersebut mengadopsi teknik perhitungan IPM yang telah digunakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam penyusunan laporan tahunan pembangunan manusia (*Human Development Report*) sejak Tahun 2010.

Penggunaan metode baru dalam perhitungan IPM memberi sejumlah konsekuensi yang patut diperhatikan oleh para pengguna data, terutama ketika IPM dengan metode baru dijadikan dasar perencanaan dan evaluasi capaian pembangunan manusia. Pertama, perubahan metode perhitungan berdampak penurunan level IPM. Secara umum, skor IPM dengan metode baru lebih rendah dibanding skor IPM dengan metode lama untuk tahun yang sama. Kedua, peringkat IPM menurut provinsi juga mengalami perubahan.

Karena itu, perbandingan peringkat antar waktu dengan menggunakan metode IPM yang berbeda tidak bisa dilakukan.

Walaupun memberi sejumlah konsekuensi berbeda, IPM dengan metode baru tetap memberi gambaran yang sama ihwal tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memacu capaian pembangunan manusia.

Salah satu tantangan tersebut adalah tingginyadisparitasatau kesenjangan capaian pembangunan manusia antarwilayah, baik antarprovinsi, maupun antarkabupaten/kota dalam provinsi. Kesenjangan tidak hanya terjadi secara agregat tapi juga pada masing-masing komponen pembangunan manusia (kesehatan, pendidikan, dan standar hidup). Karena itu, pemerataan pembangunan, baik antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat, merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena tanpa pemerataan pembangunan, pembangunan manusia Indonesia akan sulitditingkatkan.

perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba berikut akan kami gambarkan perbandingan IPM Kabupaten Bulukumba mulai tahun2012-2022 sebagai berikut:



Gambar 6. Perkembangan IPM Kab. Bulukumba Tahun 2012-2022

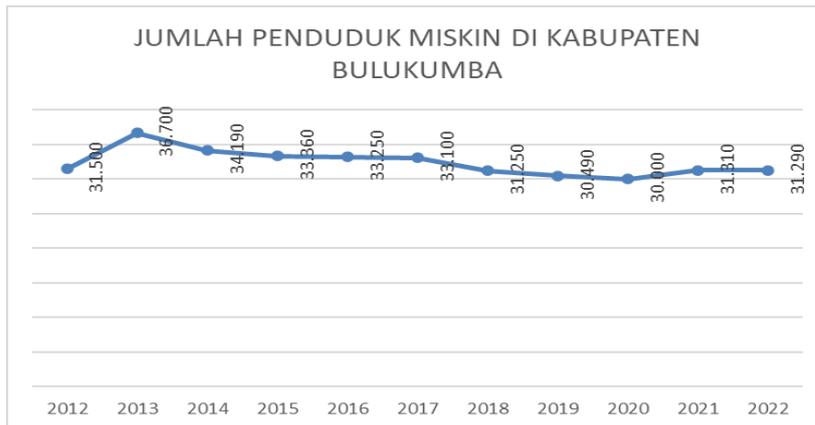
Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba (Indeks Pembangunan Manusia Kab. Bulukumba Tahun 2022)

1.5.3. Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 sebesar 7,39 persen atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 7,43 persen. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 mencapai 31.290 ribu jiwa. Jumlah ini menurun sebanyak 20 jiwa dibandingkan tahun 2020. Secara umum selama 5 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulukumba terus mengalami naik turun (fluktuatif) baik dari sisi persentase penduduk miskin maupun jumlah penduduk miskin.

Selama kurun waktu 2014-2022 terjadi naik turun (fluktuatif) jumlah penduduk miskin Kabupaten Bulukumba tetapi hal tersebut berlaku secara umum hampir diseluruh wilayah Indonesia, hal tersebut lebih disebabkan oleh perkembangan dinamika kebijakan nasional seperti kenaikan harga BBM

yang memicu naiknya inflasi barang kebutuhan pokok yang berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin Tingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba



Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2004-2021(jiwa)

Sumber: bulukumba dalam angka 2022/ bps kabupatenbulukumba

tahun 2022 sebesar 7,39 persen jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan penurunan kemiskinan Kabupaten Bulukumba tahun 2020 yaitu 7,10 persen, atau mengalami penurunan sebesar 0,53 persen.



Gambar 8.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kab. Bulukumba Tahun 2012-2022 (persen)

Sumber: BPS Kab. Bulukumba. 2022)

Tingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba tahun 2022 masih lebih rendah yaitu 7.39 persen jika dibandingkan dengan persentase tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 8,66 persen dan persentase tingkat kemiskinan Indonesia (Nasional) yaitu 9,57 persen.

Jika diurut berdasarkan rendahnya persentase tingkat kemiskinan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, maka persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba tahun 2022 berada pada urutan ke 7 (tujuh) terendah dengan persentase 7,39 persen, tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Makassar dengan 4,58 persen dan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Pangkep dengan nilai persentase yang sama yaitu 13.92 persen.

1.6. Kondisi Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian suatu daerah/wilayah sangat tergantung pada indikator ekonomi yang merupakan cermin dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor serta pergeseran struktur perekonomian daerah, maka diperlukan penghitungan PDRB Kabupaten.

BPS melakukan adaptasi pencatatan statistik nasional dengan

melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 menjadi tahun 2010. Perubahan tahun dasar PDB mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *System of National Account* (SNA 2008). SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan perhitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Manfaat perubahan tahun dasar PDRB menyebabkan informasi perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas data PDRB, dan menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional. Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha metode baru menggunakan KBLI 2009, sebelumnya PDRB dengan Tahun dasar 2000 terdiri dari 9 klasifikasi jenis usaha dan PDRB dengan Tahun dasar 2010 menjadi 17 klasifikasi jenis usaha.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba Tahun 2022, lapangan usaha Industri Pengolahan menempati posisi pertama dalam hal Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian sebesar 3.81 persen. Beberapa lapangan usaha tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan Besardan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Keuangan, Jasa Perusahaan, dan lapangan usaha jasa lainnya, PDRB perkapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk dan sering digunakan sebagai indikator dalam mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Untuk lebih jelasnya perbandingan pendapatan perkapita tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

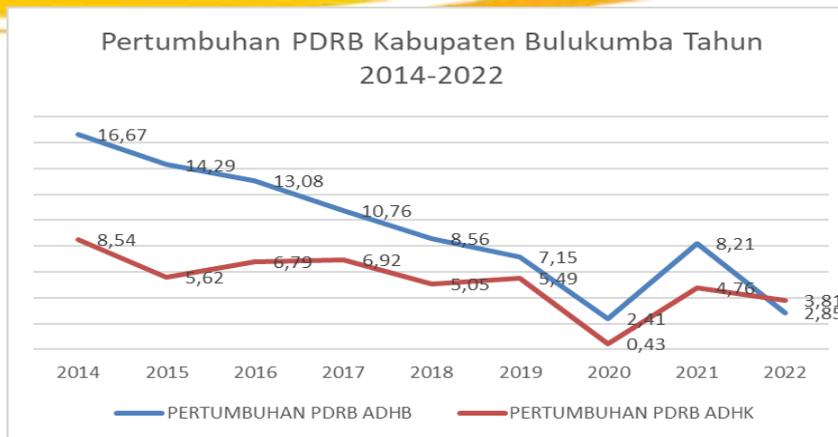
Rata-rata PDRB Perkapita

Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2022 (Juta Rupiah)

Tahun	Kabupaten Bulukumba	Provinsi Sulawesi Selatan
2014	20,54	35,34
2015	23,36	39,95
2016	26,72	43,86
2017	29,03	47,82
2018	31,55	52,64
2019	33,96	57,18
2020	33.34	55.68
2021	36.06	39.66
2022	38.55	65.59

Sumber: PDRB Kab/Kota se Prov. Sulsel menurut Lapangan Usaha 2014-2021

Grafik perkembangan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulukumba tahun 2014-2021 berdasarkan harga berlaku dan harga konstan, dapat kita gambarkan sebagai berikut:



Gambar10.
Pertumbuhan PDRB Kab. Bulukumba Tahun 2014 -2022 ADHB dan ADHK.

Sumber: Bulukumba dalam Angka Kab. Bulukumba, 2022

Kontribusi PDRB Kabupaten Bulukumba terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 5.09 persen, dan secara akumulatif rata-rata kontribusi PDRB Kabupaten Bulukumba terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir mencapai persen.

Tabel 2.

Perkembangan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab. Bulukumba Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2022

Tahun	PDRB Sulawesi selatan (Miliar Rp)	PDRB Kab. Bulukumba (Miliar Rp)	% PDRB Kab. Bulukumba terhadap PDRB Prov. Sulsel
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	298.033,80	8.374,05	2,81
2015	340.390,21	9.568,40	2,81
2016	377.110,00	10.769.94	2,86
2017	415.740,00	12.068.74	2,9
2018	462.740,00	13.193,58	2,85
2019	505.578,92	14.214,59	2,81
2020	504.059,37	14.565,49	2,89
2021	545.230,03*	15.868,86	2,91
2022	605,144,00**	17.233,31	2,85
Rata-rata			2,85

Sumber: PDRB Kab Bulukumba , menurut Lapangan Usaha 2014-2022

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai distribusi sumbangan sektor lapangan usaha terhadap total PDRB. Ini dapat diartikan bahwa peranan sektor di setiap usaha dapat dilihat dari struktur ekonomi di wilayah tersebut.

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Bulukumba tidak mengalami pergeseran dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB

Bulukumba. Sumbangan terbesar pada tahun 2018, dihasilkan oleh beberapa lapangan usaha sebagai berikut:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
2. Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor;
3. Konstruksi;
4. Industri Pengolahan, dan
5. Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Tabel 3.

Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (%)

NO (1)	LAPANGAN USAHA (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021* (6)	2022** (7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38.71	37.13	36.86	37.38	37,10
B	Pertambangan dan Penggalian	2.82	2.71	2.75	2.64	2,45
C	Industri Pengolahan	6.50	6,85	6.52	6.48	6,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	10.18	10.18	10.60	10,65	11,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.40	17.19	16.92	16.92	16,93
H	Transportasi dan Pergudangan	2,33	2,39	2,07	2,13	2,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,74	0,76	0,73	0,72	0,80
J	Informasi dan Komunikasi	3,09	3,23	3,54	3,47	3,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,35	3,53	3,76	3,82	4,05
L	Real Estate	4,50	4,35	4,30	4,09	4,05
M, N	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,08	6,39	6,31	6,11	5,64
P	Jasa Pendidikan	3,12	3,01	3,27	3,19	2,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,24	1,31	1,40	1,41	1,44
R,S,T, U	Jasa Lainnya	0,75	0,80	0,79	0,82	0,91
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: PDRB Kab Bulukumba, menurut Lapangan Usaha 2017-2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Bulukumba tahun 2022 mencapai 3.81 persen, sedangkan tahun 2020 sebesar 4.76 persen. Laju pertumbuhan

ekonomi tertinggi dicapai oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0.72 persen.

Adapun lapangan usaha lainnya juga mencatat pertumbuhan yang positif walaupun beberapa lapangan usaha pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan tahun lalu, tetapi yang menggembirakan adalah laju pertumbuhan pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh positif sebesar 37.38 persen.

Tabel 4.

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (%)

NO	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,06	2,13	-1,12	3,65	0,61
B	Pertambangan dan Penggalian	12,85	3,14	2,09	3,06	-2,31
C	Industri Pengolahan	8,96	11,76	-3,60	5,72	8,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,95	7,23	3,77	8,91	12,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,34	1,72	4,98	0,01	9,89
F	Konstruksi	9,59	3,27	5,11	5,12	7,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,73	9,93	-1,25	6,51	5,37
H	Transportasi dan Pergudangan	9,46	9,68	-14,41	5,95	10,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,80	5,23	-1,99	5,88	19,98
J	Informasi dan Komunikasi	9,27	7,66	11,92	4,42	6,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,37	9,65	9,00	7,54	7,80
L	Real Estate	6,88	2,18	1,03	3,28	6,19
M, N	Jasa Perusahaan	9,88	10,53	-4,26	6,80	-3,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,40	10,35	-0,43	4,36	-0,41
P	Jasa Pendidikan	9,12	3,31	9,27	4,12	-0,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,66	5,11	6,31	6,39	10,07
R,S,T,U	Jasa Lainnya	13,11	11,92	-1,21	8,81	17,62
Produk Domestik Regional Bruto		5,05	5,49	0,43	4,76	3,81

Sumber: PDRB Kab Bulukumba, menurut Lapangan Usaha 2018-2022 BPS 2023

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat di Kabupaten Bulukumba, salah satu indikator yang dapat dipakai adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Pada tahun 2021 PDRB perkapita Kab. Bulukumba mencapai 36.06 juta rupiah, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 33.34 juta rupiah, atau tumbuh

sebesar 92,46 persen.

Peningkatan PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bulukumba terlihat sangat cepat, pada tahun 2017 PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bulukumba mencapai 29.03 juta rupiah dan pada tahun 2021 telah meningkat mencapai 36.06 juta rupiah atau meningkat 124.22 persen selama kurun waktu 5 tahun. Dibandingkan dengan PDRB perkapita penduduk Sulawesi Selatan, maka PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bulukumba masih lebih rendah. PDRB per kapita penduduk Sulawesi Selatan sudah mencapai 59.66 juta rupiah pada tahun 2021.

Tabel 5.

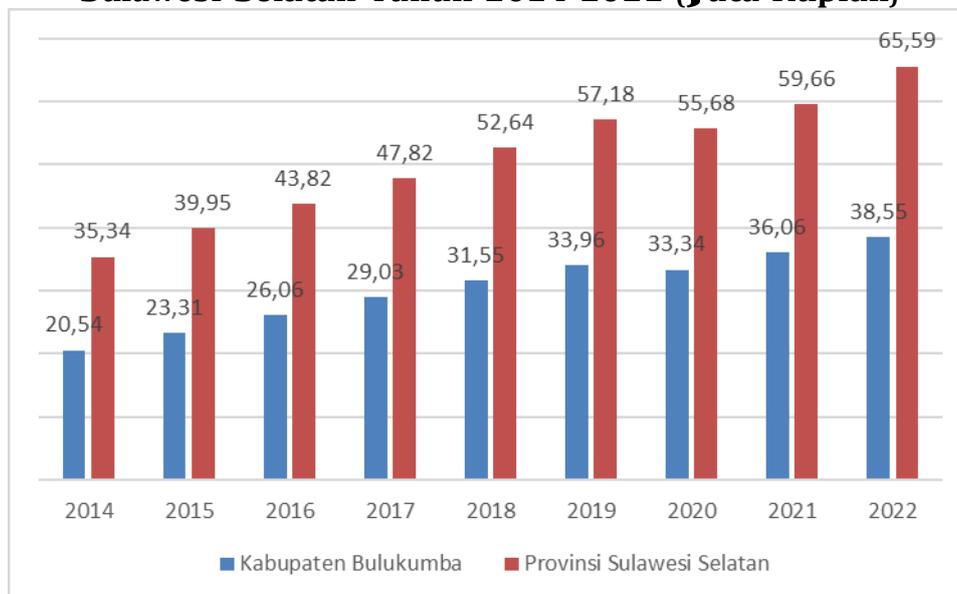
Rata-rata PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2021 (Juta Rupiah)

Tahun	Kabupaten Bulukumba	Provinsi Sulawesi Selatan
2014	20,54	35,34
2015	23,31	39,95
2016	26,06	43,82
2017	29,03	47,82
2018	31,55	52,64
2019	33,96	57,18
2020	33,34	55,68
2021	36,06	59,66
2022	38,55	65,59

Sumber: PDRB Kab/Kota se Prov. Sulsel menurut Lapangan Usaha 2014-2021, BPS 2022

Gambar 5.

Rata-rata PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2021 (Juta Rupiah)



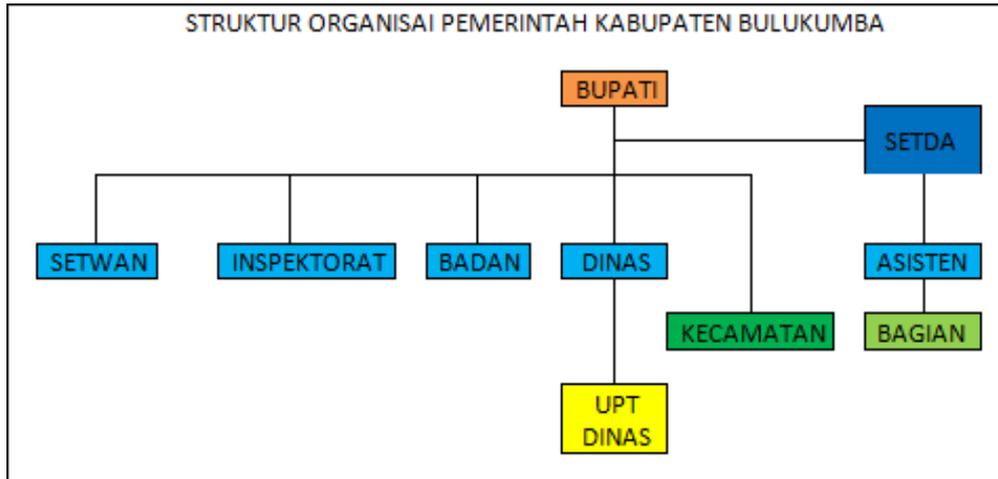
1.7. Struktur Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Perangkat Daerah merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi- fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk menyusun dan menetapkan perangkat daerahnya sesuai kebutuhan.

Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola organisasinya, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dari penyelenggara pemerintahan di dalam merumuskan, merencanakan, dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah ke dalam pola organisasi pemerintah daerah.

Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat



Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat Daerah, 18 (Delapan Belas) Dinas, 5 (lima) Badan, dan kecamatan yang berjumlah 10 (sepuluh) sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah H. A. Sulthan Daeng Radja telah dibentuk sebagai UPT. Adapun bagan struktur organisasi pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah kabupaten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengantugas dan fungsinya.

Sekretariat DPRD

Sekretaris DPRD kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis lingkup Sekretariat Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Sekretariat Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat Daerah;
- d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan dan fungsinya.

Inspektur Daerah

Inspektur Daerah kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasanlainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas danfungsinya.

Dinas Kabupaten

Kepala Dinas Daerah kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba

Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dapat diuraikan bahwa perangkat daerah terdiri dari 18 (Delapan Belas) Perangkat Daerah berbentuk Dinas yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
4. Dinas Sosial.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
7. Dinas Perikanan.
8. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
10. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah.
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
13. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah.
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
16. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17. Dinas Perhubungan.
18. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Badan Kabupaten

Kepala Badan daerah kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya:

- a. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan 5 (lima) Perangkat Daerah yang berbentuk badan yaitu sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat kabupaten yang dipimpin seorang camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Organisasi kecamatan terdiri atas camat, sekretaris kecamatan, dan seksi-seksi. Kabupaten Bulukumba terbagi atas 10 kecamatan yang terdiri dari 109 desa dan 27 kelurahan. Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta TataKerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba diatur melalui Peraturan Bupati.

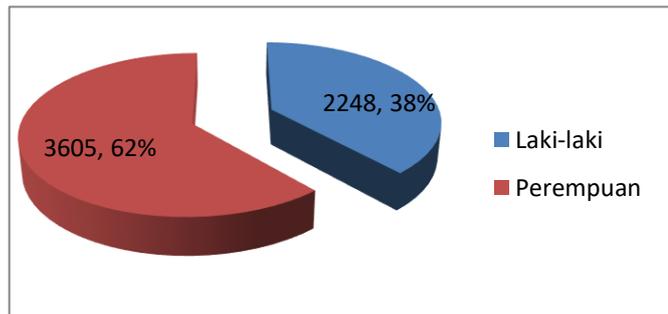
1.8. Sumber Daya Manusia Pemkab Bulukumba

Pemerintah Kabupaten Bulukumba saat ini memiliki kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Tercatat Tahun 2022 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebanyak 6.752 orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 5.853 orang sedangkan Pegawai Pemerintah dengan

Perjajian Kerja (PPPK) sebanyak 899 orang atau PNS berkurang 1 orang atau berkurang sebesar 0,017 persen dari tahun 2021 dengan komposisi laki-laki sebanyak 2.248 orang (38,40 persen) dan Perempuan sebanyak 3.605 orang (61,59 persen). Sedangkan PPPK dengan komposisi laki-laki sebanyak 202 orang (22,46 persen) dan perempuan sebanyak 697 orang (77,53 persen). dibandingkan tahun 2016 yang terdata sebanyak 6.540 orang

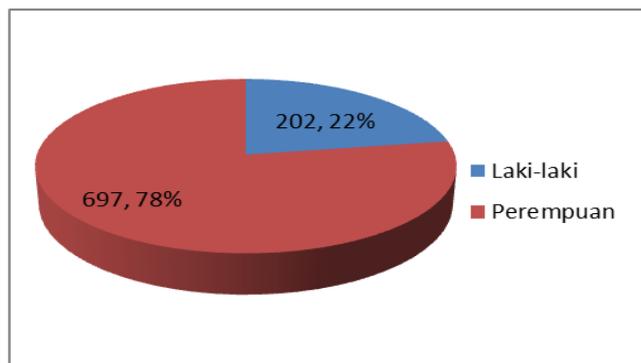
Gambar 11.

Persentase jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Bulukumba Tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin.
Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2022



Gambar 12.

Persentase jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) Pemkab Bulukumba Tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin.
Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2022



Berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S1 (Sarjana) yaitu sebanyak 3.869 orang (66,10 persen), kemudian SLTA sebanyak 639 orang (10,91 persen), kemudian yang ketiga D-I s/d D-IV sebanyak 710 orang (12,13 persen). Selain itu, jenjang pendidikan S2 cukup banyak dengan menempati posisi ke empat yakni sebanyak 472 orang (8.06 persen) dan S3 sebanyak 5 orang (0,08 persen). Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba memiliki aparatur SDM yang dapat dikatakan baik dari segi tingkat pendidikannya. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) jenjang pendidikan yang ditamatkan S1 (Sarjana) sebanyak 857 orang (95,32 persen) dan DIII (Diploma) sebanyak 42 orang (4,67 persen).

Tabel 6.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemkab. Bulukumba Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Jumlah
1	S-3	5
2	S-2	472
3	S-1	3869
4	D-I s/d D-IV	710
5	SMU	639
6	SLTP	44
7	SD	21
	Jumlah	5853

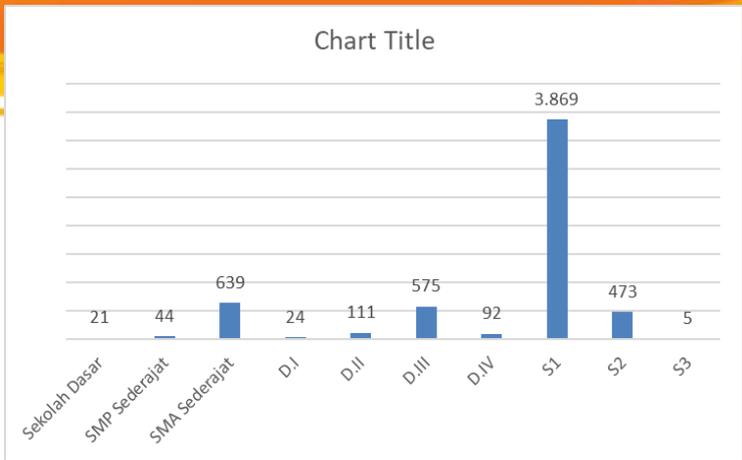
Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2022

Tabel 7.

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) Lingkup Pemkab. Bulukumba Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2022

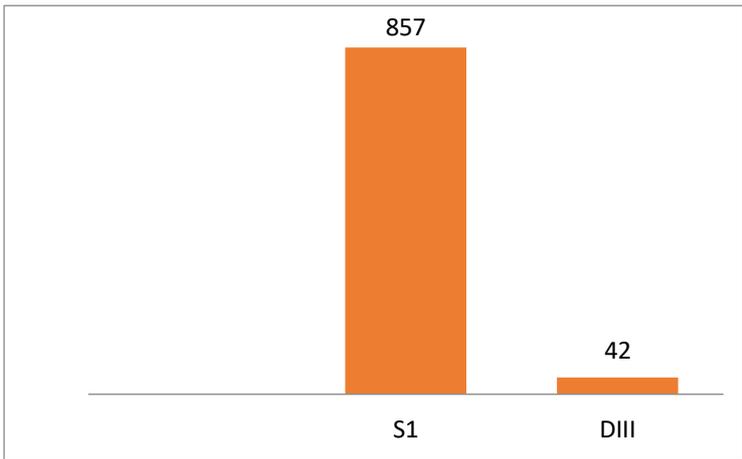
No	t Pendidikan YangDitamatkan	Jumlah
1	S-1	857
2	DIII	42
	Jumlah	899

Grafik persentase banyaknya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2022 berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan digambarkan sebagai berikut.



Gambar 12.
Persentase jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kab. Bulukumba Tahun 2022 berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 2022

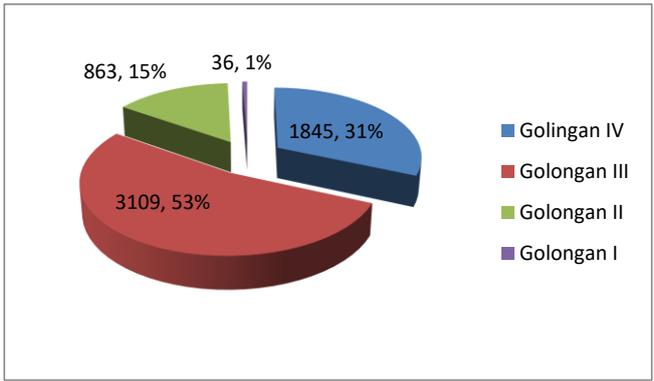


Gambar 12.
Persentase jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) Pemerintah Kab. Bulukumba Tahun 2022 berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 2022

Sementara jika dipilah lagi berdasarkan golongannya, maka jumlah terbesar berada pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III sebanyak 3.109 orang atau 53,11 persen, kemudian golongan IV sebanyak 1.845 orang atau 31,48 persen, selanjutnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II sebanyak 863 orang atau 14,74 persen dan terakhir golongan I sebanyak 36 orang atau 0,61 persen.

Gambar 13.
Persentase jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bulukumba berdasarkan golongan Tahun 2022

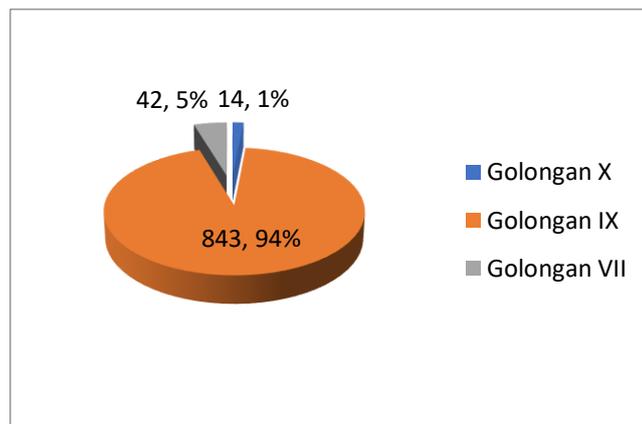


Sumber: Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2022

Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) jika dipilah berdasarkan golongannya maka jumlah terbesar ada pada golongan IX sebanyak 843 orang (93,77 persen) selanjutnya ada pada Golongan VII sebanyak 42 orang (4,67 persen) dan terakhir Golongan X sebanyak 14 orang (15,5 persen).

Gambar 14
Persentase jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja Kabupaten Bulukumba berdasarkan Golongan Tahun 2022

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 2022



Melihat perkembangan pemerintahan yang terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dan kompleks, maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba senantiasa melakukan kegiatan peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara di daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

1.9. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Dalam laporan kinerja ini metode pengukuran dengan membandingkan antara rencana (target) kinerja yang telah ditetapkan/diperjanjikan dengan capaian (realisasi) kinerja yang dicapai pada indikator-indikator yang ada pada setiap sasaran strategis.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, selanjutnya dilakukan analisis dokumen RPJMD, IKU, RKPD, APBD, Renstra, dan Renja perangkat daerah untuk memperoleh gambaran mengenai sasaran strategis yang ditargetkan dan capaian pada tahun kelima pelaksanaan RPJMD.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumus 1 :

Digunakan apabila semakin tinggi/rendah realisasi,
menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik/buruk

Misalnya :

Angka kunjungan wisatawan mancanegara Indeks Pembangunan Manusia



Rumus 2 :

Semakin tinggi/rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang
semakin buruk/ baik.

Misalnya :

Angka buta aksara Prevalensi balita gizi buruk
Angka kematian Ibu Melahirkan

Selanjutnya dalam menentukan tingkat keberhasilan dilakukan pembobotan atas pencapaian rata-rata sebagai berikut:

- Tidak Berhasil (Di atas 0% -49,99%)
- Kurang Berhasil (Di atas 50% -79,99%)
- Cukup Berhasil (Di atas 80% - 99,99%)
- Berhasil(100%)
- Sangat Berhasil (Di atas100%)

Selanjutnya capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah/RPJMD, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional bagi target yang mempunyai SPM, kemudian menganalisis penyebab kegagalan/ keberhasilan kinerja serta alternatif solusinya, menganalisis efisiensi penggunaan sumberdaya, dan menganalisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

1.10 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

1. Peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan, pemudaran olahraga untuk SDM yang berkualitas;
2. Penguatan kewirausahaan disertai dengan pemantapan nilai dan semangat kegotongroyongan;
3. Pengembangan sektor unggulan daerah untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat;
4. Pemantapan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan

- ekonomi Kabupaten Bulukumba;
5. Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur dasar Pemukiman;
 6. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah;
 7. Penguatan penanganan dampak sosial dan kesiap-siagaan bencana.

1.1.1 Sistematika Penulisan

Laporan kinerja ini mengomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan/diperjanjikan sebagai tolok ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan dilakukan identifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja di tahun selanjutnya. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Bulukumba tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I - Pendahuluan

disajikan secara singkat penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis (sejarah singkat daerah, kondisi geografis, gambaran demografis, kondisi perekonomian, struktur pemerintah daerah, sumberdaya manusia), serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II - Perencanaan Kinerja

disajikan muatan rencana pembangunan jangka menengah daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk periode 2021-2026 dan penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2022.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis meliputi: perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah/RPJMD, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional bagi target yang mempunyai SPM, kemudian menganalisis penyebab kegagalan/keberhasilan kinerja serta alternatif solusinya, menganalisis efisiensi penggunaan sumberdaya, dan menganalisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, serta menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

Bab IV - Penutup

diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi di Tahun 2022, serta langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dimasa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 - 2026

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi kepala daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi. RPJMD ini dijabarkan dalam sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan program-program strategis pembangunan.

RPJMD Kabupaten Bulukumba, merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memberikan arah yang terukur untuk memudahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunandaerah. RPJMD Kabupaten Bulukumba disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional tahun 2020- 2024. Dengan adanya keterkaitan antar perencanaan yang lebih tinggi, akan mempermudah pengembangan *sharing* pembiayaan dengan pemerintah pusat untuk program-program yang akan dilakukan.

Dalam pengukuran dan evaluasi kinerja kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, digunakan tata cara evaluasi pengukuran kinerja yang dibagi dalam kinerja sektoral dan kinerja agregat. Kinerja sektoral diharapkan mampu menunjukkan tingkat capaian program-program yang dilaksanakan dan diharapkan dengan dicapainya kinerja sektoral ini kinerja agregat dapat juga dicapai. Namun, disadari bahwa pencapaian kinerja agregat tidak semata-mata merupakan kontribusi Pemerintah Kabupaten Bulukumba, tetapi merupakan kontribusi bersama-sama dari masyarakat, dunia usaha, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten sesuai dengan bobot dan perannya masing-masing. Kinerja agregat yang digunakan dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba ini seperti pertumbuhan ekonomi, pergeseran struktur ekonomi, peranan masing-masing sektor ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan sebagainya.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan sumber daya yang dimiliki dan mengupayakan sumber daya lain dalam mengimplementasikan program-program pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan perumusan RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.

3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Renja Perangkat Daerah (Renja-PD).

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 tahun 2021 tanggal 18 Agustus 2021 adalah: **“Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”**. Dalam rangka mewujudkan visi kabupaten, maka ditetapkan 12 misi Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam masyarakat.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik.
3. Mewujudkan tata kelola pertanian yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan daerah dan ekspor.
4. Meningkatkan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan daerah, nasional dan internasional.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal.
6. Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat.
7. Mengembangkan destinasi wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara .
8. Pembangunan infrastruktur yang merata untuk melancarkan aktivitas masyarakat.
9. Pembangunan dan peningkatan perdagangan dan perindustrian untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah.
10. Membina generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi sportivitas dan profesionalisme.
11. Membangun desa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Penegakan supremasi hukum dan pertahanan dan keamanan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

- ◆ Misi ke -1: Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam masyarakat.

Tujuan	Sasaran
1. terwujudnya kerukunan umat beragama.	1. Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan agama.

- ◆ Misi Ke-2: meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan

publik.

Tujuan	Sasaran
2. Terwujudnya pelayanan prima yang responsive, profesional, transparan dan akuntabel.	2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan modernisasi birokrasi.

- ◆ Misi Ke-3: Mewujudkan tata kelola pertanian yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan daerah dan ekspor.

Tujuan	Sasaran
3. Meningkatkan potensi dan daya saing daerah bidang pertanian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	4. Meningkatnya nilai tambah produk pertanian.

- ◆ Misi Ke-4: Meningkatkan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan daerah, nasional dan internasional.

Tujuan	Sasaran
4. Menciptakan sumber daya manusia yang berjiwa entrepreneur.	5. Meningkatnya produksi hasil perikanan.

- ◆ Misi Ke-5: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia memalui pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal.

Tujuan	Sasaran
5. Terwujudnya SDM yang unggul, dan berkarakter kearifan lokal	6. Meningkatnya kualitas pendidikan

- ◆ Misi Ke - 6: Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat.

Tujuan	Sasaran
6. terwujudnya derajat kesehatan masyarakat	7. meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

- ◆ Misi Ke-7: Mengembangkan destinasi wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara.

Tujuan	Sasaran
7. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap keuangan daerah.	8. Meningkatnya daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara.

- ◆ Misi Ke-8: Pembangunan infrastruktur yang merata untuk melancarkan aktivitas masyarakat.

Tujuan	Sasaran
8. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah yang berkualitas	9. Meningkatnya pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah.

- ◆ Misi Ke-9: Pembangunan dan peningkatan perdagangan dan perindustrian untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah.

Tujuan	Sasaran
9. Meningkatkan kualitas perdagangan dan perindustrian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.	10. Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

- ◆ Misi Ke-10: membina generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi sportivitas dan profesionalisme.

Tujuan	Sasaran
10. Meningkatnya kualitas generasi muda yang berkarakter dan berprestasi	11. Meningkatnya produktivitas generasi muda.

- ◆ Misi Ke-11: membangun desa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan	Sasaran
11. Meningkatkan pembangunan desa di segala sektor	12. Meningkatkan kemandirian desa dalam pembangunan daerah melalui pengembangan kawasan perdesaan.

- ◆ Misi Ke-12: Penegakan supremasi hukum dan pertahanan dan keamanan

Tujuan	Sasaran
12. Meningkatkan kenyamanan dan ketertiban masyarakat	13. Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman.

2.1.3 Strategi Pembangunan

Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan pertimbangan aspek efektifitas dan efisiensi.

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategis yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksud untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis, ini dijalankan melalui program pembangunan daerah dan program prioritas berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui program prioritas masing-masing urusan.

Berdasarkan pemahaman demikian, strategi pembangunan RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Visi: Mewujudkan Masyarakat Produktif yang berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera			
Misi 1: Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam masyarakat;			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3	4
1.	Terwujudnya kerukunan umat beragama	Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama.	Peningkatan fasilitas dan pembinaan keagamaan serta sarana dan prasarana ibadah
Misi 2: Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
2.	Terwujudnya pelayanan prima yang reponsive, profesional, transparan dan akuntabel.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Meningkatnya kualitas pelayanan dan modernisasi birokrasi	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh penerapan TIK.
Misi 3: Mewujudkan tata kelola pertanian yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan daerah dan ekspor.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
3.	Meningkatkan potensi dan daya saing daerah bidang pertanian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya nilai tambah produk pertanian.	Mengoptimalkan produksi dan produktifitas pertanian serta peningkatan upaya pendampingan petani oleh

			penyuluh pertanian
Misi 4: Meningkatkan produktifitas sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan daerah, nasional dan internasional.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
4.	Meningkatkan potensi dan daya saing daerah Bidang Perikanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.	Meningkatnya produksi hasil perikanan.	Mengoptimalkan produksi dan nilai tambah produk perikanan
Misi 5: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
5.	Terwujudnya SDM yang unggul, dan berkarakter kearifan lokal	Meningkatnya kualitas pendidikan.	Peningkatan akses kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, dan peningkatan kulaitas guru.
Misi 6: Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
6.	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.	Peningkatan akses, mutu, dan upaya pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kapasitas tenaga medis dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kesehatan
Misi 7: Mengembangkan destinasi wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
7.	Meningkatkan kotribusi sector pariwisata terhadap keuangan daerah.	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata dmestik dan mancanegara	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD .
Misi 8: Pembangunan infrastruktur yang merata untuk melancarkan aktivitas masyarakat.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
8.	Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah yang berkualitas	Meningkatnya pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah	Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah.
Misi 9: Pembangunan dan peningkatan perdagangan dan perindustrian untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
9.	Meningkatkan kualitas perdagangan dan perindustrian dalam mendorng pertumbuhan ekonomi.	Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong	Peningkatan daya saing industri khususnya industri pengolahan komoditas unggulan wilayah diiringi dengan penguatan dan

		pertumbuhan ekonomi	peningkatan kinerja UMKM serta penguatan distribusi perdagangan.
--	--	---------------------	--

Misi 10: Membina generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi sportivitas dan profesionalisme.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
10.	Meningkatnya kualitas generasi muda yang berkarakter dan berprestasi	Meningkatnya prooduktivitas generasi muda	Peningkatan kualitas sdm kuantitas sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga disertai optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan dan olahraga.

Misi 11: Membangun desa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
11.	Meningkatkan pembangunan desa di segala sektor	Meningkatnya kemandirian desa dalam pembangunan daerah melalui pengembangan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa didukung oleh peningkatan peran masyarakat desa dan kerjasama antar kawasan perdesaan.

Misi 12: Penegakan supremasi hukum dan pertahanan dan keamanan.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
12.	Meningkatkan kenyamanan dan ketertiban masyarakat	Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Peningkatan ketaatan hukum dan upaya penegakan hukum.

Strategi ini bertujuan mengembangkan kegiatan pembangunan secara menyeluruh, dengan harapan akan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, membuka kesempatan berusaha, penciptaan lapangan kerja, menjunjung nilai-nilai luhur sejarah budaya daerah, dan menciptakan kehidupan yang lebih demokratis.

2.1.4 Arah Kebijakan Daerah dan Program Pembangunan Daerah

Sebagai ukuran tercapainya pembangunan lima tahun mendatang, maka ditetapkan arah kebijakan umum dalam rangka pencapaian sasaran pokok yang kemudian dijabarkan dalam program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Bulukumba, sebagai berikut:

Pembangunan tahun 2022 merupakan tahun Pertama dari periode RPJMD. Fokus kebijakan pembangunan tahun 2022 diarahkan kepada:

1. Pembinaan Ketertiban dan Pengembangan Demokrasi
 - a. Penegakan hukum dan norma sosial;
 - b. Dukungan penyelenggaraan pemilu;
 - c. Pembinaan partai politik;

- d. Pemberdayaan perempuan;
 - e. Pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
 - f. Penguatan wawasan dan kesatuan bangsa.
2. Pemantapan kehidupan beragama:
 - a. Pemenuhan sarana/ prasarana ibadah;
 - b. Pemeliharaan kerukunan beragama.
 3. Pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan kesejahteraan sosial.
 4. Peningkatan kapasitas infrastruktur daerah:
 - a. Dukungan pembangunan jalur kereta api (Makassar, Bulukumba-Bone);
 - b. Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan;
 - c. Pengembangan kawasan strategis;
 - d. Peningkatan kapasitas pelabuhan;
 - e. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
 - f. Pengembangan perumahan dan pemukiman;
 - g. Pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi;
 - h. Peningkatan kapasitas penanganan bencana.
 5. Reformasi birokrasi dan penguatan good governance:
 - a. Peningkatan kompetensi aparatur;
 - b. Penertiban pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 - c. Peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan:
 1. Penanganan dampak lingkungan;
 2. Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
 6. Pembangunan bidang kesehatan;
 7. Pembangunan bidang pendidikan;
 8. Optimalisasi potensi unggulan daerah;
 9. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
 10. Pembangunan kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan.

2.1 Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan pernyataan pimpinan tertinggi Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk mewujudkan kinerja pada tahun tertentu (untuk kabupaten) dan merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, dengan adanya perjanjian kinerja ini diharapkan akan terwujud komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan pimpinan perangkat daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

2.1.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja untuk tahun 2022 dibuat di awal tahun anggaran dengan berpedoman pada RPJMD, RKPD tahun 2022, IKU dan APBD tahun 2022. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba telah menetapkan perjanjian kinerja sebagai berikut.

♥ **Sasaran 1:**

Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama.

No.	Indikator Kinerja			Target
1	1	1	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	100%
	2	2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	70%
	3	3	Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	100%
	4	4	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	5 kali
	5	5	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk	2,72%

♥ **Sasaran 2:**

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Pembangunan

No.	Indikator Kinerja			Target
2	1	6	Indeks Reformasi Birokrasi	59
	2	7	Skor LPPD/Kategori	3,5095
	3	8	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP
	4	9	Persentase SILPA Terhadap APBD	3,25
	5	10	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	0%
	6	11	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	21,2
	7	12	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	19,24
	8	13	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)	Tepat
	9	14	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	Waktu
	10	15	Persentase PAD terhadap Pendapatan	0,42
	11	16	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	10,8136
	12	17	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	100
	13	18	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	100
	14	19	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	8,53
	15	20	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	11,29
	16	21	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	11,29
	17	22	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	60,87
	18	23	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	3
	19	24	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	89,03
	20	25	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	77,92
	21	26	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	29
	22	27	Persentase tindak lanjut temuan	1836,64
	23	28	Persentase pelanggaran Pegawai	68,4

No.	Indikator Kinerja		Target	
	24	29	Jumlah temuan BPK	0,25
	25	30	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	7
	26	31	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	Ada
	27	32	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	Ada
	28	33	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	100

♥ **Sasaran 3:**

Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi

No.	Indikator Kinerja		Target	
3	1	34	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka
	2	35	Indeks Gini	0,36
	3	36	Persentase Penduduk miskin	6,61
	4	37	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	12,7
	5	38	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	100
	6	39	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	98,4
	7	40	Persentase PMKS Yang Tertangani	70,8
	8	41	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	91,66
	9	42	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	82,73
	10	43	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	0
	11	44	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	0,15
	12	45	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	2,7564
	13	46	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	1,94
	14	47	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	0,24
	15	48	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	0,06
	16	49	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	0,75
	17	50	Rasio Lulusan S1/S2/S3	741,8
	18	51	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	78,34
	19	52	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	1,01
	20	53	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	0,47
	21	54	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	66,35
	22	55	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	763915
	23	56	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	10

No.	Indikator Kinerja			Target
	24	57	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	100
	25	58	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada
	26	59	Buku "PDRB"	Ada
	27	60	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,	1
	28	61	Rasio bayi berakta kelahiran,	0,8
	29	62	Rasio pasangan berakta nikah,	0,5
	30	63	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100
	31	64	Cakupan penerbitan KTP-el	100
	32	65	Cakupan penerbitan akte kelahiran	80
	33	66	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer	86,9022
	34	67	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0,76051
	35	68	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon	83,9
	36	69	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	54,8656
	37	70	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	86,9022

♥ **Sasaran 4:**

Meningkatnya nilai tambah produk pertanian.

No.	Indikator Kinerja			Target
4	1	71	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	22,76
	2	72	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	1,52
	3	73	Pertumbuhan Ekonomi	3,85
	4	74	PDRB ADHK	8944,6552
	5	75	PDRB Perkapita ADHB	39,15
	6	76	Ketersediaan Pangan Utama	444,01
	7	77	Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari)	9844,21
	8	78	Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)	231,77
	9	79	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	78,39
	10	80	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB	5,5616
	11	81	Cakupan bina kelompok tani	76,2
	12	82	Jumlah Populasi Ternak	
			<i>Sapi Potong</i>	78.729,20
			<i>Ayam Ras Pedaging</i>	2.414.546
		<i>Ayam Ras Petelur</i>	709.631	

♥ **Sasaran5:**

Meningkatnya produksi hasil perikanan.

No.	Indikator Kinerja			Target
5	1	83	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	5,14

2	84	Kontribusi PDRB sector perikanan	12,86
3	85	Cakupan Produksi perikanan	128,6
4	86	Perikanan tangkap	56098,1
5	87	Perikanan Budidaya	5176,2
6	88	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	70,6

♥ **Sasaran 6:**
Meningkatnya kualitas Pendidikan.

No.	Indikator Kinerja			Target
6	1	89	Indeks Pembangunan Manusia	Angka
	2	90	Indeks Pendidikan	Angka
	3	91	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
			SD	114,151
			SMP	94,858
			SMA	87,738
	4	92	Angka Partisipasi Murni (APM)	
			SD	98,6703
			SMP	84,4686
			SMA	66,2349
5	93	Angka Parsitipasi Sekolah (APS)		
		7-12 Tahun	98,8684	
		14-15 Tahun	92,2674	
		16-18 Tahun	75,5814	
6	94	Angka Putus Sekolah		
		SD	0	
		SMP	0	
		SMA	0,14021	
7	95	Angka Kelulusan		
		SD	100	
		SMP	100	
		SMA	100	
8	96	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv	100	
9	97	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	01.09	
10	98	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	01.08	

No.	Indikator Kinerja			Target
	11	99	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas	91,57
	12	100	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	3,11269
	13	101	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	57,8358
	14	102	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	2
	15	103	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	38,52
	16	104	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	43,898
	17	105	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	1,428
	18	106	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	63322
	19	107	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	11703,8
	20	108	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	57,208
	21	109	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	100.00
	22	110	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	1,24005

♥ **Sasaran 7:**

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan.

No.	Indikator Kinerja			Target
7	1	111	Indeks Kesehatan	74,94
	2	112	Angka Harapan Hidup (AHH)	68,71
	3	113	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup	5,24
	4	114	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup	9,994
	5	115	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup	0
	6	116	Angka Kematian Ibu	52,324
	7	117	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	27,136
	8	118	Rasio Puskesmas Dan Pustu	0,19
	9	119	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,002
	10	120	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk	0,04
	11	121	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0,09386
	12	122	Rasio Tenaga Medis/Penduduk	0,2344
	13	123	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	85,4476
	14	124	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100
	15	125	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	100
	16	126	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta	44,22

No.	Indikator Kinerja			Target
	17	127	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	101,325
	18	128	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	3,23
	19	129	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100
	20	130	Angka Kejadian Malaria	1,46
	21	131	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	0,0088
	22	132	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	8,27
	23	133	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	73,5481
	24	134	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	52,6511
	25	135	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	85,6783

♥ **Sasaran 8:**

Meningkatnya daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara

No.	Indikator Kinerja			Target
8	1	136	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	2,88
	2	137	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	5,37
	3	138	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	373095
	4	139	Lama Kunjungan Wisata	2-4
	5	140	PAD Sektor Pariwisata	5,37

♥ **Sasaran 9:**

Meningkatnya pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah.

No.	Indikator Kinerja			Target
9	1	141	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka
	2	142	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0,639
	3	143	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	0,0032
	4	144	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	98,9327
	5	145	Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	80,79
	6	146	Rasio Jaringan Irigasi	0,21
	7	147	Rasio Rumah Layak Huni	0,24793
	8	148	Persentase Pemukiman Yang Tertata	71,566
	9	149	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	11,6096
	10	150	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	
	11	151	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	83,3415
	12	152	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	84,8944
	13	153	Persentase Areal Kawasan Kumuh	0
	14	154	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	8,6673
	15	155	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	26,67
	16	156	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	68,95

No.	Indikator Kinerja			Target
17	157	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		62,9144
18	158	Penurunan Emisi GRK		462952,25
19	159	Indeks Kualitas Air		58,85
20	160	Indeks Kualitas Udara		84,74
21	161	Indeks Kualitas Tutup Lahan		100
22	162	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		1
23	163	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA		1
24	164	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional		1
25	165	Penetapan Hak MHA		100
26	166	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan		100
27	167	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana		1
28	168	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat		Ada
29	169	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup		100
30	170	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,		27,219
31	171	Timbulan Sampah Yang Ditangani		94,8814
32	172	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani		25,2026
33	173	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota		38,3614
34	174	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)		1,38584
35	175	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001		31,9966
36	176	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan		34,6449
37	177	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan		0
38	178	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati		
39	179	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		3
40	180	Jumlah arus penumpang angkutan Umum		14099,6
41	181	Persentase Layanan Angkutan Darat		1,23126
42	182	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum		92,4
43	183	Pemasangan Rambu-Rambu		66,01
44	184	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum		26480
45	185	Rasio Ijin Trayek		0,008

♥ **Sasaran 10:**

Berkembangnya potensi dan daya tarik wisata.

No.	Indikator Kinerja			Target
10	1	186	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	24
	2	187	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	11
	3	188	Persentase koperasi aktif	74,73
	4	189	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	98,43

No.	Indikator Kinerja			Target
	5	190	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	0,72
	6	191	Jumlah Pasar	43
	7	192	Cakupan bina kelompok pengrajin	0,168

♥ **Sasaran 11:**

Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas).

No.	Indikator Kinerja			Target
11	1	193	Indeks Pembangunan Pemuda	56,6
	2	194	Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi	18,0
	3	195	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	88,926
	4	196	Persentase wirausaha muda	3,13
	5	197	Cakupan Pembinaan Olahraga	22,1738
	6	198	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan	36,204
	7	199	Cakupan pembinaan atlet muda	48,4293
	8	200	Jumlah atlet berprestasi	18,2
	9	201	Jumlah prestasi olahraga	3,2375
	10	202	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	68,95
	11	203	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	26,67

♥ **Sasaran 12:**

Meningkatnya kemandirian desa dalam pembangunan daerah melalui pengembangan kawasan perdesaan.

No.	Indikator Kinerja			Target
12	1	204	Indeks Desa Membangun	0,74
	2	205	Persentase Desa Mandiri	1,83
	3	206	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	100
	4	207	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Pkk	146
	5	208	Persentase Lsm Aktif	100
	6	209	Persentase Pkk Aktif	100
	7	210	Persentase Posyandu Aktif	100
	8	211	Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100
	9	212	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	93

♥ **Sasaran 13:**

Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman.

No.	Indikator Kinerja			Target
13	1	213	Indeks Rasa Aman	15
	2	214	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	88,56
	3	215	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp)	0,54
	4	216	Total Fertility Rate (Tfr)	2,44

No.	Indikator Kinerja		Target
5	217	Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	73,59
6	218	Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	14,99
7	219	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	1
8	220	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan	1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB
9	221	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,	1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM
10	222	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	18,19
11	223	Ratio Akseptor Kb	16,92
12	224	Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	75,16
13	225	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	89,79
14	226	Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	4,41
15	227	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	12,48
16	228	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	37,32
17	229	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	46,97
18	230	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	92,61
19	231	Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb	74,96
20	232	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- Kb	81,76
21	233	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Setiap Kecamatan	10
22	234	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	1,39
23	235	Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bdadng Pengendalian Penduduk	100
24	236	Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri	0,26
25	237	Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (Ppkbd) Setiap Desa/Kelurahan	100

No.	Indikator Kinerja		Target
26	238	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	100
27	239	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	38,85
28	240	Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa	100
29	241	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Sesual (Ims)	0
30	242	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	100
31	243	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	38,38
32	244	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	22,64
33	245	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes	0,01
34	246	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,31
35	247	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100
36	248	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	
37	249	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100
38	250	Persentase Penegakan Perda	100
39	251	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	4,36
40	252	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	24
41	253	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	83,62
42	254	Rasio KDRT	0
43	255	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	96,91
44	256	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100
45	257	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit	77,25

No.	Indikator Kinerja		Target
46	258	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	100
47	259	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada
48	260	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada
49	261	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada

2.2.2 Rencana Anggaran Tahun 2022

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. **1.581.422.605.370,00** Tahun 2022, Anggaran belanja ini digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 7.
Rencana Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Belanja Daerah		
		Anggaran Pokok		
		(Rupiah)	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	1.008.944.182.414,00	911.207.258.499,88	90,31
2	Belanja Modal	381.691.934.815,00	255.053.250.411,62	66,82
3	Belanja tidak terduga	10.631.393.294,00	658.045.600,00	6,19
4	Belanja transfer	180.155.094.847,00	178.031.802.413,00	98,82
Jumlah		1.581.422.605.370,00	1.344.950.356.924,50	

Sumber: BPKPD Kab. Bulukumba, 2023

Alokasi anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 8.
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun
Anggaran 2022
Berdasarkan Sasaran Strategis Pembangunan Daerah

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama	2.720.237.430,00	2.639.904.545,00	97,05
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Pembangunan	205.519.638.450,00	194.494.821.220,30	94,64
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	5.371.031.535,00	5.005.862.266,00	93,20
4	Meningkatnya nilai tambah produk pertanian	17.213.356.575,00	14.585.612.949,00	84,73
5	Meningkatnya produksi hasil perikanan	8.822.443.178,00	7.304.711.338,00	82,80
6	Meningkatnya kualitas Pendidikan	89.763.414.347,00	80.466.949.406,00	89,64
7	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	216.458.968.101,00	173.651.795.166,70	80,22
8	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara	3.897.462.130,00	3.040.566.740,00	78,01
9	Meningkatnya pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah	230.303.584.979,00	195.393.097.745,00	84,84
10	Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, perindustrian, UMKM dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	85.126.067.017,00	8.852.580.025,00	10,40
11	Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas)	8.901.245.499,00	7.380.526.252,00	82,92
12	Meningkatnya kemandirian desa dalam pembangunan daerah melalui pengembangan kawasan perdesaan	1.551.185.400,00	1.474.226.662,00	95,04

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
13	Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	37.510.794.163,00	34.994.785.854,00	93,29
	BELANJA YANG MENDUKUNG SASARAN	913.159.428.804,00	729.285.440.169,00	79,86
	BELANJA PENDUKUNG	668.263.176.566,00	615.664.916.755,50	92,13
	TOTAL BELANJA	1.581.422.605.370,00	1.344.950.356.924,50	85,05

Sumber: BPKPD Kab. Bulukumba, 2023

Pada tabel di atas, pada pos belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja program/kegiatan/sub kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan/sub kegiatan utama sebesar Rp. 913.159.428.804,00 atau sebesar 57,74 persen dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 668.263.176.566,00 atau 42,26 persen dari total anggaran belanja.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran pembangunan dengan anggaran paling besar adalah **sasaran Meningkatkan pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah** yaitu sebesar Rp. 230.303.584.979,00 atau 14,56 persen dari belanja, anggaran terbesar pada sasaran ini dialokasikan pada 22 program utama yaitu: Program Pengelolaan Dan Pengembangansistem Air Limbah dengan anggaran sebesar Rp. 4.829.108.000 atau 0,30 persen, Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan anggaran sebesar Rp.100.181.300 atau 0,006 persen, Program Penyelenggaraan Penataanruang dengan anggaran sebesar Rp. 128.748.000 atau 0,008 persen, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan anggaran sebesar Rp. 18.353.960.885 atau 1,16 persen, Program Penyelenggaraan Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 111.594.120.213 atau 7,05 persen, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) dengan anggaran sebesar Rp. 11.901.861.195 atau 0,75 persen, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan anggaran sebesar Rp. 9.267.638.436 atau 0,58 persen, Program Kawasan Permukiman dengan anggaran sebesar Rp. 13.077.344.990 atau 0,82 persen, Program Peningkatan Prasarana,Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) dengan anggaran sebesar Rp. 297.797.100 atau 0,019 persen, Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah dengan anggaran sebesar Rp. 133.311.080 atau 0,008 persen, Program Pengembangan Perumahan dengan anggaran sebesar Rp. 425.801.180 atau 0,027 persen, Program Penataan Bangunan Gedung dengan anggaran sebesar Rp. 41.453.705.339 atau 2,62 persen, Program Pengelolaan Persampahan dengan anggaran sebesar Rp. 7.759.548.273 atau 0,49 persen, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)dengan anggaran sebesar Rp. 285.796.000 atau 0,018 persen, Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 425.300.200 atau 0,027 persen, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Ataukerusakan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 290.846.728 atau 0,018 persen, Program Pengendalian Bahan Berbahaya Danberacun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Danberacun (Limbah B3)

dengan anggaran sebesar Rp. 51.005.500 atau 0,003 persen, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) dengan anggaran sebesar Rp. 20.556.600 atau 0,001 persen, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 53.952.700 atau 0,003 persen, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp. 14.730.600 atau 0,001 persen, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayatid dan Ekosistemnya dengan anggaran sebesar Rp. 49.739.600 atau 0,003 persen, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj) dengan anggaran sebesar Rp. 1.993.606.800 atau 0,126 persen.

Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah **sasaran Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat** yaitu sebesar Rp. 216.458.968.101,00 atau 13,69 persen, dan **sasaran Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Pembangunan** yaitu sebesar Rp. 205.519.638.450,00 atau 13,00 persen. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang terkecil adalah **sasaran meningkatnya kemandirian desa dalam pembangunan daerah melalui pengembangan kawasan perdesaan**, dengan anggaran sebesar Rp 1.551.185.400,00 atau 0,10 persen dari total anggaran belanja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Bulukumba melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan maupun kegagalan pada tahun 2022.

Ada beberapa kriteria pengukuran yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mengukur capaian kinerja, yaitu:

Untuk mengukur kinerja tahunan digunakan kriteria sebagai berikut:

- Capaian $>100\%$ dengan notifikasi warna biru yang berarti sangat berhasil **(SB)**.
- Capaian = 100% dengan notifikasi warna hijau yang berarti berhasil **(B)**.
- Capaian $80\% \leq 99,99\%$ dengan notifikasi warna kuning yang berarti cukup berhasil **(CB)**.
- Capaian $50\% \leq 79,99\%$ dengan notifikasi warna orange yang berarti kurang berhasil **(KB)**.
- Capaian $\leq 50\%$ dengan notifikasi warna merah yang berarti tidak berhasil **(TB)**.

Untuk mengukur kinerja jangka menengah dengan membandingkan kinerja tahun terakhir RPJMD dengan realisasi sampai dengan tahun berjalan digunakan kriteria sebagai berikut:

- Capaian $\geq 70\%$ dengan notifikasi **I** yang berarti sudah tercapai/*on track/ontrend*.
- Capaian $40\% \leq 69,99\%$ dengan notifikasi **K** kerja keras untuk dapat mencapainya.
- Capaian $0\% \leq 39,99\%$ dengan notifikasi **L** yang berarti sulit untuk dapat dicapai.

3.1 Capaian Kinerja IKU

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2022 ini akan dijelaskan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bulukumba secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
1	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	B
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	70,00	70,00	100,00	B
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	59,00	59,46	100,78	SB
4	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,51	0,00	0,00	TB
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,25	3,25	100,00	B
6	Indeks Gini	%	0,36	0,36	101,40	SB
7	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,76	24,42	107,29	SB
8	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	1,52	3,81	251,39	SB
9	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	5,14	-0,31	-6,03	TB
10	Kontribusi PDRB sector perikanan	%	12,86	12,57	97,74	CB
11	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,11	70,34	100,33	SB
12	Indeks Pendidikan	Angka	64,06	63,98	99,88	CB
13	Indeks Kesehatan	Angka	74,94	74,63	99,59	CB

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
14	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,71	68,51	99,71	CB
15	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	2,88	4,47	155,21	SB
16	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	5,37	22,48	418,62	SB
17	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	88,00	89,00	101,14	SB
18	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	24,47	0,00	0,00	TB
19	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	11,08	6,68	60,29	KB
20	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	56,60	56,85	100,44	SB
21	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	18,00	25,20	140,00	SB
22	Indeks Desa Membangun	Angka	0,74	0,72	97,30	CB
23	Persentase Desa Mandiri	%	1,83	0,12	6,56	TB
24	Indeks Rasa Aman	Angka	15,00	0,00	0,00	TB
25	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	88,56	51,77	58,46	KB

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 sebanyak 25 indikator, dan capaian indikator kinerja utama tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Sangat berhasil atau >100% (biru) sebanyak 10 indikator.
- Berhasil atau =100% (hijau) sebanyak 3 indikator.

- Cukup berhasil atau $80\% \leq 99,99\%$ (kuning) sebanyak 5 indikator.
- Kurang berhasil atau $50\% \leq 79,99\%$ (orange) sebanyak 2 indikator.
- Tidak berhasil atau $\leq 50\%$ (merah) sebanyak 5 indikator.

Dari 25 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 40,00 persen dengan notifikasi biru dengan kriteria sangat berhasil (SB), 12,00 persen dengan notifikasi hijau dengan kriteria berhasil (B), 20,00 persen dengan notifikasi kuning dengan kriteria cukup berhasil (CB), 8,00 persen dengan notifikasi orange dengan kriteria kurang berhasil (KB), dan 20,00 persen dengan notifikasi merah dengan kriteria tidak berhasil (TB). Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Kabupaten Bulukumba tahun 2022 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

3.2 Capaian Kinerja IKD

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2022 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Meningkatkan hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama

Analisis pencapaian **Sasaran 1:** Meningkatkan hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama	1	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100	100,00	B
	2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	70	70	100,00	B
	3	Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	%	100	100	100,00	B
	4	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5	5,00	100,00	B
	5	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk	Angka	2,7	2,60	95,59	CB
Rata-rata Capaian						99,12	CB

Dari 5 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, tidak terdapat indikator kinerja sasaran mencapai target 100 persen atau sangat berhasil dan 5 indikator kinerja belum mencapai target namun telah tercapai

di atas 98 persen atau cukup berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama, telah berhasil melampaui target yaitu rata-rata 99,12 persen.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi	
			2021	2022
1	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	72	70
3	Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	%	100	100
4	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5	5,00
5	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk	Angka	2,91	2,60

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 5 indikator yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama, tidak mengalami peningkatan dari tahun lalu dan tahun sekarang.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja	Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian (%)	Notif	
1	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100,00	100,00	😊
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	72	71,00	98,61	😊
3	Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	%	100	100,00	100,00	😊
4	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5	5,00	100,00	😊
5	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk	Angka	2,86	2,76	96,33	😊

Pada Sasaran strategis 1, Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama, terdapat 5 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, dan semua indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/*on track/on trend*.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama melalui indikator Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani dengan capaian

tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani pada tahun 2021 baik atau belum mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen. Indikator sasaran ini merupakan indikator pencapaian yang membutuhkan waktu jangka panjang untuk dapat menuntaskannya.

Kedua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama melalui indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2022 berhasil dengan capaian target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 70 persen. Keberhasilan pencapaian target indikator tersebut didukung dengan adanya kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan Kerukunan Umat Beragama



Ketiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama melalui indikator Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu sebesar 100 persen.

Keempat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama melalui indikator Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen, artinya realisasi Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat tahun 2022 berhasil dan mencapai target yaitu 5 kali dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu sebesar 5 kali.

Kelima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama melalui indikator Rasio tempat ibadah persatuan penduduk dengan capaian tahun 2022 sebesar 95,59 persen, artinya realisasi Rasio tempat ibadah persatuan penduduk tahun 2022 cukup berhasil dan mencapai target yaitu 2,60 angka dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu sebesar 2,72 angka.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan hubungan masyarakat yang

harmonis berlandaskan nilai agama ini adalah sebesar Rp.2.720.237.430,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.2.639.904.545,00 atau 97.05 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama ini adalah sebanyak 5 program, yaitu:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosila dan Budaya
2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
5. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Analisis pencapaian **Sasaran 2: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			Notif
				Tar get	Real isasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	59,00	59,46	100,78	SB
	2	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,51	0,00	0,00	TB
	3	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	%	100	100,00	100,00	B
	4	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	3,25	6,77	208,31	SB
	5	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	%	0	0,00	0,00	TB
	6	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	21	28,05	132,31	SB
	7	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	19	18,44	95,84	CB
	8	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)	%	100	100,00	100,00	B
	9	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	%	0,42	0,5400	128,57	SB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
	10	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11	11,95	110,55	SB
	11	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100	100,00	100,00	B
	12	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100	100,00	100,00	B
	13	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	9	5,12	60,0	KB
	14	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	%	11	1,61	14,26	TB
	15	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	11	15	129,76	SB
	16	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	61	60,87	100,00	B
	17	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	bulan	3	3,00	100,00	B
	18	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	89	66,35	74,53	KB
	19	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	78	29,40	37,7	TB
	20	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	29	9,28	32,00	TB
	21	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	1837	538	29,29	TB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
	22	Persentase tindak lanjut temuan	%	68	88	129,30	SB
	23	Persentase pelanggaran Pegawai	%	0,25	0	20,81	TB
	24	Jumlah temuan BPK	Temuan	7	5	71,43	KB
	25	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	%	100	100	100,00	B
	26	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	%	100	100	100,00	B
	27	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	%	100	100	100,00	B
	28	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	%	100	100	100,00	B
Rata-rata Capaian						84,84	CB

Dari 28 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 7 indikator kinerja mencapai target di atas 100 persen atau sangat berhasil, 7 indikator kinerja tidak mencapai target. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah cukup berhasil mencapai target yaitu rata-rata 84,84 persen.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi	
			2021	2022
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	56,8	59,46
2	Skor LPPD/Kategori	Skor	0,0	0,00
3	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	%	80	100,00
4	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	4,2	6,77
5	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	%	0,0	0,00

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi	
			2021	2022
6	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	32,7	28,05
7	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	22,1	18,44
8	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)	%	100	100,00
9	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	%	0,6100	0,5400
10	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11,2	11,95
11	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100,0	100,00
12	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100,0	100,00
13	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	6,59	5,12
14	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	%		1,61
15	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	7,41	15
16	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	20,2	60,87
17	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	bulan	0,1	3,00
18	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	65,8	66,35
19	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	10,27	29,40
20	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	16,00	9,28
21	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	43,18	538
22	Persentase tindak lanjut temuan	%	34,59	88
23	Persentase pelanggaran Pegawai	%	0,00	0
24	Jumlah temuan BPK	Temuan	14,00	5
25	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	%	100,00	100
26	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	%	100,00	100
27	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	%	100,00	100
28	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	%	100,00	100

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 19 indikator yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengalami peningkatan, dan 3 indikator tidak mengalami peningkatan atau sama dengan tahun lalu, dan 6 indikator tidak mengalami peningkatan dari kondisi awal.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

	Indikator Kinerja	Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi s/d Tahun 2022	Capaian (%)	Notif
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,0	58,12	96,86	😊
2	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,6	0,00	0,00	😞
3	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	%	100	90,00	90,00	😊
4	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	2,25	5,50	244,44	😊
5	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	%	0	0,00	0,00	😞
6	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	22	30,39	138,11	😊
7	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	20,04	20,27	101,15	😊
8	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)	%	100	100,00	100,00	😊
9	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	%	1,22	0,58	47,13	😐
10	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11,4	11,57	101,49	😊
11	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100	100,00	100,00	😊
12	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100	100,00	100,00	😊
13	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	14,83	5,86	39,48	😞
14	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	%	15,05	0,81	5,35	😞
15	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	15,05	11,03	73,28	😊
16	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	61,55	40,56	65,90	😐
17	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	bulan	3	1,55	51,50	😐
18	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	90,31	70,17	77,70	😊
19	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	100	24,00	24,00	😞
20	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	29	24,00	82,76	😊

	Indikator Kinerja	Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi s/d Tahun 2022	Capaian (%)	Notif
21	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	1274,88	290,59	22,79	
22	Persentase tindak lanjut temuan	%	100	61,52	61,52	
23	Persentase pelanggaran Pegawai	%	0	0,03	0,00	
24	Jumlah temuan BPK	Temuan	3	9,50	316,67	
25	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	%	100	100,00	100,00	
26	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	%	100	100,00	100,00	
27	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	%	100	100,00	100,00	
28	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	%	100	100,00	100,00	

Pada Sasaran strategis 2, Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat 28 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 16 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/*on track/on trend*, dan 5 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 7 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian tahun 2022 sebesar 100,78 Angka artinya realisasi persentase Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 berhasil atau sesuai target yaitu 59,46 angka dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 59,00 angka.

Kedua, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Skor LPPD/Kategori dengan capaian tahun 2022 belum berhasil karena belum ada penilaian dari Kementerian Dalam Negeri

Ketiga, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan tahun 2022 berhasil mencapai target atau 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.



Keempat, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase SILPA Terhadap APBD dengan capaian tahun 2022 sebesar 208,31 persen artinya realisasi persentase SILPA Terhadap APBD tahun 2022 berhasil atau mencapai target yaitu 6,77 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3,25 persen.

Kelima, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana dengan capaian tahun 2022 sebesar 0 persen artinya realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana sampai dengan tahun 2022 berhasil atau sudah mencapai target yaitu 0 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0 persen

Keenam, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase Belanja Pendidikan (20%) dengan capaian tahun 2022 sebesar 132,31 persen artinya realisasi jumlah Persentase Belanja Pendidikan (20%) tahun 2022 berhasil atau terlaksana yaitu 28,05 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 21 persen.

Ketujuh, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase Belanja Kesehatan (10%) dengan capaian tahun 2022 sebesar 95,84 persen artinya realisasi jumlah Persentase Belanja Kesehatan (10%) tahun 2022 berhasil atau terlaksana yaitu 18,44 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 19 persen.

Kedelapan, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak) dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi jumlah Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak) tahun 2022 berhasil atau terlaksana yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.



Kesembilan, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa dengan capaian tahun 2022 sebesar 128,57 persen artinya realisasi jumlah Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa tahun 2022 berhasil atau terlaksana yaitu 0,54 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,42 persen.

Kesepuluh, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan dengan capaian tahun 2022 sebesar 110,55 persen artinya realisasi jumlah Persentase PAD terhadap Pendapatan tahun 2022 sangat berhasil atau terlaksana yaitu 11,95 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 11 persen.



Kesebelas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD tahun 2022 berhasil atau terlaksana yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keduabelas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD tahun 2022 berhasil atau terlaksana yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Ketigabelas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase implementasi rencana Kelitbangan dengan capaian tahun 2022 sebesar 60 persen artinya realisasi jumlah Persentase implementasi rencana Kelitbangan tahun 2022 kurang berhasil atau terlaksana yaitu 5,12 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 9 persen.

Keempatbelas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan dengan capaian tahun 2022 sebesar 14,26 persen artinya realisasi jumlah Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan tahun 2022 tidak berhasil atau terlaksana yaitu 1,61 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 11 persen.

Kelimabelas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah dengan capaian tahun 2022 sebesar 129,76 persen artinya realisasi jumlah Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah tahun 2022 sangat berhasil atau terlaksana yaitu 15 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 11 persen.

Keenambelas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi jumlah Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah tahun 2022 berhasil atau terlaksana yaitu 60,87 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 61 persen.



Ketujuhbelas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi jumlah Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan tahun 2022 berhasil atau terlaksana yaitu 3 bulan dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3 bulan.

Kedelapanbelas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal dengan capaian tahun 2022 sebesar 87,71 persen artinya realisasi jumlah Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal tahun 2022 cukup berhasil atau terlaksana yaitu 74,53 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 89 persen.

Kesembilanbelas, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural dengan capaian tahun 2022 sebesar 48,4 persen artinya realisasi jumlah Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural tahun 2022 tidak berhasil atau terlaksana yaitu 37,73 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 78 persen.

Keduapuluh, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah dengan capaian tahun 2022 sebesar 110,34 jabatan artinya realisasi Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah tahun

2022 sangat berhasil atau terlaksana yaitu 32,00 jabatan dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 29 jabatan.

Keduapuluh satu, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah dengan capaian tahun 2022 sebesar 29,29 jabatan artinya realisasi Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah tahun 2022 tidak berhasil atau terlaksana yaitu 538 jabatan dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1837 jabatan.

Keduapuluh dua, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase tindak lanjut temuan dengan capaian tahun 2022 sebesar 129,30 persen artinya realisasi Jumlah Persentase tindak lanjut temuan tahun 2022 sangat berhasil atau terlaksana yaitu 88 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 68 persen.

Keduapuluh tiga, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Persentase pelanggaran Pegawai dengan capaian tahun 2022 sebesar 20,81 persen artinya realisasi Jumlah Persentase pelanggaran Pegawai tahun 2022 tidak berhasil atau terlaksana yaitu 0,05 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,25 persen.

Keduapuluh empat, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Jumlah temuan BPK dengan capaian tahun 2022 sebesar 71,43 temuan artinya realisasi Jumlah temuan BPK tahun 2022 kurang berhasil atau terlaksana yaitu 5 temuan dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 7 temuan.



Keduapuluh lima, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada tahun 2022 berhasil atau terlaksana yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.



Keduapuluh enam, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada tahun 2022 berhasil atau terlaksana yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keduapuluh tujuh, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda tahun 2022 berhasil atau terlaksana yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keduapuluh delapan, pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui indikator Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW tahun 2022 berhasil atau terlaksana yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ini adalah sebesar Rp. 205.519.638.450,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 194.494.821.220,30 dengan persentase 94,64 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan ini adalah sebanyak 12 program yaitu:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Program Kepegawaian Daerah
7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Program Penyelenggaraan Pengawasan
9. Program Perekonomian Dan Pembangunan
10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
11. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

12. Program Penelitian Danpembangunan Daerah

3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi

Analisis pencapaian **Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,25	3,25	100,00	B
	2	Indeks Gini	%	0,36	0,36	101,40	SB
	3	Persentase Penduduk miskin	%	6,61	7,39	88,26	CB
	4	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit	13,00	13	100,00	B
	5	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	%	100	100	100,00	B
	6	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	98,42	100	101,61	SB
	7	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	70,8	40,73	57,53	KB
	8	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	91,66	91,66	100,00	B
	9	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	82,73	80,44	97,23	CB
	10	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	%	0	23,26	0,00	TB
	11	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0,15	0,15	100,00	B
	12	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	2,76	2,69	97,30	CB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
	13	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	%	1,94	1,29	66,47	KB
	14	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	0,24	0,7	291,67	SB
	15	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	%	0,06	0,07	116,67	SB
	16	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	0,75	0,69	91,43	CB
	17	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10,000	741,80	3179	428,55	SB
	18	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		78,34	33,85	43,21	TB
	19	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan		1,01	1,01	100,00	B
	20	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat		0,47	1	212,77	SB
	21	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	buah	66,00	23,1	35,00	TB
	22	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	763.915	414.9739.06	54,32	KB
	23	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	10	8,7	87,00	CB
	24	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	%	100	100	100,00	B
	25	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	%	100	100	100,00	B
	26	Buku "PDRB"	%	100	100	100,00	B
	27	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,	%	1	0,011	1,10	TB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
	28	Rasio bayi berakta kelahiran,	%	0,8	0,0076	0,95	TB
	29	Rasio pasangan berakta nikah,	%	0,5	0,005	1,00	TB
	30	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100	100,00	B
	31	Cakupan penerbitan KTP-el	%	100	109,55	109,55	SB
	32	Cakupan penerbitan akte kelahiran	%	80	88,85	111,06	SB
	33	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer	%	87,0	0	0,00	TB
	34	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	0,8	0	0,00	TB
	35	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon	%	83,9	0	0,00	TB
	36	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	%	54,87	0	0,00	TB
	37	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	%	86,90	0	0,00	TB
Rata-rata Capaian						84.68	CB

Dari 37 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 8 indikator kinerja mencapai target di atas 100 persen atau sangat berhasil, 4 indikator tercapai di atas 80 persen atau cukup berhasil, 10 indikator tercapai sama dengan 100 persen atau berhasil dan 3 indikator tercapai di atas 50 persen atau kurang berhasil serta 12 indikator yang tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi, kurang berhasil yaitu rata-rata 76,56 persen.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi	
			2021	2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,25	3,25
2	Indeks Gini	%	0,362	0,361
3	Persentase Penduduk miskin	%	31,31	31,29
4	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit	1,69	13

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi	
			2021	2022
5	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	%	100	100
6	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	26,16	100
7	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	20,49	40,73
8	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	91,49	91,66
9	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	79,24	80,44
10	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	%	1,82	23,26
11	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0,11	0,15
12	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	1,82	2,68
13	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	%	1,75	1,29
14	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	0,25	0,7
15	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	%	0,08	0,07
16	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	0,3763	0,69
17	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10,000	717,48	3179
18	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	%	32,45	33,85
19	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	0,98	1,01
20	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	1	1
21	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	buah	73,71	23,1
22	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	2.215.177,91	414.973.906
23	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	8,7	8,7
24	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	%	100	100
25	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	%	100	100
26	Buku "PDRB"	%	100	100
27	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,	%	0,00999	0,01095
28	Rasio bayi berakta kelahiran,	%	0,007	0,008
29	Rasio pasangan berakta nikah,	%	0,005	0,005
30	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100
31	Cakupan penerbitan KTP-el	%	99,9	109,55
32	Cakupan penerbitan akte kelahiran	%	72,47	88,85
33	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer	%	0	0
34	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	0	0

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi	
			2021	2022
35	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon	%	0	0
36	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	%	0	0
37	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	%	0	0

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 37 indikator yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi mengalami peningkatan, 6 indikator mengalami penurunan dari tahun lalu, dan 14 indikator sama dengan tahun lalu. dan 17 indikator mengalami peningkatan dari kondisi awal.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja		Sat	Target 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian (%)	Notif
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	4	3,25	81,25	😊
2	Indeks Gini	%	0,33	0,36	110,55	😊
3	Persentase Penduduk miskin	%	5,89	7,39	120,73	😊
4	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit	11	7,35	66,77	😐
5	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	%	100	100,00	100,00	😊
6	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	100	63,08	63,08	😐
7	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	48,6	39,01	80,27	😊
8	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	92,19	95,75	103,86	😊
9	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	77,95	88,24	113,20	😊
10	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	%	0	12,54	0,00	😞
11	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0	0,13	0,00	😞

	Indikator Kinerja	Sat	Target 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian (%)	Notif
12	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	8,82	2,25	25,54	☹️
13	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	%	2,47	1,52	61,53	😐
14	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	0,21	0,48	226,19	😊
15	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	%	0,03	0,08	250,00	😊
16	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	0,91	0,53	58,35	😐
17	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10,000	813,13	1948,24	239,60	😊
18	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		100	33,15	33,15	☹️
19	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan		1,17	1,00	85,04	😊
20	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat		0,05	1,00	2000,00	😊
21	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	buah	76	48,41	63,69	😐
22	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	831,275	1315,08	158,20	😊
23	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	35	8,70	24,86	☹️
24	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	%	100	100,00	100,00	😊
25	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	%	100	100,00	100,00	😊
26	Buku "PDRB"	%	100	100,00	100,00	😊
27	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,	%	1	0,01	1,05	☹️
28	Rasio bayi berakta kelahiran,	%	0,8	0,01	0,93	☹️
29	Rasio pasangan berakta nikah,	%	0,5	0,01	1,00	☹️
30	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100,00	100,00	😊
31	Cakupan penerbitan KTP-el	%	100	104,73	104,73	😊

	Indikator Kinerja	Sat	Target 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian (%)	Notif
32	Cakupan penerbitan akte kelahiran	%	80	80,66	100,83	😊
33	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer	%	102	0,00	0,00	😞
34	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	0,85	0,00	0,00	😞
35	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon	%	86,7	0,00	0,00	😞
36	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	%	65,87	0,00	0,00	😞
37	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	%	100	0,00	0,00	😞

Pada Sasaran strategis 3, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi, terdapat 37 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 18 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/*on track/on trend*, 6 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi kuning yang berarti butuh kerja keras untuk mencapainya dan 13 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 angka artinya realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu 3,25 angka dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3,25 angka.

Kedua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Indeks Gini dengan capaian tahun 2022 sebesar 101,40 persen artinya realisasi Indeks Gini tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu 0,361 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,36 persen.

Ketiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Persentase Penduduk miskin dengan capaian tahun 2022 sebesar -273,12 persen artinya realisasi Persentase Penduduk miskin tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu 31,29 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 6,61 persen.



Keempat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 unit artinya realisasi Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu 13 unit dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 13 unit.

Kelima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.



Keenam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial dengan capaian tahun 2022 sebesar 101,61 persen artinya realisasi Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 98,42 persen.



Ketujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Persentase

PMKS Yang Tertangani dengan capaian tahun 2022 sebesar 81,26 persen artinya realisasi Persentase PMKS Yang Tertangani tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu 57,53 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 70,8 persen.

Kedelapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat dengan capaian tahun 2022 sebesar 109,10 persen artinya realisasi Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 91,66 persen.



Kesembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial dengan capaian tahun 2022 sebesar 117,53 persen artinya realisasi Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu 97,23 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 82,73 persen.

Kesepuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun dengan capaian tahun 2022 sebesar 0 persen artinya realisasi Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu 23,26 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0 persen.

Kesebelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu 0,15 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,15 persen.

Keduabelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek dengan

capaian tahun 2022 sebesar 97,30 persen artinya realisasi Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu 2,69 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 2,76 persen.

Ketigabelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 66,47 persen artinya realisasi Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan tahun 2022 kurang berhasil mencapai target yaitu 1,29 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,94 persen.



Keempatbelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Pemeriksaan Perusahaan dengan capaian tahun 2022 sebesar 291,67 persen artinya realisasi Besaran Pemeriksaan Perusahaan tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu 0,70 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,24 persen.

Kelimabelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan dengan capaian tahun 2022 sebesar 116,67 persen artinya realisasi Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu 0,07 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,06 persen.

Keenambelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan capaian tahun 2022 sebesar 91,43 persen artinya realisasi Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu 0,69 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,75 persen.



Ketujuhbelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Rasio

Lulusan S1/S2/S3 dengan capaian tahun 2022 sebesar 428,55 per 10.000 artinya realisasi Rasio Lulusan S1/S2/S3 tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu 3179 per 10.000 dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 741,80 per 10.000.

Kedelapanbelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Rasio Daya Serap Tenaga Kerja dengan capaian tahun 2022 sebesar 43,21 persen artinya realisasi Rasio Daya Serap Tenaga Kerja tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu 33,85 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 78,34 persen.

Kesembilanbelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu 1,01 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,01 persen.



Keduapuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat dengan capaian tahun 2022 sebesar 212,77 persen artinya realisasi Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu 1,0 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,47 persen.

Keduapuluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) dengan capaian tahun 2022 sebesar 35 buah artinya realisasi Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu 23 buah dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 66 buah.

Keduapuluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) dengan capaian tahun 2022 sebesar 54,322 Rp (Juta) artinya realisasi Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) tahun 2022 kurang berhasil mencapai target yaitu 414,974 Rp (Juta) dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 763,915 Rp (Juta).

Keduapuluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN dengan capaian tahun 2022 sebesar 87 persen artinya realisasi Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu 8,7 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 10 persen.

Keduapuluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah, dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah, tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keduapuluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Buku "Kabupaten Dalam Angka" dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi Buku "Kabupaten Dalam Angka" tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keduapuluh enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Buku "PDRB" dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi Buku "PDRB" tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keduapuluh tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk, dengan capaian tahun 2022 sebesar 1,10 persen artinya realisasi Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk, tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu 0,011 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,0 persen.



Keduapuluh delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Rasio bayi berakta kelahiran dengan capaian tahun 2022 sebesar 0,95 persen artinya realisasi Rasio bayi berakta kelahiran tahun 2022 tidak

berhasil mencapai target yaitu 0,0076 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,8 persen.

Keduapuluh sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Rasio pasangan berakta nikah dengan capaian tahun 2022 sebesar 1,00 persen artinya realisasi Rasio pasangan berakta nikah tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu 0,005 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,5 persen.

Ketigapuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Penerapan KTP Nasional berbasis NIK dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi Penerapan KTP Nasional berbasis NIK tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Ketigapuluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Cakupan penerbitan KTP-el dengan capaian tahun 2022 sebesar 109,55 persen artinya realisasi Cakupan penerbitan KTP-el tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu 109,55 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.



Ketigapuluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Cakupan penerbitan akte kelahiran dengan capaian tahun 2022 sebesar 111,06 persen artinya realisasi Cakupan penerbitan akte kelahiran tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu 88,848 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 80 persen.



Ketigapuluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer dengan capaian tahun 2022 sebesar 0 persen artinya realisasi Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu 0 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 87,0 persen.

Ketigapuluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi dengan capaian tahun 2022 sebesar 0 persen artinya realisasi Cakupan Layanan Telekomunikasi tahun

2022 tidak berhasil mencapai target yaitu 0 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,8 persen.

Ketigapuluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon dengan capaian tahun 2022 sebesar 0 persen artinya realisasi Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu 0 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 83,9 persen.

Ketigapuluh enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet dengan capaian tahun 2022 sebesar 0 persen artinya realisasi Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu 0 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 54,87 persen.

Ketigapuluh tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi melalui indikator Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi dengan capaian tahun 2022 sebesar 0 persen artinya realisasi Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu 0 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 86,90 persen.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi ini adalah sebesar Rp. 5.371.031.535,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 5.005.862.266,00 atau 93.20 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi ini adalah sebanyak 19 program yaitu:

1. Program Rehabilitasi Sosial
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
6. Program Pendaftaran Penduduk
7. Program Pencatatan Sipil
8. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
9. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

10. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
11. Program Aplikasi Informatika
12. Program Penyelenggaraan Statistik sektoral
13. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
14. Program Pelayanan Penanaman Modal
15. Program Penempatan Tenaga Kerja
16. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
17. Program Promosi Penanaman Modal
18. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
19. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

4 Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian

Analisis pencapaian **Sasaran 4**: Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			Notif
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	1	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,76	24,42	107,29	SB
	2	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	1,52	3,81	251,39	SB
	3	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,85	0,146685	3,81	TB
	4	PDRB ADHK	Rp, Miliar	8944,6552	9357,11	104,61	SB
	5	PDRB Perkapita ADHB	Rp, Juta	39,15	38,88	99,31	CB
	6	Ketersediaan Pangan Utama	angka	444,01	100	22,52	TB
	7	Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari)	angka	9.844,21	17.766,98	180,48	SB
	8	Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)	angka	231,77	919,76	396,84	SB
	9	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	%	78,39	70,5484133	90,00	CB
	10	Kontribusi Sektor Pertanian,		25,56	25,48	99,68	CB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
		Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB					
	1	Cakupan bina kelompok tani	%	76,2	40,6527	53,35	KB
	1	Jumlah Populasi Ternak		3202,91	5295,63	130,34	SB
	2	Sapi Potong	Ekor	79	71,801	91,20	CB
		Ayam Ras Pedaging	Ekor	2415	4384,83	181,60	SB
		Ayam Ras Petelur	Ekor	710	839,001	118,23	SB
Rata-rata Capaian						95,98	CB

Dari 12 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, terdapat 7 indikator kinerja mencapai target di atas 100 persen atau sangat berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian, telah berhasil melampaui target yaitu rata-rata 95.98 persen.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi	
			2021	2022
1	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	24,32	24,42
2	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	4,76	3,81
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,15	0,15
4	PDRB ADHK	Rp, Miliar	9013,58	9357,11
5	PDRB Perkapita ADHB	Rp, Juta	15,87	17,23
6	Ketersediaan Pangan Utama	angka	368,95	100
7	Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari)	angka	2.662,51	17.766,98
8	Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)	angka	69,00	919,76
9	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	%	60	70,55
10	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB		26,31	25,48
11	Cakupan bina kelompok tani	%	26,75	40,65
12	Jumlah Populasi Ternak		4948,54	5295,63
	Sapi Potong	Ekor	77,658	71,801
	Ayam Ras Pedaging	Ekor	3,694,02	4,384,83
	Ayam Ras Petelur	Ekor	1,176,858	839,001

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 12 indikator yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian 9 indikator mengalami peningkatan dari tahun lalu dan kondisi awal.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

	Indikator Kinerja	Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian (%)	Notif
1	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,24	24,37	109,58	😊
2	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	18,43	4,29	23,25	😞
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	6	0,15	2,49	😞
4	PDRB ADHK	Rp, Miliar	9353,15	9185,35	98,21	😊
5	PDRB Perkapita ADHB	Rp, Juta	46,75	16,55	35,40	😞
6	Ketersediaan Pangan Utama	angka	528,59	234,48	44,36	😐
7	Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari)	angka	32.489,49	10214,75	31,44	😞
8	Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)	angka	1486,92	494,38	33,25	😞
9	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	%	94,3	65,27	69,22	😐
10	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB		24,18	25,90	107,09	😊
11	Cakupan bina kelompok tani	%	89,08	33,70	37,84	😞
12	Jumlah Populasi Ternak		3467,74	5122,08	147,71	😊
	Sapi Potong	Ekor	80,762	74,73	92,53	😊
	Ayam Ras Pedaging	Ekor	2522,533	4039,43	160,13	😊
	Ayam Ras Petelur	Ekor	864,442	1007,93	116,60	😊

Pada Sasaran strategis 4, Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian, terdapat 12 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 4 indikator sasaran tersebut tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/*on track/on tren*, 2 indikator dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras dan 6 indikator dengan notifikasi merah yang berarti sulit tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Kontribusi Sub Sektor Pertanian

Terhadap PDRB dengan capaian tahun 2022 sebesar 107,29 persen artinya realisasi Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB pada tahun 2022 sangat berhasil dan mencapai target yaitu 24,42 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 22,76 persen.

Kedua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian dengan capaian tahun 2022 sebesar 251,39 persen artinya realisasi Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian pada tahun 2022 sangat berhasil dan mencapai target yaitu 3,81 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,52 persen.



Ketiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian tahun 2022 sebesar 3,81 persen artinya realisasi Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2022 tidak berhasil dan mencapai target yaitu 0,14 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3,85 persen.

Keempat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator PDRB ADHK dengan capaian tahun 2022 sebesar 104,61 Rp, Miliar artinya realisasi PDRB ADHK pada tahun 2022 sangat berhasil dan mencapai target yaitu 9357,11 Rp, Miliar dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 8944,6552 Rp, Miliar.

Kelima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator PDRB Perkapita ADHB dengan capaian tahun 2022 sebesar 44,02 Rp, Juta artinya realisasi PDRB Perkapita ADHB pada tahun 2022 tidak berhasil dan mencapai target yaitu 17,23 Rp, Juta dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 39,15 Rp, Juta.



Keenam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Ketersediaan Pangan Utama dengan capaian tahun 2022 sebesar 22,52 angka artinya realisasi

Ketersediaan Pangan Utama pada tahun 2022 tidak berhasil dan mencapai target yaitu 100 angka dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 444,01 angka.

Ketujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari) dengan capaian tahun 2022 sebesar 180,48 angka artinya realisasi Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari) pada tahun 2022 sangat berhasil dan mencapai target yaitu 17.766,98 angka dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 9.844,21 angka.

Kedelapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari) dengan capaian tahun 2022 sebesar 396,84 angka artinya realisasi Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari) pada tahun 2022 sangat berhasil dan mencapai target yaitu 919,76 angka dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 231,77 angka.



Kesembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) dengan capaian tahun 2022 sebesar 90 persen artinya realisasi Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) pada tahun 2022 cukup berhasil dan mencapai target yaitu 70,54 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 78,39 persen.

Kesepuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB dengan capaian tahun 2022 sebesar 99,68 persen artinya realisasi Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB pada tahun 2022 cukup berhasil dan mencapai target yaitu 25,48 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 25,56 persen.



Kesebelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Cakupan bina kelompok tani dengan capaian tahun 2022 sebesar 53,35 persen artinya realisasi Cakupan bina kelompok tani pada tahun 2022 kurang berhasil dan mencapai target

yaitu 40,65 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 76,20 persen.

Keduabelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian melalui indikator Jumlah Populasi Ternak (sapi potong, ayam ras pedaging, ayam ras petelur) dengan capaian tahun 2022 sebesar 130,34 ekor artinya realisasi Jumlah Populasi Ternak (sapi potong, ayam ras pedaging, ayam ras petelur) pada tahun 2022 sangat berhasil dan mencapai target yaitu 5295,63 ekor dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3202,91 ekor.



e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian ini adalah sebesar Rp. 17.213.356.575,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 14.585.612.949,00 atau 84.73 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian ini adalah sebanyak 10 program yaitu:

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Pengendalian Danpenanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
8. Program Pengawasan Keamanan Pangan
9. Program Penyuluhan Pertanian
10. Program Perizinan Usaha Pertanian

5 Meningkatkan Produksi hasil Perikanan

Analisis pencapaian **Sasaran 5**: Meningkatkan Produksi hasil Perikanan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Sat	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	1	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	5,14	-0,31	-6,03	TB
	2	Kontribusi PDRB sector perikanan	%	12,86	12,57	97,74	CB
	3	Cakupan Produksi perikanan	%	129,0	119,4669	92,61	CB
	4	Perikanan tangkap	ton	56098,1	54911	97,88	CB
	5	Perikanan Budidaya	ton	5176,00	168,04	3,25	TB
	6	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	%	70,60	51,73568	73,28	KB
Rata-rata Capaian						59,79	KB

Dari 6 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 3 indikator kinerja sasaran mencapai target rata-rata di atas 80 persen atau cukup berhasil, 1 indikator kinerja belum mencapai target dan pencapaian di atas 50 sampai 79 persen atau kurang berhasil dan 2 indikator kinerja pencapaian di bawah 50 persen atau tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatkan Produksi hasil Perikanan, kurang berhasil melampaui target yaitu rata-rata 59,79 persen.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi	
			2021	2022
1		2	3	4
1	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	8,78	-0,31
2	Kontribusi PDRB sector perikanan	%	12,9	12,57
3	Cakupan Produksi perikanan	%	15,13667	119,4669
4	Perikanan tangkap	ton	53830	54911
5	Perikanan Budidaya	ton	228,90	168,04
6	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	%	44,59208	51,73568

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 4 indikator yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatkan Produksi hasil Perikanan, dan 2 indikator mengalami penurunan dari tahun lalu.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja		Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian (%)	Notif
1	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	13,52	4,24	31,32	☹️
2	Kontribusi PDRB sector perikanan	%	14,24	12,74	89,43	😊

3	Cakupan Produksi perikanan	%	136	67,30	49,49	☹️
4	Perikanan tangkap	ton	60187,3	54370,50	90,34	😊
5	Perikanan Budidaya	ton	5176,00	198,47	3,83	☹️
6	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	%	75,8	48,16	63,54	☹️

Pada sasaran strategis 5, Meningkatnya Produksi hasil Perikanan, terdapat 6 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 2 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/*on track/on trend*, 2 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi kuning yang berarti butuh kerja keras dan 2 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dicapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan melalui indikator Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan dengan capaian tahun 2022 sebesar -6,03 persen artinya realisasi Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan pada tahun 2022 tidak berhasil dan mencapai target yaitu -0,31 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 5,14 persen.



Kedua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan melalui indikator Kontribusi PDRB sektor perikanan dengan capaian tahun 2022 sebesar 97,74 persen artinya realisasi Kontribusi PDRB sektor perikanan pada tahun 2022 cukup berhasil dan mencapai target yaitu 12,57 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 12,86 persen.

Ketiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan melalui indikator Cakupan Produksi perikanan dengan capaian tahun 2022 sebesar 92,61 persen artinya realisasi Cakupan Produksi perikanan pada tahun 2022 cukup berhasil dan mencapai target yaitu 119,46 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 129,0 persen.



Keempat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produksi hasil Perikanan melalui indikator Perikanan tangkap dengan capaian tahun 2022 sebesar 97,88 ton artinya realisasi Perikanan tangkap pada tahun 2022 cukup berhasil dan mencapai target yaitu 54911 ton

dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 56098,1 ton.

Kelima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Produksi hasil Perikanan melalui indikator Perikanan Budidaya dengan capaian tahun 2022 sebesar 3,25 ton artinya realisasi Perikanan Budidaya pada tahun 2022 tidak berhasil dan mencapai target yaitu 168,04 ton dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 5176 ton.



Keenam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Produksi hasil Perikanan melalui indikator Cakupan Bina Kelompok Perikanan dengan capaian tahun 2022 sebesar 73,28 persen artinya realisasi Cakupan Bina Kelompok Perikanan pada tahun 2022 kurang berhasil dan mencapai target yaitu 51,73 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 70,60 persen.



e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Produksi hasil Perikanan ini adalah sebesar Rp. 8.822.443.178,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 7.304.711.338,00 atau 82.80 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Produksi hasil Perikanan ini adalah sebanyak 3 program yaitu:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

6 Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Analisis pencapaian **Sasaran 6** : Meningkatkan Meningkatkan Kualitas Pendidikan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			Notif
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,11	70,34	100,33	SB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022				
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif	
2	Indeks Pendidikan		Angka	64,06	63,98	99,88	CB	
	3	Angka Partisipasi Kasar (APK)			98,92	94,47	96,18	CB
		SD		%	114,2	100,9	88,39	CB
		SMP		%	94,9	92,03	97,02	CB
		SMA		%	87,738	90,48	103,13	SB
	4	Angka Partisipasi Murni (APM)			83,12	88,53	107,80	SB
		SD		%	98,67	98,5	99,83	CB
		SMP		%	84,47	88,09	104,29	SB
		SMA		%	66,23	79	119,27	SB
	5	Angka Partisipasi Sekolah (APS)			88,91	85,47	96,69	CB
		7-12 Tahun		%	98,87	94,45	95,53	CB
		14-15 Tahun		%	92,27	82,42	89,33	CB
		16-18 Tahun		%	75,58	79,53	105,22	SB
	6	Angka Putus Sekolah			0,05	1,58	475,46	SB
SD		%	0	0,95	0,00	TB		
SMP		%	0	1,79	0,00	TB		
SMA		%	0,14	2	1426,39	SB		
7	Angka Kelulusan			100,00	97,95	97,95	CB	
	SD		%	100	95,76	95,76	CB	
	SMP		%	100	98,68	98,68	CB	
	SMA		%	100	99,42	99,42	CB	
8	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv		%	100	85,15	85,15	CB	
	9	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar		rasio	1:9	01.13	105,80	SB
10		Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah		rasio	1:8	01.09	101,47	SB
	11	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas		%	91,57	92,26	100,76	SB
12		Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya			3,00	2	66,67	KB
	13	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan		buah	58,00	78	134,48	SB
14		Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu			2	2	100,00	B

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
	15	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		38,52	6,34	16,46	TB
	16	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah		43,898	31,40	71,54	KB
	17	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		1,428	1,61	112,75	SB
	18	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	63.322,04	27884	44,04	TB
	19	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	11703,80	15933	136,14	SB
	20	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	%	57,21	30,47	53,26	KB
	21	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	100,00	100,00	100,00	B
	22	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	1,24	0,07	5,56	TB
Rata-rata Capaian						133,26	SB

Dari 22 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 8 indikator kinerja mencapai target di atas 50 persen atau sangat berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan, dengan predikat sangat Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 133,26 persen.

b. perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi	
			2021	2022
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,62	70,34
2	Indeks Pendidikan	Angka	63,32	63,98
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)		91,49	94,47
	SD	%	106,38	100,9
	SMP	%	81,88	92,03
	SMA	%	86,20	90,48
4	Angka Partisipasi Murni (APM)		77,25	88,53

	SD	%	98,06	98,5
	SMP	%	74,01	88,09
	SMA	%	59,69	79
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS)		87,76	85,47
	7-12 Tahun	%	106,38	94,45
	14-15 Tahun	%	81,88	82,42
	16-18 Tahun	%	75,03	79,53
6	Angka Putus Sekolah		0,65	0,11
	SD	%	0,78	0,057
	SMP	%	1,17	0,15
	SMA	%	0	0,13
7	Angka Kelulusan		100,00	97,95
	SD	%	100	95,76
	SMP	%	100	98,68
	SMA	%	100	99,42
8	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv	%	90,68	85,15
9	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	rasio	01:13	01:13
10	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	rasio	01:11	01:09
11	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas	%	89,9	92,26
12	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya		1	2
13	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	buah	58	78
14	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu		2	2
15	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		7,89	6,34
16	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah		18,52	31,40
17	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		0,01	1,61
18	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	3107,00	27884
19	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	10727,00	15933
20	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	%	25,01	30,47
21	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	100,00	100,00
22	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	0,09	0,07

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 8 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya Kualitas Pendidikan dalam mendorong kualitas pendidikan mengalami penurunan dari tahun lalu dan kondisi awal (2021).

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

	Indikator Kinerja	Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian (%)	Notifikasi
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,17	69,98	96,97	

	Indikator Kinerja	Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian (%)	Notifikasi
2	Indeks Pendidikan	Angka	68,42	63,65	93,03	😊
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	104,09	92,98	89,33	😊
	SD	%	115,47	103,64	89,75	😊
	SMP	%	104,00	86,96	83,61	😊
	SMA	%	92,79	88,34	95,21	😊
4	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	83,67	82,89	99,07	😊
	SD	%	98,73	98,28	99,54	😊
	SMP	%	85,77	81,05	94,49	😊
	SMA	%	66,51	69,35	104,26	😊
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	89,18	86,61	97,12	😊
	7-12 Tahun	%	98,86	100,41	101,57	😊
	14-15 Tahun	%	92,19	82,15	89,11	😊
	16-18 Tahun	%	76,50	77,28	101,02	😊
6	Angka Putus Sekolah	%	0,04	1,12	2571,72	😊
	SD	%	0	0,87	0,00	😞
	SMP	%	0	1,48	0,00	😞
	SMA	%	0,13013738	1,00	768,42	😊
7	Angka Kelulusan	%	100,00	98,98	98,98	😊
	SD	%	100	97,88	97,88	😊
	SMP	%	100	99,34	99,34	😊
	SMA	%	100	99,71	99,71	😊
8	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv	%	100	87,92	87,92	😊
9	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	rasio	1:5	0,05	112,31	😊
10	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	rasio	1:6	0,05	106,06	😊
11	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas	%	91,4438102	91,08	99,60	😊
12	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	seni	3	1,50	50,00	😊
13	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	buah	61	68,00	111,48	😊
14	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	buah	2	2,00	100,00	😊
15	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	25,48	7,12	27,93	😞

	Indikator Kinerja	Sat	Target Tahun 2026 (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Capaian (%)	Notifikasi
16	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	Buku	51,82	24,96	48,18	☹️
17	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	%	3,28	0,81	24,73	☹️
18	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	96069,05	15495,50	16,13	☹️
19	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	14039,80	13330,00	94,94	😊
20	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	%	92,25	27,74	30,07	☹️
21	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	100,00	100,00	100,00	😊
22	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	2,18	0,08	3,71	☹️

Pada Sasaran strategis 6, Meningkatnya Kualitas Pendidikan, terdapat 22 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 15 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/on track/on trend, dan 2 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 5 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2022 sebesar 96,97 persen atau realisasi Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 70,34 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 70,11 persen.

Kedua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Indeks pendidikan pada tahun 2022 sebesar 93,03 persen atau realisasi Indeks pendidikan pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 63,98 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 64,06 persen.

Ketiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2022 sebesar 89,33 persen atau realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 94,47 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 98,92 persen

Keempat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2022 sebesar 99,07 persen atau realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 88,53 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 83,12 persen

Kelima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2022 sebesar 97,12 persen atau realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 85,47 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 88,91 persen.

Keenam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Angka Putus Sekolah pada tahun 2022 sebesar 880,04 persen atau realisasi Angka Putus Sekolah pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,11 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,12 persen.

Ketujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Angka Kelulusan pada tahun 2022 sebesar 98,98 persen atau realisasi Angka Kelulusan pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 97,95 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen.

Kedelapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv pada tahun 2022 sebesar 87,92 persen atau realisasi Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 85,15 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Kesembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar pada tahun 2022 sebesar 112,31 persen atau realisasi Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 01:13 rasio dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1:9 rasio.

Kesepuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah pada tahun 2022 sebesar 106,06 persen atau realisasi Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 01:09 rasio dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1:8 rasio.

Kesebelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas pada tahun 2022 sebesar 99,60 persen atau realisasi Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar

92,26 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 91,57 persen.

Kedua Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya pada tahun 2022 sebesar 50,00 persen atau realisasi Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 2 festival dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3,00 festival.



Ketiga Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan pada tahun 2022 sebesar 111,48 persen atau realisasi Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 78 buah dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 58,00 buah.

Keempat Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu pada tahun 2022 sebesar 100,00 persen atau realisasi Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 2 buah dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 2 buah

Kelima Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun pada tahun 2022 sebesar 27,93 persen atau realisasi Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun pada tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 6,34 buah dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 38,52 buah

Keenam Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah pada tahun 2022 sebesar 86,90 persen atau realisasi Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 71,54 buku dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 43,898 buku

Ketujuh Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk pada tahun 2022 sebesar 24,73 persen atau realisasi Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk pada tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 1,61 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,428 persen

Kedelapan Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan per

Tahun pada tahun 2022 sebesar 16,13 persen atau realisasi Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun pada tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 27884 orang dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 63.322,04 orang

Kesembilan Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan pada tahun 2022 sebesar 94,94 persen atau realisasi Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 15933 judul dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 11703,80 judul.

Kedua Puluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat pada tahun 2022 sebesar 42,43 persen atau realisasi Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 53,26 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 57,21 persen

Kedua Puluh Satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan pada tahun 2022 sebesar 100,00 persen atau realisasi Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen

Kedua Puluh Dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku pada tahun 2022 sebesar 129,38 persen atau realisasi Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 5,56 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,24 persen

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan ini adalah sebesar Rp. 89.763.414.347,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 80.466.949.406,00 atau 89.64 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan ini adalah sebanyak 7 program yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengembangan Kebudayaan
4. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
6. Program Pembinaan Perpustakaan

7. Program Pengelolaan Arsip

7 Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Analisis pencapaian **Sasaran 7**: Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian	Notif
Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1	Indeks Kesehatan	Angka	74,94	74,63	99,59	CB
	2	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,71	68,51	99,71	CB
	3	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup	Angka	5	0,009	199,8	SB
	4	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup	Angka	10	2	20	TB
	5	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup	Angka	3	0	199,7	SB
	6	Angka Kematian Ibu	Angka	52	264	504	SB
	7	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	%	27	85	315	SB
	8	Rasio Puskesmas Dan Pustu	%	0,19	2	916	SB
	9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	%	0,002	0,002	100	B
	10	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk	%	0,04	0,03	82	CB
	11	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	%	0,09	0,17	183	SB
	12	Rasio Tenaga Medis/Penduduk	%	0,23	0,33	140	SB
	13	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	85	84	98	CB
	14	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child	%	100	90	90	CB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian	Notif
		Immunization (UCI)					
	15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	100	B
	16	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta	%	44	50	113	SB
	17	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis	Per 1000 Penduduk	101	2	198,4	SB
	18	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	3	0	199,9	SB
	19	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	B
	20	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 Penduduk	1	0	197,1	SB
	21	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	%	0	0	52,3	KB
	22	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	8	0	0	TB
	23	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	74	83	112	SB
	24	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	53	72	138	SB
	25	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	%	86	0	0	TB
Rata-rata Capaian						170,34	SB

Dari 25 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 13 indikator kinerja mencapai target di atas 100 persen atau Sangat berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Akses dan mutu

Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan predikat sangat Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 170,34 persen.

b. perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi	
			2021	2022
1	Indeks Kesehatan	Angka	74	74,63
2	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,1	68,51
3	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup	Angka	0	0,009
4	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup	Angka	8	2
5	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup	Angka	7	0
6	Angka Kematian Ibu	Angka	146	264
7	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	%	23	85
8	Rasio Puskesmas Dan Pustu	%	0,19	2
9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	%	0,01	0,002
10	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk	%	0,04	0,03
11	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	%	0,14	0,17
12	Rasio Tenaga Medis/Penduduk	%	0,26	0,33
13	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	74	84
14	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	64	90
15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100
16	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta	%	34	50
17	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	121	2
18	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	6	0
19	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100
20	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 Penduduk	0	0
21	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	%	0	0
22	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	2	0
23	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	40	83
24	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	39	72
25	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	%	49	0

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 6 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat mengalami penurunan dari tahun lalu dan kondisi awal (2021).

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2022	Capaian	Notif
1	Indeks Kesehatan	Angka	77,99	74,32	95,29	😊
2	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,69	68,31	96,63	😊
3	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup	Angka	3	0,15	4,67	😞
4	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup	Angka	10	4,75	48,56	😐
5	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup	Angka	0	3,65	0,00	😞
6	Angka Kematian Ibu	Angka	30	204,80	686,15	😊
7	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	%	38	54,43	142,23	😊
8	Rasio Puskesmas Dan Pustu	%	0,19	0,97	507,89	😊
9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	%	0,00	0,00	175,00	😊
10	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk	%	0,04	0,04	91,13	😊
11	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	%	0,10	0,16	160,97	😊
12	Rasio Tenaga Medis/Penduduk	%	0,27	0,29	109,80	😊
13	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	90	78,93	87,67	😊
14	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	77,21	77,21	😊
15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100,00	100,00	😊
16	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta	%	33	41,79	127,80	😊
17	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	71	61,40	86,11	😊
18	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	1	3,24	589,36	😊
19	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100,00	100,00	😊
20	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 Penduduk	0	0,03	0,00	😞
21	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	%	0	0,01	0,00	😞
22	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	19	1,16	6,00	😞
23	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	72	61,49	85,09	😊

Indikator Kinerja		Satuan	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2022	Capaian	Notif
24	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	45	55,93	123,95	😊
25	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	%	98	24,70	25,17	😞

Pada Sasaran strategis 7, Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat, terdapat 25 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 18 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/on track/on trend, dan 1 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 6 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kesatu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Indeks Kesehatan pada tahun 2022 sebesar 99,59 persen atau realisasi Indeks Kesehatan pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 74,63 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 74,94 persen.



Kedua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Usia Harapan Hidup pada tahun 2022 sebesar 99,71 persen atau realisasi Usia Harapan Hidup pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 68,51 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 68,71 persen.

Ketiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup pada tahun 2022 sebesar 0,17 persen atau realisasi Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup pada tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,009 angka dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 5 angka.

Keempat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup pada tahun 2022 sebesar 20 persen atau realisasi Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup pada tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 2 angka dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 10 angka.

Kelima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup pada tahun 2022 sebesar 69 persen atau realisasi Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup pada tahun 2022 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 2 angka dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3 angka

Keenam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Angka Kematian Ibu pada tahun 2022 sebesar 504 persen atau realisasi Angka Kematian Ibu pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 264 jiwa dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 52 jiwa.

Ketujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Rasio Posyandu Per Satuan Balita pada tahun 2022 sebesar 315 persen atau realisasi Rasio Posyandu Per Satuan Balita pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 85 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 27 persen.

Kedelapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Rasio Puskesmas Dan Pustu pada tahun 2022 sebesar 916 persen atau realisasi Rasio Puskesmas Dan Pustu pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 2 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,19 persen



Kesembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,002 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,002 persen

Kesepuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk pada tahun 2022 sebesar 82 persen atau realisasi Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,03 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,04 persen.

Kesebelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Rasio Dokter Per Satuan Penduduk pada tahun 2022 sebesar 183 persen atau realisasi Rasio Dokter Per Satuan Penduduk pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,17 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,09 persen.



Kedua Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Rasio Tenaga Medis/Penduduk pada tahun 2022 sebesar 140 persen atau realisasi Rasio Tenaga Medis/Penduduk pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,33 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,23 persen.

Ketiga Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator "Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan pada tahun 2022 sebesar 98 persen atau realisasi "Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 84 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 85 persen.

Keempat Belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2022 sebesar 90 persen atau realisasi Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 90 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Kelima belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan pada tahun 2022 berhasil dan mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keenam belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta dengan capaian tahun 2022 sebesar 113 persen artinya realisasi Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta pada tahun 2022 sangat berhasil dan mencapai target yaitu 50 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 44 persen.

Ketujuh belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Tingkat Prevalensi Tuberkulosis dengan capaian tahun 2022 sebesar 198,4 per 1000 penduduk/jiwa artinya realisasi Tingkat Prevalensi Tuberkulosis pada tahun 2022 sangat berhasil dan mencapai target yaitu 2 per 1000 penduduk/jiwa dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 101 per 1000 penduduk/jiwa.

Kedelapan belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis dengan capaian tahun 2022 sebesar 199,9 per 1000 penduduk/jiwa artinya realisasi Tingkat Kematian Karena

Tuberkulosis pada tahun 2022 sangat berhasil dan mencapai target yaitu 0,003 per 1000 penduduk/jiwa dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3 per 1000 penduduk/jiwa.

Kesembilan belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD dengan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen artinya realisasi Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD pada tahun 2022 berhasil dan mencapai target yaitu 100 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Keduapuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Angka Kejadian Malaria dengan capaian tahun 2022 sebesar 197,1 per 1000 penduduk/jiwa artinya realisasi Angka Kejadian Malaria pada tahun 2022 sangat berhasil dan mencapai target yaitu 0,043 per 1000 penduduk/jiwa dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,46 per 1000 penduduk/jiwa.

Keduapuluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi dengan capaian tahun 2022 sebesar 52,3 persen artinya realisasi Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi pada tahun 2022 kurang berhasil dan mencapai target yaitu 0,013 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,0088 persen.

Keduapuluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin dengan capaian tahun 2022 sebesar 0 persen artinya realisasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin pada tahun 2022 tidak berhasil dan mencapai target yaitu 0 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 8 persen.

Keduapuluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 dengan capaian tahun 2022 sebesar 112 persen artinya realisasi Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 pada tahun 2022 sangat berhasil dan mencapai target yaitu 83 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 74 persen.



Keduapuluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga

Miskin dengan capaian tahun 2022 sebesar 138 persen artinya realisasi Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin pada tahun 2022 sangat berhasil dan mencapai target yaitu 72 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 53 persen.

Keduapuluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui indikator Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin dengan capaian tahun 2022 sebesar 0 persen artinya realisasi Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin pada tahun 2022 tidak berhasil dan mencapai target yaitu 0 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 86 persen.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah sebesar Rp. 216.458.968.101,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 173.651.795.166,70 atau 80.22 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat ini adalah sebanyak 5 program yaitu:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Makanan Minuman
4. Program Penunjang Urusanpemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

8 Meningkatkan daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara

Analisis pencapaian Sasaran 8: Meningkatkan daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat Uan	Tahun 2022			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NOT
8 Meningkatkan daya tarik destinasi wisata	1 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	2,88	4,47	155,21	SB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat Uan	Tahun 2022				
			TARGET	REAL ISASI	CAP AIAN	NOT	
domestik dan mancanegara	2	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	5,37	22,48	418,62	SB
	3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	373.095	682.777	183	SB
	4	Lama Kunjungan Wisata	Hari	4	4	100	B
	5	PAD Sektor Pariwisata	%	5	4	83	CB
RATA RATA CAPAIAN						137.47	SB

Dari 5 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 0 indikator kinerja mencapai target di bawah 50 persen atau tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah, dengan predikat Cukup Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 137.47 persen.

b. perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 7 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun lalu dan kondisi awal (2022).

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
		2021	2022	
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	3,41	4,47
2	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	5,88	22,48
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	423.605	682.777
4	Lama Kunjungan Wisata	Hari	4	4
5	PAD Sektor Pariwisata	%	4	4

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja	Satuan	Target (Kondisi Akhir Rpjmd)	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2022	Capaian	Not	
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	3,79	3,94	103,96	😊

Indikator Kinerja		Satuan	Target (Kondisi Akhir Rpjmd)	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2022	Capaian	Not
2	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	7,86	14,18	180,41	😊
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	488.084	553.191	113	😊
4	Lama Kunjungan Wisata	Hari	4	4,00	100,00	😊
5	PAD Sektor Pariwisata	%	8	4,18	53,21	😞

Pada Sasaran strategis 8, Meningkatnya daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara , terdapat 5 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 4 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/on track/on trend, dan 1 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 0 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Indeks Daya saing infrastruktur pada tahun 2022 sebesar 155,21 persen atau Indeks Daya saing infrastruktur pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 4,47 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 2,88 persen.



Dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata pada tahun 2022 sebesar angka 418,62 atau realisasi Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar angka 22,48 dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu angka 5,37.



Tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara pada tahun 2022 sebesar 183 persen atau realisasi Indeks Daya saing infrastruktur pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 682.777 orang dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 373.095 orang.



Empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Lama Kunjungan Wisata pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Indeks Daya saing infrastruktur pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 4 hari dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 4 hari .

Lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator PAD Sektor Pariwisata pada tahun 2022 sebesar 83 persen atau Indeks Daya saing infrastruktur pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 4 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 5 persen.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, perindustrian, UMKM dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp 3.897.462.130 terealisasi sebesar Rp 3.040.566.740 atau 78,01 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) ini adalah sebanyak 3 program yaitu:

1. Program Peningkatan daya tarik destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Penembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif

9 Meningkatnya pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah

Analisis pencapaian Sasaran 9: Meningkatnya pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah , dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022				
			Target	Realisasi	Capaian	Notif	
9 Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	1	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	88	89	101	SB
	2	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,64	1	139	SB
	3	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	%	0,003	0,003	93	CB
	4	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	%	98,93	98,97	100,04	SB
	5	Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	80,79	81,16	100,46	SB
	6	Rasio Jaringan Irigasi	%	0,21	0,49	233,33	SB
	7	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,25	0,44	179	SB
	8	Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	71,57	58,83	82,21	CB
	9	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	11,61	9,41	81,09	CB
	10	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	93,76	92,54	98,70	CB
	11	Persentase Rumah Tinggal Bersantiasi	%	83,34	64,60	77,51	KB
	12	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	84,89	85,48	100,69	SB
	13	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,00	12,02	0,00	TB
	14	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	%	8,67	0,42	4,87	TB
	15	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	26,67	25,74	96,52533	CB
	16	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	68,95	20,00	29,01	TB
	17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	62,91	60,31	95,86	CB
	18	Penurunan Emisi GRK	Gg CO2-Eq	462952,25	462952,25	100,00	SB
	19	Indeks Kualitas Air	Poin	58,85	55,00	93,46	CB
	20	Indeks Kualitas Udara	Poin	84,74	92,13	108,72	SB
	21	Indeks Kualitas Tutup Lahan	Poin	29,53	28,89	97,83	CB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022				
			Target	Realisasi	Capaian	Notif	
	22	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	%	100,00	100,00	100,00	B
	23	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	%	1	1	100,00	B
	24	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	Kelompok	1	1	100,00	B
	25	Penetapan Hak MHA	Kelompok	1	1	100,00	B
	26	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Kelompok	100	100	100,00	B
	27	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	Kelompok	100	100	100,00	B
	28	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	Kelompok	1	1	100,00	B
	29	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Kelompok	100	100	100,00	B
	30	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,	sekolah	100	100	100,00	B
	31	Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	27,22	26,03	95,63	CB
	32	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	94,88	73,13	77,08	KB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022				
			Target	Realisasi	Capaian	Notif	
	33	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	%	25,20	74,00	293,62	SB
	34	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	Ton/Kg	38,36	35,00	91,24	CB
	35	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	1,00	1	100,00	B
	36	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	32,00	30	93,32	CB
	37	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	Dok	34,64	32,36	93,40	CB
	38	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	1	0,00	0,00	0,00	TB
	39	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3,00	3	100,00	B
	40	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Unit	14099,6	9125,0	64,7	KB
	41	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	1,23	1,15	93,65	CB
	42	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	%	92,40	98,67178 21	107	SB
	43	Pemasangan Rambu-Rambu	%	66,01	0	0	TB
	44	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	Oran g/Bar ang	26480	39949	151	SB
	45	Rasio Ijin Trayek	%	0,01	0,0005	6,68	TB
Rata Rata Capaian						92.36	CB

Dari 44 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 6 indikator kinerja mencapai target di bawah 50 persen atau tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah, dengan predikat Cukup Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 92.36 persen.

b. perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 7 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun lalu dan kondisi awal (2021).

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi	
			2021	2022
1	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	87	89
2	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,46	1
3	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	%	0,003	0,003
4	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	%	0,00	98,97
5	Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	82,91	81,16
6	Rasio Jaringan Irigasi	%	0,93	0,49
7	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,24	0,44
8	Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	65,44	58,83
9	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	11,56	9,41
10	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	92,42	92,54
11	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	76,35	64,60
12	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	84,26	85,48
13	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	11,08	12,02
14	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	%	6,02	0,42
15	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	25,74	25,74
16	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	75,00	20,00
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63,22	60,31
18	Penurunan Emisi GRK	Gg CO2-Eq	46388 0,00	462952 ,25
19	Indeks Kualitas Air	Poin	61,00	55,00
20	Indeks Kualitas Udara	Poin	84,64	92,13
21	Indeks Kualitas Tutup Lahan	Poin	23,56	28,89
22	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	%	95,93	100,00
23	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	%	1	1
24	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	klp	1	1
25	Penetapan Hak MHA	klp	1	1
26	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	klp	100	100
27	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	klp	100	100
28	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	klp	1	1

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi	
			2021	2022
29	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	klp	2	100
30	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,	sekolah	100	100
31	Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	24,95	26,03
32	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	86,63	73,13
33	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	%	26,24	74,00
34	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	Ton/Kg	35,00	35,00
35	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	1	1
36	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	30	30
37	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	Dok	32,36	32,36
38	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	1	0,00	0,00
39	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3	3
40	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Unit	17500 ,0	9125,0
41	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0,35	1,15
42	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	%	0	98,67
43	Pemasangan Rambu-Rambu	%	0	0
44	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	Orang/Barang	12000	39949
45	Rasio Ijin Trayek	%	0,000 1	0,0005

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja	Satuan	Target (Kondisi Akhir Rpjmd)	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2022	Capaian	Not	
1	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	95	88,00	92,63	😊
2	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	1	0,68	67,64	😐
3	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	%	0	0,00	108,19	😊
4	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	%	100	49,49	49,49	😐
5	Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	84,43	82,04	97,16	😊
6	Rasio Jaringan Irigasi	%	0,19	0,71	373,68	😊

	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Kondisi Akhir Rpjmd)	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2022	Capaian	Not
7	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,25	0,34	134,74	😊
8	Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	83	62,14	74,73	😊
9	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	13	10,49	78,00	😊
10	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	95	92,48	97,50	😊
11	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	88	70,48	80,02	😊
12	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	85	84,87	99,72	😊
13	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0	11,55	0,00	😞
14	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	%	87	3,22	3,71	😞
15	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	32,9232	25,74	78,19	😊
16	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100,00	47,50	47,50	😐
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,08	61,77	94,91	😊
18	Penurunan Emisi GRK	Gg CO2 -Eq	459.259,72	463416,13	100,91	😊
19	Indeks Kualitas Air	Poin	59,25	58,00	97,89	😊
20	Indeks Kualitas Udara	Poin	85,14	88,39	103,81	😊
21	Indeks Kualitas Tutup Lahan	Poin	37,97	26,23	0,00	😞
22	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	%	100	97,97	97,97	😊
23	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	%	1	1,00	100,00	😊
24	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	Kelompok	1	1,00	100,00	😊
25	Penetapan Hak MHA	Kelompok	1	1,00	100,00	😊
26	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Kelompok	100	100,00	100,00	😊
27	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	Kelompok	100	100,00	100,00	😊

	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Kondisi Akhir Rpjmd)	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2022	Capaian	Not
28	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	Kelompok	1	1,00	100,00	😊
29	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Kelompok	100	51,00	51,00	😐
30	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,	sekolah	100	100,00	100,00	😊
31	Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	33,87	25,49	75,26	😊
32	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	100,00	79,88	79,88	😊
33	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	%	22,16	50,12	226,13	😊
34	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	Ton/Kg	48,23	35,00	72,58	😊
35	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	2	1,00	50,00	😐
36	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	38	29,86	78,02	😊
37	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	Dok	41,34	32,36	0,00	😞
38	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	1	0,00	0,00	0,00	😞
39	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3	3,00	100,00	😊
40	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Unit	10075,1	13312,50	132,13	😊
41	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	1,03	0,75	73,05	😊
42	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	%	100	49,34	49,34	😐
43	Pemasangan Rambu-Rambu	%	76,08	0,00	0,00	😞
44	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	Orang/Barang	30437	25974,63	85,34	😊
45	Rasio Ijin Trayek	%	0,02	0,00	1,98	😞

Pada Sasaran strategis 9, Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah , terdapat 44 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 32 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/on track/on trend, dan 6 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 6 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Indeks Daya saing infrastruktur pada tahun 2022 sebesar angka 101 atau Indeks Daya saing infrastruktur pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar angka 89 dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu angka 88.

Dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik pada tahun 2022 sebesar 139 persen atau realisasi Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,89 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,64 persen.



Tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk pada tahun 2022 sebesar 93 persen atau realisasi Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,0030 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,0032 persen.

Empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) pada tahun 2022 sebesar 100,04 persen atau realisasi Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 98,97 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 98,93 persen.



Lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2022 sebesar 100,46 persen atau realisasi Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 81,16 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 80,79 persen.

Enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Rasio Jaringan Irigasi pada tahun 2022 sebesar 233,33 persen atau realisasi Rasio Jaringan Irigasi pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,49 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,21 persen.



Tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2022 sebesar 179 persen atau realisasi Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,44 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,25 persen.

Delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Pemukiman Yang Tertata pada tahun 2022 sebesar 82,21 persen atau realisasi Persentase Pemukiman Yang Tertata pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 58,83 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 71,57 persen.

Sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2022 sebesar 81,09 persen atau realisasi Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 9,41 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 11,61 persen.

Sepuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkaupada tahun 2022 sebesar 98,70 persen atau realisasi Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 92,54 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 93,76 persen.

Sebelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi tahun 2022 sebesar 77,51 persen atau realisasi Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi pada tahun 2022 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 64,60 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 83,34 persen.



Dua belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum pada tahun 2022 sebesar 100,69 persen atau realisasi Persentase Penduduk Berakses Air Minum pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 85,48 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 84,89 persen.

Tiga belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Areal Kawasan Kumuh pada tahun 2022 sebesar 0 persen atau realisasi Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau pada tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 0 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0 persen.

Empat belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan pada tahun 2022 sebesar 4,87 persen atau realisasi Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan Yang Terjangkau pada tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,42 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 8,67 persen.

Lima belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Luas Lahan Bersertifikat pada tahun 2022 sebesar 96,53 persen atau realisasi Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 25,74 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 26,67 persen.



Enam belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Penyelesaian Kasus Tanah Negara pada tahun 2022 sebesar 29,01 persen atau realisasi Penyelesaian Kasus Tanah Negara pada tahun 2022 tidak

berhasil mencapai target yaitu sebesar 20,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 68,95 persen.

Tujuh belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 sebesar 95,86 persen atau realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 60,31 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 62,91 persen.

Delapan belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah Penurunan Emisi GRK pada tahun 2022 sebesar 100,00 persen atau realisasi Penurunan Emisi GRK pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 462.952,25 Gg CO₂-Eq dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 462952,25 Gg CO₂-Eq.

Sembilan belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Indeks Kualitas Air pada tahun 2022 sebesar 93,46 poin atau Indeks Kualitas Air pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 55.00 poin persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 58.85 poin.

Dua puluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 sebesar 95,86 persen atau realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 60,31 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 62,91 persen.

Dua puluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Indeks Kualitas Udara pada tahun 2022 sebesar 108,72 persen atau realisasi Indeks Kualitas Udara pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 92,13 Poin dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 84,74 Poin.

Dua puluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota pada tahun 2022 sebesar 100,00 persen atau realisasi Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 100,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen.

Dua puluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Terasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Terasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 1 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1 persen.

Dua puluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 1 klp dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1 klp.

Dua puluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Penetapan Hak MHA pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Penetapan Hak MHA pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 1 klp dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1 klp.

Dua puluh enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Terasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Terasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 klp dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 klp.

Dua puluh tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Terasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Terasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 klp dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 klp.

Dua puluh delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 1 klp dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1 klp.

Dua puluh sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 klp dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 klp.



Tiga puluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 sekolah dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 sekolah.

Tiga puluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Timbulan Sampah Yang Ditangani pada tahun 2022 sebesar 95,63 persen atau realisasi Timbulan Sampah Yang Ditangani pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 26,03 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 27,22 persen.

Tiga puluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani pada tahun 2022 sebesar 77,08 persen atau realisasi Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani pada tahun 2022 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 73,13 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 94,88 persen.



Tiga puluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota pada tahun 2022 sebesar 293,62 persen atau realisasi Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu



sebesar 74,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 25,20 persen.

Tiga puluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri) pada tahun 2022 sebesar 91,24 persen atau realisasi Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri) pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 35,00 Ton/Kg dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 38,36 Ton/Kg.

Tiga puluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001 pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001 pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 1 buah dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1 buah.

Tiga puluh enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan pada tahun 2022 sebesar 93,32 persen atau realisasi Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 30 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 32 persen.

Tiga puluh tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan pada tahun 2022 sebesar 93,40 persen atau realisasi Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 32 dokumen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 35 dokumen.

Tiga puluh delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati pada tahun 2022 sebesar 0 persen atau realisasi Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 0 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0 persen.

Tiga puluh sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 3 unit dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3 unit.



Empat puluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Jumlah arus penumpang angkutan Umum pada tahun 2022 sebesar 64,7 persen atau realisasi Jumlah arus penumpang angkutan Umum pada tahun 2022 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 9125,0 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 14099,6 persen.



Empat puluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Layanan Angkutan Darat pada tahun 2022 sebesar 93,65 persen atau realisasi Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 1,15 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,23 persen.

Empat puluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum pada tahun 2022 sebesar 107 persen atau realisasi Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 98,67 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 92,40 persen.

Empat puluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Pemasangan Rambu-Rambu pada tahun 2022 sebesar 0 persen atau realisasi Pemasangan Rambu-Rambu pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 0 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 66.01persen.

Empat puluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum pada tahun 2022 sebesar 151 persen atau realisasi Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 39949

Orang/Barang dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 26480 Orang/Barang.

Empat puluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui indikator Rasio Ijin Trayek pada tahun 2022 sebesar 6,68 persen atau realisasi Rasio Ijin Trayek pada tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,0005 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,01 persen.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, perindustrian, UMKM dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp230.303.584.979,00 terealisasi sebesar Rp195.393.097.745,00 atau 84,84 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) ini adalah sebanyak 15 program yaitu:

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan sistem Air Limbah
2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
3. Program Penyelenggaraan Penataan ruang
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Program Penyelenggaraan Jalan
6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
8. Program Kawasan Permukiman
9. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
10. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
11. Program Pengembangan Perumahan
12. Program Penataan Bangunan Gedung
13. Program Pengelolaan Persampahan
14. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
15. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
16. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau kerusakan Lingkungan Hidup
17. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan beracun (Limbah B3)
18. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)

19. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat
20. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup
21. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya
22. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)

10 Meningkatkan Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas)

Analisis pencapaian Sasaran 10: Meningkatkan perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi , dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2022				
			Tar Get	Real Isasi	Cap Aian	Notif	
10 Meningkatkan perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	1	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	24	12	48,30	TB
	2	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	11	7	60,29	KB
	3	Persentase koperasi aktif	%	74,73	67,80	90,72	CB
	4	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	98,43	97,99	99,55	CB
	5	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0,72	0,28	38,89	TB
	6	Jumlah Pasar	Unit	43	40,00	93,02	CB
	7	Cakupan bina klppengrajin	%	0,168	0,56	333,33	SB
Rata Rata Capaian						102.26	SB

Dari 10 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 2 indikator kinerja mencapai target di bawah 50 persen atau tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatkan perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi , dengan predikat Sangat Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 102.26 persen.

b. perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 7 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun lalu dan kondisi awal (2021).

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	REALISASI	
			2021	2022
1	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	23	12
2	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	12	7
3	Persentase koperasi aktif	%	70,28	67,80
4	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	97,99	97,99
5	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0,85	0,28
6	Jumlah Pasar	Unit	43	40,00
7	Cakupan bina klppengrajin	%	0,13	0,56

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Kondisi Akhir Rpjmd)	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2022	Capaian	Not
1	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	26	17,61	66,89	☹️
2	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	10	9,46	92,33	😊
3	Persentase koperasi aktif	%	76,34	69,04	90,43	😊
4	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	99,85	97,99	98,14	😊
5	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0,8	0,57	70,63	😊
6	Jumlah Pasar	Unit	43	41,50	96,51	😊
7	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	0,224	0,35	154,02	😊

Pada Sasaran strategis 10, Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terdapat 7 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 7 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/on track/on trend, dan 2 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 0 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui indikator Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB pada tahun 2022 sebesar 48,30 persen atau realisasi Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB pada tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 11,82 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 24,47 persen.



Dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui indikator Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri pada tahun 2022 sebesar 60,29 persen atau realisasi Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri pada tahun 2022 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 7 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 11 persen.

Tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui indikator Persentase koperasi aktif pada tahun 2022 sebesar 90,72 persen atau realisasi Persentase koperasi aktif pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 67,80 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 74,73 persen.



Empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui Persentase Usaha Mikro Dan Kecil pada tahun 2022 sebesar 99,55 persen atau realisasi Persentase Usaha Mikro Dan Kecil pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 97,99 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 98,43 persen.

Lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui indikator Cakupan bina klppedagang/usaha informal pada tahun 2022 sebesar 38,89 persen atau realisasi Cakupan bina klppedagang/usaha informal pada tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,28 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,72 persen.



Enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui indikator Jumlah Pasar pada tahun 2022 sebesar 93,02 persen atau realisasi Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 40,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 43 persen.

Tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui indikator Cakupan bina klppengrajin pada tahun 2022 sebesar 333,33 persen atau realisasi Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,56 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,168 persen.



e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, perindustrian, UMKM dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp 85.126.067.017 terealisasi sebesar Rp 8.852.580.025 atau 10,40 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) ini adalah sebanyak 15 program yaitu:

1. Program Hubungan Industri
2. Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam
3. Program Pemberdayaan UMKM
4. Program Pengembangan UMKM
5. Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan
6. Program Perencanaan dan pembangunan industri
7. Program Standarisasi dan perlindungan konsumen
8. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
9. Program Penilaian Kesehatan Ksp /Usp Koperasi

10. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
11. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
12. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
13. Program Pengembangan Ekspor
14. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
15. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

11 Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas)

Analisis pencapaian Sasaran 11: Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas), dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2022				
			Target	Realisasi	Capaian	Notif	
3	4	5	11	12	13	14	
1 1 Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas)	1	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	56,6	56,85	100,44	SB
	2	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	18,0	140	777,78	SB
	3	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	89	89	100,40	SB
	4	Persentase wirausaha muda	%	3	3	82,75	CB
	5	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	22	85,71	386,56	SB
	6	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan	%	36	29	80,96	CB
	7	Cakupan pembinaan atlet muda	atlet	48	73,65	152,08	SB
	8	Jumlah atlet berprestasi	atlet	18	3	16,67	TB
	9	Jumlah prestasi olahraga	prestasi	3	2	66,67	KB
	10	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	69	20	29,01	TB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Sat	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian	Notif
	11	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	26,67	25,74	96,53	CB

Dari 11 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 2 indikator kinerja mencapai target di bawah 50 persen atau tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas), dengan predikat Sangat Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 171.80 persen

b. perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi	
			2021	2022
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	55,11	56,85
2	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	18	140
3	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	76	89
4	Persentase wirausaha muda	%	3	3
5	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	17	85,71
6	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan	%	29	29
7	Cakupan pembinaan atlet muda	atlet	26	73,65
8	Jumlah atlet berprestasi	atlet	11	3
9	Jumlah prestasi olahraga	prestasi	3	2
10	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	43	20
11	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	25,74	25,74

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 11 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan mengalami penurunan dari tahun lalu dan kondisi awal (2021).

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Indikator Kinerja		Satuan	Target Kondisi Akhir Rpjmd	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2022	Capaian	Notif
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	63,24	55,98	88,52	J
2	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	36,00	79,00	219,44	J
3	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	96,07	82,77	86,16	J
4	Persentase wirausaha muda	%	4,09	2,59	63,33	K
5	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	20,12	51,43	255,64	J
6	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan	%	55,51	29,31	52,80	K
7	Cakupan pembinaan atlet muda	atlet	58,68	49,91	85,05	J

Indikator Kinerja		Satuan	Target Kondisi Akhir Rpjmd	Realisasi Kinerja Sd Tahun 2022	Capaian	Notif
8	Jumlah atlet berprestasi	atlet	20,00	7,00	35,00	L
9	Jumlah prestasi olahraga	prestasi	3,00	2,50	83,33	J
10	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100,00	31,37	31,37	L
11	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	32,92	25,74	78,19	J

Pada Sasaran strategis 11, Meningkatnya Kinerja Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas), terdapat 11 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 7 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/*on track/on trend*, dan 2 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 2 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2022 sebesar 100,44 persen atau realisasi Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 56,85 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 56,6 persen.

Dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi pada tahun 2022 sebesar 777,78 persen atau realisasi Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 140 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 18,0 persen.

Tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif pada tahun 2022 sebesar 100,40 persen atau realisasi Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 89,29 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 89 persen.

Empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Persentase wirausaha muda pada tahun 2022 sebesar 82,75 persen atau realisasi Persentase wirausaha muda pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 2,59 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3,13 persen.

Lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Cakupan Pembinaan Olahraga pada tahun 2022 sebesar 386,56 persen atau realisasi Cakupan Pembinaan Olahraga pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 85,71 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 22,17 persen.

Enam pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan pada tahun 2022 sebesar 80,96 persen atau realisasi Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 29,31 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 36,20 persen.

Tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan pada tahun 2022 sebesar 152,08 persen atau realisasi Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 73,65 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 48,43 persen.

Delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Jumlah atlet berprestasi pada tahun 2022 sebesar 16,67 persen atau realisasi Jumlah atlet berprestasi pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 29,31 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 36,20 persen.



Sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Jumlah prestasi olahraga pada tahun 2022 sebesar 66,67 persen atau realisasi Jumlah prestasi olahraga pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 2 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3 persen.

Sepuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Penyelesaian Kasus Tanah Negara pada tahun 2022 sebesar 29,01 persen atau realisasi Penyelesaian Kasus Tanah Negara pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 20 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 68,94 persen.

Sebelah, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) melalui indikator Persentase Luas Lahan Bersertifikat pada tahun 2022 sebesar 96,53 persen atau realisasi Persentase Luas Lahan Bersertifikat pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 25,74 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 26,67 persen.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) adalah sebesar Rp8.901.245.499,00 terealisasi sebesar Rp7.380.526.252,00 atau 82.92 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas) ini adalah sebanyak 4 program yaitu:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

12 Meningkatkan kemandirian desa dalam pembangunan daerah melalui pengembangan kawasan perdesaan

Analisis pencapaian Sasaran 12: Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan, dapat dijelaskan sebagai berikut:dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Not
12 Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	1 Indeks Desa Membangun	Angka	0,74	0,72	97,30	CB
	2 Persentase Desa Mandiri	%	1,83	0,12	6,56	TB
	3 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	100	73,39	73,39	KB
	4 Rata-Rata Jumlah KlpBinaan Pkk	%	146	146	100,00	B
	5 Persentase Lsm Aktif	%	100	90,9	90,9	CB
	6 Persentase Pkk Aktif	%	100	100	100,00	B
	7 Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100,00	B
	8 Jumlah Aparat Desa Yang	%	100	0	0,00	TB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Not
	Ditingkatkan Kapasitasnya					
	9 Rata-Rata Jumlah KlpBinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	%	93	93	100,00	B

Dari 9 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 2 indikator kinerja mencapai target di bawah 50 persen atau tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan dengan predikat Kurang Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 74.24 persen

b. perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja		Satuan	Realisasi	
			2021	2022
1	Indeks Desa Membangun	Angka	0,720	0,72
2	Persentase Desa Mandiri	%	0,051	0,12
3	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	79,39	73,39
4	Rata-Rata Jumlah KlpBinaan Pkk	%	146	146
5	Persentase Lsm Aktif	%	0	90,9
6	Persentase Pkk Aktif	%	100	100
7	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100
8	Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	100	0
9	Rata-Rata Jumlah KlpBinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	%	93	93

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 9 indikator yang menunjang pencapaian Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan mengalami penurunan dari tahun lalu dan kondisi awal (2021).

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target kondisi akhir rpjmd	Realisasi kinerja sd tahun 2022	Capaian	Not
12 Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	1 Indeks Desa Membangun	Angka	0,824	0,72	87,38	
	2 Persentase Desa Mandiri	%	9,17	0,09	0,93	
	3 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	100	76,39	76,39	
	4 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Pkk	%	146	146,00	100,00	
	5 Persentase Lsm Aktif	%	100	45,45	45,45	
	6 Persentase Pkk Aktif	%	100	100,00	100,00	
	7 Persentase Posyandu Aktif	%	100	100,00	100,00	
	8 Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	100	50,00	50,00	
	9 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	%	100	93,00	93,00	

Pada Sasaran strategis 12, Meningkatkan Kinerja Meningkatkan kemandirian desa dalam pembangunan daerah melalui pengembangan kawasan perdesaan terdapat 9 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 6 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/on track/on trend, dan 2 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 1 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Indeks Desa Membangun pada tahun 2022 sebesar 97,30 persen atau realisasi Indeks Desa Membangun pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,72 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,74 persen.

Dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Persentase Desa Mandiri pada tahun 2022 sebesar 6,56 persen atau realisasi Persentase Desa Mandiri pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,12 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,83 persen.

Tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik pada tahun 2022 sebesar 73,39 persen atau Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik pada tahun 2022 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 73,39 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Rata-Rata Jumlah KlpBinaan Pkk pada tahun 2022 sebesar 100,00 persen atau Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 146 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Persentase Lsm Aktif pada tahun 2022 sebesar 90,90 persen atau realisasi Persentase LSM Aktif pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 90,9 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Persentase Pkk Aktif pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Persentase Pkk Aktif pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.



Tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Persentase Posyandu Aktif pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Persentase Posyandu Aktif pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun 2022 sebesar 0 persen atau realisasi Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 0 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui indikator Rata-Rata Jumlah KlpBinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Rata-Rata Jumlah KlpBinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 93 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 93 persen.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah adalah sebesar Rp Rp1.551.185.400,00 terealisasi sebesar Rp Rp1.474.226.662,00 atau 95,04 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah ini adalah sebanyak 4 program yaitu:

1. Program Penataan Desa
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan

13 Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman

Analisis pencapaian Sasaran 13: Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	No	Indikator	Sat	Tahun 2022			
				Targe t	Realis asi	Capaia n	Not
13 Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	1	Indeks Rasa Aman	Angka	15	14	93,33	CB
	2	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	88,56	51,77	58,46	KB
	3	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp)	%	0,54	0,74	137,04	SB
	4	Total Fertility Rate (Tfr)	%	2,44	1,99	81,48	CB

Sasaran Strategis	No	Indikator	Sat	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian	Not
	5	Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	73,59	59,97	81,48	CB
	6	Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	14,99	1,67	11,11	TB
	7	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	%	1,00	1	100,00	B
	8	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan	sektor	6	6	100	B
	9	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,	sektor	3	3	100	B
	10	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	18,19	3,78	20,76	TB
	11	Ratio Akseptor Kb	%	16,92	79,60	100	B
	12	Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	75,16	56,34	74,97	KB

Sasaran Strategis	No	Indikator	Sat	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian	Not
	13	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	89,79	0	0,00	TB
	14	Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	4,41	0,21	4,76	TB
	15	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	12,48	1,45	11,62	TB
	16	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	37,32	7,75	20,77	TB
	17	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	46,97	16,80	35,77	TB
	18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	%	92,61	74,97	80,95	CB
	19	Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb	%	74,96	53,62	71,54	KB
	20	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- Kb	%	81,76	58,94	72,09	KB
	21	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Setiap Kecamatan	%	10,00	10	100	B
	22	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	1,39	0,035	2,5	TB
	23	Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bdadng Pengendalian Penduduk	%	100,00	100	100	B

Sasaran Strategis	No	Indikator	Sat	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian	Not
	24	Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri	%	25,95	6,75	26,00	TB
	25	Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (Ppkbd) Setiap Desa/Kelurahan	%	100,00	100	100,00	B
	26	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100,00	100	100,00	B
	27	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	38,85	33,76	86,91	CB
	28	Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa	%	100,00	100	100,00	B
	29	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (Ims)	%	0,00	0	0	TB
	30	Cakupan KlpKegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100,00	100	100,00	B
	31	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan	%	38,38	32,20	83,90	CB

Sasaran Strategis	No	Indikator	Sat	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian	Not
		Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak					
	32	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	22,64	4,98	22,00	TB
	33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes	%	0,01	0,0065	83,33	CB
	34	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,31	0,3	96,06	CB
	35	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100,00	100	100,00	B
	36	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	0,003	0,00000008	0,00	TB
	37	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100,00	100,00	100,00	B
	38	Persentase Penegakan Perda	%	100,00	100	100,00	B
	39	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	4,40	0	0,00	TB
	40	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	24,00	4,2	17,50	TB
	41	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%	86,69	96	110,74	SB
	42	Rasio KDRT	%	0,002	0,0000064	0,32	TB

Sasaran Strategis	No	Indikator	Sat	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian	Not
	43	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	97,00	0	0,00	TB
	44	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100,00	100	100	B
	45	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit	%	77,25	6,23	8,06	TB
	46	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	%	100,00	100	100,00	B
	47	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	%	100,00	100	100,00	B
	48	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam	%	100,00	100	100	B

Sasaran Strategis	No	Indikator	Sat	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Capaian	Not
		Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)					
	49	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	%	100,00	100	100,00	B
Rata Rata Capaian						65.14	KB

Dari 49 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 18 indikator kinerja mencapai target di bawah 50 persen atau tidak berhasil. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan kehidupan beragama dengan predikat Kurang Berhasil mencapai target yaitu rata-rata 63.27 persen

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi	
			2021	2022
13 Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	1 Indeks Rasa Aman	Angka	14	14
	2 Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	68,38	51,77
	3 Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp)	%	0,01	0,74
	4 Total Fertility Rate (Tfr)	%	2,31	1,99
	5 Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	120,12	59,97
	6 Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	0,93	1,67
	7 Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	%	1	1
	8 Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan	sektor	6	6

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi	
			2021	2022
	Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan			
9	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,	sektor	3	3
10	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	114,59	3,78
11	Ratio Akseptor Kb	%	1,54	79,60
12	Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	56,43	56,34
13	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	80,62	0
14	Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	0,19	0,21
15	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	1,59	1,45
16	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	7,26	7,75
17	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	14,75	16,80
18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	%	68,97	74,97
19	Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb	%	49,90	53,62
20	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- Kb	%	99,99	58,94
21	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Setiap Kecamatan	%	10	10
22	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	0,08	0,035
23	Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bdadng Pengendalian Penduduk	%	100	100

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi	
			2021	2022
	24 Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri	%	7,3	6,75
	25 Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (Ppkbd) Setiap Desa/Kelurahan	%	100	100
	26 Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100
	27 Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	5,55	33,76
	28 Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di setiap Desa	%	100	100
	29 Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Sesual (Ims)	%	0	0
	30 Cakupan KlpKegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100	100
	31 Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	37,82	32,20
	32 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	4,94	4,98
	33 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes	%	0,0056	0,0065
	34 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,3	0,3
	35 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100
	36 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	0,00273	0,0000 0008
	37 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100,00

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi		
			2021	2022	
	38	Persentase Penegakan Perda	%	100	100
	39	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	4,04	0
	40	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	3,85	4,2
	41	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%		96
	42	Rasio KDRT	%	0,00000 004	0,0000 064
	43	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	98	0
	44	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100
	45	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit	%	0,895	6,23
	46	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	%	100	100
	47	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	%	100	100
	48	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100	100
	49	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen	%	100	100

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi	
			2021	2022
	Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD			

Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, maka 49 indikator yang menunjang pencapaian Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman mengalami peningkatan dari tahun lalu dan kondisi awal (2021).

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja sd Tahun 2022	Capaian	Notifikasi
13 Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	1 Indeks Rasa Aman	Angka	15	14,00	93,33	
	2 Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	90,75	60,08	66,20	
	3 Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp)	%	90,48	0,37	0,41	
	4 Total Fertility Rate (Tfr)	%	90,48	2,15	2,38	
	5 Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	90,48	100,80	111,41	
	6 Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	89,29	6,02	6,74	
	7 Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	%	1	1,00	100,00	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja sd Tahun 2022	Capaian	Notifikasi
	8 Jumlah Sektor Yang Menyapakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan	sektor	6	6,00	100,00	😊
	9 Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,	sektor	3	3,00	100,00	😊
	10 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	11,99	67,67	564,42	😊
	11 Ratio Akseptor Kb	%	23,13	40,57	175,40	😊
	12 Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	74,15	65,70	88,61	😊
	13 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	89,79	52,06	57,98	😐
	14 Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	4,56	2,48	54,38	😐
	15 Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	9,94	6,61	66,47	😐
	16 Persentase Penggunaan	%	43,29	14,01	32,36	😞

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja sd Tahun 2022	Capaian	Notifikasi
	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					
17	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	73,89	25,26	34,19	
18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	%	100	74,96	74,96	
19	Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb	%	92,58	60,72	65,58	
20	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- Kb	%	100	86,04	86,04	
21	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Setiap Kecamatan	kec	10	10,00	100,00	
22	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	0,51	1,29	254,88	
23	Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bdadng Pengendalian Penduduk	%	100	100,00	100,00	
24	Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber- Kb Mandiri	%	23,28	16,63	71,42	
25	Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa	%	100	100,00	100,00	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja sd Tahun 2022	Capaian	Notifikasi
	(Ppkbd) Setiap Desa/Kelurahan					
	26 Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100,00	100,00	😊
	27 Persentase Faskes Dan Jejarinya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	100	46,23	46,23	😐
	28 Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa	%	100	100,00	100,00	😊
	29 Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (Ims)	%	0	0,00	0,00	😞
	30 Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100	100,00	100,00	😊
	31 Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	40,03	60,86	152,04	😊

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja sd Tahun 2022	Capaian	Notifikasi
	32 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	23,17	13,47	58,14	
	33 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes	%	0,001	0,01	605,00	
	34 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,29	0,30	103,45	
	35 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100,00	100,00	
	36 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	0,00311	0,00	87,46	
	37 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100,00	100,00	
	38 Persentase Penegakan Perda	%	100	100,00	100,00	
	39 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	4,2	2,02	48,10	
	40 Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	35,58	10,68	30,00	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja sd Tahun 2022	Capaian	Notifikasi
	41 Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%		48,00	0,00	
	42 Rasio KDRT	%	0,001	0,00	100,32	
	43 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	97	48,81	0,00	
	44 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100,00	100,00	
	45 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit	%	100	4,48	4,48	
	46 Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	%	100	100,00	100,00	
	47 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat	%	100	100,00	100,00	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kinerja sd Tahun 2022	Capaian	Notifikasi
	Kelengkapan DPRD Kabupaten					
	48 Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100	100,00	100,00	😊
	49 Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	%	100	100,00	100,00	😊

Pada Sasaran strategis 13, Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman terdapat 49 indikator sasaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, 31 indikator sasaran tercapai dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapai/on track/on trend, dan 8 indikator sasaran dengan notifikasi kuning yang berarti kerja keras, 10 indikator sasaran dengan notifikasi merah yang berarti sulit untuk dapat dicapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian beberapa indikator sasaran meningkatnya pelayanan kehidupan beragama dapat dijelaskan sebagai berikut

Pertama, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Indeks Rasa Aman pada tahun 2022 sebesar 99,33 Persen, artinya realisasi Indeks Rasa Aman pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu 14 angka dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 15 angka.

Kedua, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani pada tahun 2022 sebesar 58,46 persen atau realisasi Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani pada tahun 2022 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 51,78 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 88,56 persen.

Ketiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp) pada tahun 2022 sebesar 137,04 persen atau realisasi indikator Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp) pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,74 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,54 persen.

Empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Total Fertility Rate (Tfr) pada tahun 2022 sebesar 81,48 persen atau realisasi Total Fertility Rate (Tfr) pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 1,99 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 2,44 persen.

Lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB pada tahun 2022 sebesar 110,72 persen atau realisasi Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 81,48 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 73,59 persen.

Salah satu prioritas nasional adalah penanganan Stunting dengan melibatkan elemen berbagai sektor. Untuk itu Kampung Keluarga Berkualitas (KB) yang selama ini menjadi program pemerintah diharapkan kegiatannya dikonvergensi untuk penanganan Stunting. Hal ini mengemuka pada kegiatan Penguatan Kemitraan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung KB dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bulukumba. Kampung KB yang terbentuk di Kabupaten Bulukumba baru berjumlah 22 yang ditargetkan 64 Kampung KB.

Enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Perangkat Daerah



Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada tahun 2022 sebesar 74,10 persen atau realisasi Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada tahun 2022 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 11,11 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 14,99 persen.

Tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk pada tahun 2022 sebesar 100,00 persen atau realisasi Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 1 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1 persen.

Delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan pada tahun 2022 sebesar 100,00 persen atau realisasi Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 6 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 6 persen.

Sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan, pada tahun 2022 sebesar 100,00 persen atau realisasi Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan, pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 3 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 3 persen.

Sepuluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga pada tahun 2022 sebesar 114,12 persen atau realisasi Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 20,76 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 18,19 persen.

Sebelas, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator ratio Akseptor Kb pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi ratio Akseptor Kb pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 79,60 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 16,92 persen.

Dua belas, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 pada tahun 2022 sebesar 99,75

persen atau realisasi Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 74,97 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 75,16 persen.

Tiga belas , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) pada tahun 2022 sebesar 26,17 persen atau realisasi Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)pada tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 23,5 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 89,79 persen.

Empat belas , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun pada tahun 2022 sebesar 107,91 persen atau realisasi Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 4,76 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 4,41 persen.

lima belas , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need) pada tahun 2022 sebesar 93,16 persen atau realisasi Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need) pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 11,62 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 12,48 persen.

Enam belas , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2022 sebesar 55,64 persen atau realisasi Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2022 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 20,77 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 37,32 persen.

Tujuh belas , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi pada tahun 2022 sebesar 76,17 persen atau realisasi Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi pada tahun 2022 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 35,77 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 46,97 persen.

Delapan belas , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita pada tahun 2022 sebesar 87,41 persen atau realisasi Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar



80,95 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 92,61 persen.

Sembilan belas , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb pada tahun 2022 sebesar 95,43 persen atau realisasi Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 71,54 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 74,96 persen.

Dua puluh , pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- Kb pada tahun 2022 sebesar 88,17 persen atau Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- Kb pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 72,09 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 81,76 persen.

Dua puluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Setiap Kecamatan pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Setiap Kecamatan pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 10 kecamatan dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 10 kecamatan.

Dua puluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa pada tahun 2022 sebesar 179,90 persen atau realisasi Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 2,5 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 1,39 persen.

Dua puluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Dua puluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri pada tahun 2022 sebesar 100,19 persen atau realisasi Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera



(Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 26,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 25,95 persen.

Dua puluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (Ppkbd) Setiap Desa/Kelurahan pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (Ppkbd) Setiap Desa/Kelurahan pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Dua puluh enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Dua puluh tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan pada tahun 2022 sebesar 223,71 persen atau realisasi Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 86,91 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 38,85 persen.

Dua puluh delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Dua puluh sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (Ims) pada tahun 2022 sebesar 0 persen atau realisasi Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (Ims) pada tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 0 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0 persen.

Tiga puluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan KlpKegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga pada tahun 2022 sebesar 100,00 persen atau realisasi Cakupan KlpKegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar

100,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen.

Tiga puluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak pada tahun 2022 sebesar 218,60 persen atau realisasi Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 83,90 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 38,38 persen.

Tiga puluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita pada tahun 2022 sebesar 97,17 persen atau realisasi Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 22,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 22,64 persen.

Tiga puluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes pada tahun 2022 sebesar 97,17 persen atau realisasi Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 22,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 22,64 persen.

Tiga puluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada tahun 2022 sebesar 96,06 persen atau realisasi Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,3 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,31 persen.

Tiga puluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) pada tahun 2022 sebesar 100,00 persen atau realisasi Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100,00 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100,00 persen.

Tiga puluh enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) pada tahun 2022 sebesar 89,44 persen atau realisasi Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) pada tahun 2022 cukup berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,00271 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,003 persen.

Tiga puluh tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2022 sebesar 100,00 persen atau realisasi Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Tiga puluh delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Penegakan Perda pada tahun 2022 sebesar 100,00 persen atau realisasi Persentase Penegakan Perda pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Tiga puluh sembilan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah pada tahun 2022 tidak terealisasi atau realisasi Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah pada tahun 2022 tidak berhasil memenuhi target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 4,2 persen.

Empat puluh, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD pada tahun 2022 sebesar 72,92 persen atau realisasi Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD pada tahun 2022 kurang berhasil mencapai target yaitu sebesar 17,5 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 24,00 persen.

Empat puluh satu, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta pada tahun 2022 sebesar 110,74 persen atau realisasi Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 96 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 86,69 persen.

Empat puluh dua, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Rasio KDRT pada tahun 2022 sebesar 0,32 persen atau realisasi Rasio KDRT pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 0,0000064 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 0,002 persen.

Empat puluh tiga, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan tahun 2022 0 persen atau realisasi Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan pada tahun 2022 sangat berhasil mencapai target yaitu sebesar 0 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 97 persen.

Empat puluh empat, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di

Dalam Unit Pelayanan Terpadu tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Empat puluh lima, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit tahun 2022 sebesar 10,43 persen atau realisasi Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit pada tahun 2022 tidak berhasil mencapai target yaitu sebesar 8,06 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 77,25 persen.



Empat puluh enam, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Empat puluh tujuh, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Empat puluh delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

Empat puluh delapan, pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman melalui indikator Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan

Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau realisasi Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD pada tahun 2022 berhasil mencapai target yaitu sebesar 100 persen dibandingkan target yang ditetapkan di tahun yang sama yaitu 100 persen.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman adalah sebesar Rp 37.510.794.163 terealisasi sebesar Rp 34.994.785.854 atau 93,29 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman ini adalah sebanyak 15 program yaitu:

1. Program Penanggulangan bencana
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha) Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh
6. Program Perlindungan Perempuan
7. Program Perlindungan Khusus Anak
8. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
9. Program Pengarusutamaan Gender Dan pemberdayaan Perempuan
10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
11. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
12. Program Pengendalian Penduduk
13. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
14. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan keluarga Sejahtera (Ks)
15. Program Dukungan Pelaksanaan tugas Dan Fungsi DPRD

3.3. Realisasi Anggaran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2022 yang dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD tahun 2022 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bulukumba Tahun anggaran 2022.

APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022, secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Garis besar APBD Tahun 2022 dan realisasinya berdasarkan data hasil Reviu Inspektorat sebelum audit BPK, adalah sebagai berikut:

TABEL 9
Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bulukumba Tahun
Anggaran 2022

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	1.464.329.512.889,00	1.375.869.878.068,34	93,96
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	228.268.055.079,00	169.419.982.130,72	74,22
Pajak Daerah	69.003.059.483,00	38.579.637.960,90	55,91
Retribusi Daerah	24.864.995.596,00	17.634.455.280,00	70,92
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	3.732.616.722,00	74,65
Lain-lain PAD yang Sah	129.400.000.000,00	109.473.272.167,82	84,60
PENDAPATAN TRANSFER	1.236.061.457.810,00	1.206.449.895.937,62	97,60
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.143.690.463.000,00	1.108.334.266.622,00	96,91
Dana Perimbangan	1.029.924.838.000,00	994.568.641.622,00	96,57
Dana Insentif Daerah (DID)	10.457.015.000,00	10.457.015.000,00	100,00
Dana Desa	103.308.610.000,00	103.308.610.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.370.994.810,00	98.115.629.315,62	106,22
Pendapatan Bagi Hasil	58.453.542.330,00	72.919.965.302,00	124,75
Bantuan Keuangan	33.917.452.480,00	25.195.664.013,62	74,29
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	0,00
Pendapatan Hibah	-	-	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0,00
BELANJA DAERAH	1.581.422.605.370,00	1.344.950.356.924,50	85,05

URAIAN	PAGU ANGGRAN	REALISASI	%
BELANJA OPERASI	1.008.944.182.414,00	911.207.258.499,88	90,31
Belanja Pegawai	630.731.932.309,00	590.003.633.511,00	93,54
Belanja Barang dan Jasa	356.320.738.748,00	302.352.451.730,88	84,85
Belanja Bunga	138.750.000,00	-	0,00
Belanja Hibah	17.052.718.857,00	15.176.910.938,00	89,00
Belanja Bantuan Sosial	4.700.042.500,00	3.674.262.320,00	78,18
BELANJA MODAL	381.691.934.815,00	255.053.250.411,62	66,82
Belanja Modal Tanah	5.000.000.843,00	3.557.175.720,00	71,14
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.834.600.644,00	30.855.480.239,00	79,45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.718.070.874,00	66.510.041.402,80	41,64
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	170.754.155.054,00	148.633.846.899,00	87,05
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.385.107.400,00	5.496.706.150,82	74,43
BELANJA TIDAK TERDUGA	10.631.393.294,00	658.045.600,00	6,19
Belanja Tidak Terduga	10.631.393.294,00	658.045.600,00	6,19
BELANJA TRANSFER	180.155.094.847,00	178.031.802.413,00	98,82
Belanja Bagi Hasil	8.957.831.547,00	6.834.570.852,00	76,30
Belanja Bantuan Keuangan	171.197.263.300,00	171.197.231.561,00	100,00
SURPLUS / DEFISIT	(117.093.092.481,00)	30.919.521.143,84	-26,41
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	117.093.092.481,00	58.251.407.127,39	49,75
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	42.093.092.481,00	58.251.407.127,39	138,39
Penerimaan Pinjaman Daerah	75.000.000.000,00	-	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	117.093.092.481,00	58.251.407.127,39	49,75
	-	89.170.928.271,23	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan

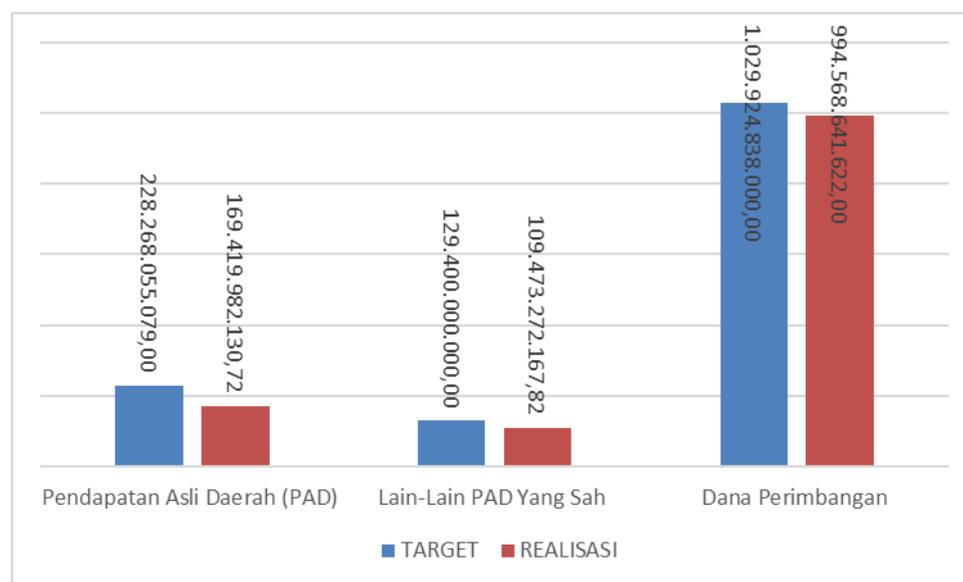
Pendapatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp 1.464.329.512.889,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.375.869.878.068,34 atau 93,97 persen. Target pendapatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022 mengalami Penurunan

jika dibandingkan dengan tahun 2021. Target pendapatan tahun 2020 sebesar Rp 1.450.653.482.748,00 dan di tahun 2022 naik menjadi Rp 1.464.329.512.889,00 atau naik 0.93 persen. Sedangkan realisasi pendapatan mengalami peningkatan yaitu dari Rp 1.369.368.335.163,92 pada tahun 2021 dan meningkat menjadi Rp 1.375.869.878.068,34 pada tahun 2022 atau meningkat 0.47 persen.

Menurunnya pendapatan ini disebabkan adanya penurunan capaian pada:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 target Rp 228.268.055.079,00 terealisasi sebesar Rp 169.419.982.130,72 atau 74.22 persen. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 153.236.211.453,92 atau 75.45 persen.
2. Dana Perimbangan ditahun 2022 Rp 1.029.924.838.000,00 terealisasi sebesar Rp 994.568.641.622,00 atau 96.57 persen, Realisasi Dana Perimbangan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 958.601.494.473,00 atau 98,34 persen. Dapat dilihat pada diagram berikut :

Gambar17
Perbandingan antara target dan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020- 2021



Beberapa upaya Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan pencapaian target dan realisasi pendapatan dengan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
- b. Meneliti dan mengkaji potensi, eksplorasi potensi serta penerapan manajemen pengelolaan pendapatan yang efektif.
- c. Melakukan perbaikan mekanisme pemungutan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
- d. Peningkatan koordinasi dalam rangka perolehan dan pengelolaan pendapatan daerah.
- e. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber-

sumber pendapatan daerah.

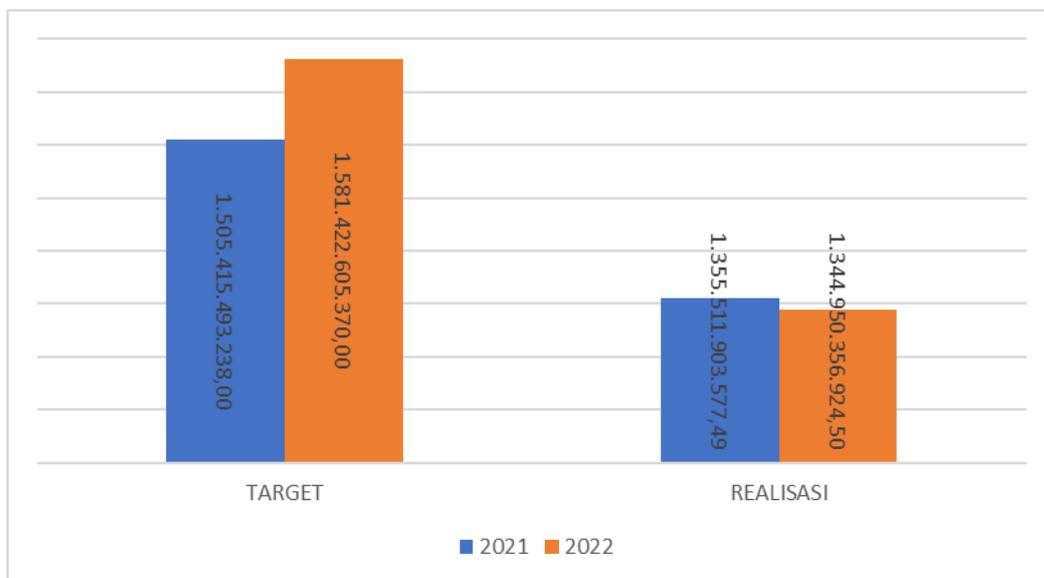
- f. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber- sumber pendapatan daerah.
- g. Pemberian *punishment* dan *reward* bagi aparatur pengelola pendapatan daerah.

2. Belanja

Target belanja daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Target belanja tahun 2021 sebesar Rp 1.505.415.493.238,00 dan di tahun 2022 naik menjadi Rp 1.581.422.605.370,00 atau naik 4,81 persen. Sedangkan realisasi belanja mengalami peningkatan yaitu dari Rp 1.355.511.903.577,49 pada tahun 2021 dan turun menjadi Rp 1.344.950.356.924,50 pada tahun 2022 atau turun 0.79 persen.

Gambar 18

Perbandingan antara target dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020- 2021



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Bulukumba tahun 2022,

Alokasi Anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2022 sebesar Rp 1.581.422.605.370,00 terealisasi sebesar Rp 1.344.950.356.924,50 atau 85.05 persen, dengan rincian sebagai berikut: belanja operasi sebesar Rp.1.344.950.356.924,50 terealisasi sebesar Rp 911.207.258.499,88 atau 90,31 persen, belanja modal sebesar Rp.381.691.934.815,00 dan terealisasi sebesar Rp.255.053.250.411,62 atau 66.82 persen, belanja tak terduga sebesar Rp.10.631.393.294,00 dan terealisasi sebesar Rp.658.045.600,00 atau 6.19 persen dan belanja transfer sebesar Rp.180.155.094.847,00 dan terealisasi sebesar Rp.178.031.802.413,00 atau 98,82 persen.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja keuangan untuk tahun selanjutnya maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan kebijakan sebagai berikut:

- a. Efisiensi dan efektivitas anggaran.
- b. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang mendukung arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023,
- c. Penganggaran program dan kegiatan diprioritaskan untuk pencapaian target indikator kinerja daerah tahun 2021 dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba, serta mendukung pembangunan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan provinsi.
- d. Tolok ukur dan target kinerja belanja daerah pada setiap kegiatan disertai indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- e. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik serta potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan proporsional.

Selanjutnya akan diuraikan realisasi belanja langsung berdasarkan sasaran strategis pembangunan daerah tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel 10.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Sasaran Strategis Pembangunan Daerah

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama	Rp2.720.237.430,00	Rp2.639.904.545,00	97,05
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Pembangunan	Rp205.519.638.450,00	Rp194.494.821.220,30	94,64
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Rp5.371.031.535,00	Rp5.005.862.266,00	93,20
4	Meningkatnya nilai tambah produk pertanian	Rp17.213.356.575,00	Rp14.585.612.949,00	84,73
5	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Rp8.822.443.178,00	Rp7.304.711.338,00	82,80
6	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Rp89.763.414.347,00	Rp80.466.949.406,00	89,64
7	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Rp216.458.968.101,00	Rp173.651.795.166,70	80,22

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
8	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara	Rp3.897.462.130,00	Rp3.040.566.740,00	78,01
9	Meningkatnya pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah	Rp230.303.584.979,00	Rp195.393.097.745,00	84,84
10	Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, perindustrian, UMKM dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Rp85.126.067.017,00	Rp8.852.580.025,00	10,40
11	Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas)	Rp8.901.245.499,00	Rp7.380.526.252,00	82,92
12	Meningkatnya kemandirian desa dalam pembangunan daerah melalui pengembangan kawasan perdesaan	Rp1.551.185.400,00	Rp1.474.226.662,00	95,04
13	Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Rp37.510.794.163,00	Rp34.994.785.854,00	93,29
	BELANJA YANG MENDUKUNG SASARAN	Rp913.159.428.804,00	Rp729.285.440.169,00	79,86
	BELANJA PENDUKUNG	Rp668.263.176.566,00	Rp615.664.916.755,50	92,13
	TOTAL BELANJA	Rp1.581.422.605.370,00	Rp1.344.950.356.924,50	85,05

Sumber: Diolah, sekretariat daerah Kab. Bulukumba Tahun 2021

Anggaran belanja daerah sebesar Rp1.581.422.605.370,00 terealisasi sebesar Rp1.344.950.356.924,50 atau 85,05 persen dari anggaran. dari besaran belanja daerah tersebut, anggaran yang langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja daerah yang ada dalam RPJMD tahun 2022 sebesar Rp Rp913.159.428.804,00 0 terealisasi sebesar Rp729.285.440.169,00 atau 79,86 persen dari anggaran, dan selebihnya merupakan belanja pendukung pada anggaran pokok (program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program dan kegiatan seluruh kecamatan) sebesar Rp 668.263.176.566,00 terealisasi sebesar Rp 615.664.916.755,50 atau 92,13 persen dari anggaran.

Untuk keberhasilan pencapaian kinerja dalam rangka mencapai target indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah yang ada dalam RPJMD, maka untuk tahun-tahun mendatang porsi untuk belanja pendukung dapat dibatasi utamanya untuk

rekening belanja barang dan jasa yang tidak terlalu penting dan tidak berkontribusi langsung terhadap pencapaian target indikator kinerja yang ada dalam RPJMD, dan selanjutnya anggaran yang dirasionalkan dari belanja pendukung (administrasi umum) ini diprioritaskan untuk mencapai target yang masih belum tercapai di RPJMD.

Secara umum kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian tingkat kinerja dan realisasi keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2022 sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya realisasi target Pendapatan Asli Daerah(PAD).
2. Adanya beberapa kegiatan fisik pada beberapa OPD yang terlambat melakukan proses pekerjaan.
3. Terdapat beberapa OPD yang realisasi fisik masih tinggi dibandingkan dengan realiasi keuangannya.
4. Adanya kegiatan di OPD yang tidak jalan dan mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penyerapan anggaran.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat 5 sasaran strategis yang mencapai hasil di atas 100 persen (sangat berhasil) yaitu sasaran strategis (4),(7),(8),(10),(11): 0 sasaran tercapai dengan predikat berhasil; sasaran tercapai dengan predikat cukup berhasil yaitu sasaran strategis (1), (2), (3), (6), (9) dan (13); dan 3 sasaran tercapai dengan predikat kurang berhasil yaitu sasaran strategis (5) dan (12); Dan 0 sasaran yang tidak berhasil Secara kumulatif, rata-rata capaian ke-33 sasaran strategis sebesar 101,58 persen atau dengan predikat Sangat Berhasil.
2. Dari 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD, maka terdapat 10 indikator kinerja yang telah memenuhi kriteria sangat berhasil atau 40 persen, 3 indikator kinerja yang telah memenuhi kriteria berhasil atau 12 persen, 6 indikator kinerja dengan kriteria cukup berhasil atau 24 persen, 2 indikator kinerja dengan kriteria kurang berhasil atau 8 persen dan 4 indikator kinerja lainnya dengan kriteria tidak berhasil atau 16 persen.
3. Dari 261 indikator sasaran strategis tahun 2022 terhadap target jangka menengah didapatkan hasil yaitu 164 indikator sasaran dengan notifikasi hijau (sudah tercapai/on track/on trend) atau 62.84 persen, 38 indikator sasaran dengan notifikasi kuning (butuh kerja keras) atau 14.56 persen, dan 59 indikator sasaran dengan notifikasi merah (sulit tercapai) atau 22.61 persen.
4. Pendapatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp 1.464.329.512.889,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.375.869.878.068,34 atau 93,97 persen. Target pendapatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022 mengalami Penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Target pendapatan tahun 2020 sebesar Rp 1.450.653.482.748,00 dan di tahun 2022 naik menjadi Rp 1.464.329.512.889,00 atau naik 0.93 persen. Sedangkan realisasi pendapatan mengalami peningkatan yaitu dari Rp 1.369.368.335.163,92 pada tahun 2021 dan meningkat menjadi Rp 1.375.869.878.068,34 pada tahun 2022 atau meningkat 0.47 persen, sedangkan Target belanja daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Target belanja tahun 2021 sebesar Rp 1.505.415.493.238,00 dan di tahun 2022 naik menjadi Rp 1.581.422.605.370,00 atau naik 4,81 persen. Sedangkan realisasi belanja mengalami peningkatan yaitu dari Rp 1.355.511.903.577,49 pada tahun 2021 dan turun menjadi Rp 1.344.950.356.924,50 pada tahun 2022 atau turun 0.79 persen. Alokasi Anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2022 sebesar Rp 1.581.422.605.370,00 terealisasi sebesar Rp 1.344.950.356.924,50 atau 85.05 persen, dengan rincian sebagai berikut: belanja operasi sebesar Rp.1.344.950.356.924,50 terealisasi sebesar Rp 911.207.258.499,88 atau 90,31 persen, belanja modal sebesar Rp.381.691.934.815,00 dan terealisasi sebesar Rp.255.053.250.411,62 atau 66.82 persen, belanja tak terduga sebesar Rp.10.631.393.294,00 dan terealisasi sebesar Rp.658.045.600,00 atau 6.19 persen dan belanja transfer sebesar

Rp.180.155.094.847,00 dan terealisasi sebesar Rp.178.031.802.413,00 atau 98,82 persen.

5. Anggaran belanja daerah sebesar Rp1.581.422.605.370,00 terealisasi sebesar Rp1.344.950.356.924,50 atau 85.05 persen dari anggaran. dari besaran belanja daerah tersebut, anggaran yang langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja daerah yang ada dalam RPJMD tahun 2022 sebesar Rp Rp913.159.428.804,00 0 terealisasi sebesar Rp729.285.440.169,00 atau 79.86 persen dari anggaran, dan selebihnya merupakan belanja pendukung pada anggaran pokok (program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program dan kegiatan seluruh kecamatan) sebesar Rp 668.263.176.566,00 terealisasi sebesar Rp 615.664.916.755,50 atau 92.13 persen dari anggaran.

4.2. Rekomendasi tindak lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2021 diantaranya adalah:

1. Tidak tercapainya realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Masih terdapat indikator sasaran yang tidak berorientasi hasil dan tidak menggambarkan output penting terhadap kinerja sasaran yang akan dicapai serta tidak sinkron dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Rendahnya pemanfaatan Sistem Informasi perencanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah serta rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
4. Terdapat kegiatan fisik dan Pengadaan di beberapa OPD yang realisasi fisiknya dan keuangannya masih rendah.

Dan sebagai tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan fisik terkait proses tender dan percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.
2. Membangun sistem informasi perencanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang berbasis teknologi serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
3. Akselerasi penetapan perubahan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 untuk menyesuaikan Perangkat Daerah yang telah dibentuk serta perbaikan target dan indikator sasaran yang tidak berorientasi hasil atau tidak menggambarkan output penting yang ingin dicapai.
4. Untuk keberhasilan pencapaian kinerja dalam rangka mencapai target indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah yang ada dalam RPJMD, maka untuk tahun-tahun mendatang porsi untuk belanja pendukung dapat dibatasi utamanya untuk rekening belanja barang dan jasa yang tidak terlalu penting dan tidak berkontribusi langsung terhadap pencapaian target indikator kinerja yang ada dalam RPJMD, dan selanjutnya anggaran yang dirasionalkan dari belanja pendukung (administrasi umum) ini diprioritaskan untuk mencapai target yang masih belum tercapai di RPJMD.

5. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
6. Peningkatan kualitas pelayanan untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur



LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KABUPATEN BULUKUMBA

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
1	Meningkatnya hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama	1	1	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100
		2	2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	70
		3	3	Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	%	100
		4	4	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5
		5	5	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk	Angka	2,72

PROGRAM

ANGGARAN

1	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosila dan Budaya	Rp	133.463.500
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	136.276.000
3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	2.326.704.930
4	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp	34.195.000
5	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	89.598.000
TOTAL SASARAN 1		Rp	2.720.237.430

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Pembangunan	1	6	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,5095
		2	7	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		WTP
		3	8	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	3,25
		4	9	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	%	0
		5	10	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	21,2
		6	11	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	19,24

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	7	12	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)		Tepat Waktu
	8	13	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa		0,42
	9	14	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	10,8136
	10	15	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100
	11	16	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100
	12	17	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	8,53
	13	18	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	%	11,29
	14	19	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	11,29
	15	20	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	60,87
	16	21	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	bulan	3,00
	17	22	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	89,03
	18	23	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	77,92
	19	24	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	29,00
	20	25	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	jabatan	1836,64
	21	26	Persentase tindak lanjut temuan	%	68,40
	22	27	Persentase pelanggaran Pegawai	%	0,25
	23	28	Jumlah temuan BPK	Temuan	7,00

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
		24	29	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	Ada/ Tidak Ada	Ada
		25	30	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	Ada/ Tidak Ada	Ada
		26	31	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	Ada/ Tidak Ada	Ada
		27	32	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	%	100,00

PROGRAM

1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	212.602.430
2	Program koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.611.698.800
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	188.813.119.370
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	5.475.331.900
5	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	544.536.020
6	Program Kepegawaian Daerah	Rp	859.336.870
7	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	1.343.411.000
8	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	3.266.113.000
9	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp	508.288.620
10	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	1.176.238.000
11	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	1.005.959.930
12	Program Penelitian Dan pengembangan Daerah	Rp	703.002.510
	TOTAL SASARAN 2	Rp	205.519.638.450

ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	1	33	Indeks Kepuasan Masyarakat	2.51-3.25	Angka

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	2	34	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit	12,7
	3	35	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	%	100
	4	36	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	98,4
	5	37	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	70,8
	6	38	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	91,66
	7	39	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	82,73
	8	40	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	%	0,00
	9	41	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0,15
	10	42	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	2,7564
	11	43	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	%	1,94
	12	44	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	0,24
	13	45	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	%	0,06
	14	46	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	0,75
	15	47	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10,000	741,80
	16	48	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		78,34

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	17	49	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan		1,01
	18	50	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat		0,47
	19	51	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	buah	66,35
	20	52	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	763915
	21	53	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	10
	22	54	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	%	100
	23	55	Buku "Kabupaten Dalam Angka"		Ada
	24	56	Buku "PDRB"		Ada
	25	57	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,		1
	26	58	Rasio bayi berakta kelahiran,		0,8
	27	59	Rasio pasangan berakta nikah,		0,5
	28	60	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		100
	29	61	Cakupan penerbitan KTP-el		100
	30	62	Cakupan penerbitan akte kelahiran		80
	31	63	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer		86,9022
	32	64	Cakupan Layanan Telekomunikasi		0,76051
	33	65	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon	%	83,9

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		34	66	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	54,8656
		35	67	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	86,9022

PROGRAM

ANGGARAN

1	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	217.505.300
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	251.684.700
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp	1.148.110.925
4	Program Penanganan Bencana	Rp	372.620.000
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	202.847.750
6	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	553.846.260
7	Program Pencatatan Sipil	Rp	207.671.800
8	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	41.282.200
9	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	3.465.000
10	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	901.072.000
11	Program Aplikasi Informatika	Rp	608.290.000
12	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	Rp	13.340.000
13	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp	13.675.000
14	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	141.910.000
15	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	30.307.000
16	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	8.120.600
17	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	15.197.000
18	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	336.570.000
19	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	215.626.000
	TOTAL SASARAN 3	Rp	5.283.141.535

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
4	Meningkatnya nilai tambah produk pertanian	1	68	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	1,52
		2	69	Ketersediaan Pangan Utama	angka	444,01
		3	70	Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari)	angka	9844,21
		4	71	Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)	angka	231,77
		5	72	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	%	78,39
		6	73	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB		25,5616
		7	74	Cakupan bina kelompok tani		76,2
		8	75	Jumlah Populasi Ternak		
				<i>Sapi Potong</i>	Ekor	78.729,2
				<i>Ayam Ras Pedaging</i>	Ekor	2.414.546
		<i>Ayam Ras Petelur</i>	Ekor	709.631		

PROGRAM

		ANGGARAN
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 588.762.700
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 139.698.000
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 447.006.375
4	Program Pengendalian Danpenanggulangan Bencana Pertanian	Rp 340.574.750
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp 3.015.358.000
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 6.653.274.750
7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 5.497.940.000
8	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 44.446.000
9	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 454.007.000
10	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 32.289.000
	TOTAL SASARAN 4	Rp 17.213.356.575

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
5	Meningkatnya produksi hasil perikanan	1	76	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	5.14	%
		2	77	Kontribusi PDRB sector perikanan	12,86	%
		3	78	Cakupan Produksi perikanan	%	128,6
		4	79	Perikanan tangkap	ton	56098,1
		5	80	Perikanan Budidaya	ton	5176,2
		6	81	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	%	70,6

PROGRAM

ANGGARAN

1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	5.732.342.700
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	1.032.225.878
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	59.374.600
TOTAL SASARAN 5		Rp	6.823.943.178

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
6	Meningkatnya kualitas Pendidikan	1	82	Indeks Pendidikan	64,06	Angka
		2	83	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
				<i>SD</i>	%	114,151
				<i>SMP</i>	%	94,858
				<i>SMA</i>	%	87,738
		3	84	Angka Partisipasi Murni (APM)		
				<i>SD</i>	%	98,6703
				<i>SMP</i>	%	84,4686
				<i>SMA</i>	%	66,2349
		4	85	Angka Partisipasi Sekolah (APS)		
				<i>7-12 Tahun</i>	%	98,8684
				<i>14-15 Tahun</i>	%	92,2674
				<i>16-18 Tahun</i>	%	75,5814
		5	86	Angka Putus Sekolah		

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		SD		%	0
		SMP		%	0
		SMA		%	0,14021
6	87	Angka Kelulusan			
		SD		%	100
		SMP		%	100
		SMA		%	100
7	88	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv		%	100
8	89	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar		rasio	1:9
9	90	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah		rasio	1:8
10	91	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas		%	91,57
11	92	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya			3,11269
12	93	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan			57,8358
13	94	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu			2
14	95	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun			38,52
15	96	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah			43,898
16	97	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk			1,428
17	98	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun		Orang	63322
18	99	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan		Judul	11703,8
19	100	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat		%	57,208

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
		20	101	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	100.00
		21	102	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	1,24005

PROGRAM

ANGGARAN

1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	80.584.065.200
2	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rp	79.977.000
3	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	50.000.000
4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	24.750.000
5	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	373.856.000
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	126.210.100
8	Program Pengelolaan Arsip	Rp	38.659.770
	TOTAL SASARAN 6	Rp	81.277.518.070

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
7	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	1	103	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68,71
		2	104	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup		5,24
		3	105	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup		9,994
		4	106	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup		0
		5	107	Angka Kematian Ibu		52,324
		6	108	Rasio Posyandu Per Satuan Balita		27,136
		7	109	Rasio Puskesmas Dan Pustu		0,19
		8	110	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk		0,002
		9	111	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk		0,04
		10	112	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk		0,09386
		11	113	Rasio Tenaga Medis/Penduduk		0,2344
		12	114	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	85,4476

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		
		13	115	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100
		14	116	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100
		15	117	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta	%	44,22
		16	118	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	101,325
		17	119	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 1000 Penduduk	3,23
		18	120	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100
		19	121	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 Penduduk	1,46
		20	122	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	%	0,0088
		21	123	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	8,27
		22	124	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	73,5481
		23	125	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	52,6511
		24	126	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	%	85,6783

PROGRAM		ANGGARAN	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	110.564.218.851
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	2.932.800.540
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Makanan Minuman	Rp	472.995.990
4	Program Penunjang Urusanpemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	100.000.000.000
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	89.889.920
TOTAL SASARAN 7		Rp	214.059.905.301

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
8	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata domestik dan mancanegara	1	127	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	5,37	%
		2	128	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	373095
		3	129	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2-4
		4	130	PAD Sektor Pariwisata	%	5,37

PROGRAM

ANGGARAN

- | | | | |
|---|--|----|---------------|
| 1 | Program Peningkatan daya tarik destinasi Pariwisata | Rp | 1.400.100.000 |
| 2 | Program Pemasaran Pariwisata | Rp | 1.022.491.000 |
| 3 | Program Penembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif | Rp | 1.045.378.000 |

TOTAL SASARAN 8

Rp 3.467.969.000

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
9	Meningkatnya pemenuhan pembangunan infrastruktur wilayah	1	131	Indeks Daya saing infrastruktur	88	Angka
		2	132	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,639
		3	133	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk		0,0032
		4	134	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	%	98,9327
		5	135	Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	80,79
		6	136	Rasio Jaringan Irigasi		0,21
		7	137	Rasio Rumah Layak Huni		0,24793
		8	138	Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	71,566
		9	139	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	11,6096
		10	140	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	93,7587
		11	141	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	83,3415
		12	142	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	84,8944
		13	143	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0
		14	144	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan		8,6673

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
		15	145	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	26,67
		16	146	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	68,95
		17	147	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	62,9144
		18	148	Indeks Kualitas Air	Poin	58,85
		19	149	Indeks Kualitas Udara	Poin	84,74
		20	150	Indeks Kualitas Tutup Lahan	%	100
		21	151	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	%	1
		22	152	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Kelompok	1
		23	153	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	Kelompok	1
		24	154	Penetapan Hak MHA	Kelompok	100
		25	155	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Kelompok	100
		26	156	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	Kelompok	1
		27	157	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	Kelompok	Ada
		28	158	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	sekolah	100
		29	159	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,	%	27,219
		30	160	Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	94,8814
		31	161	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	25,2026
		32	162	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	Ton/Kg	38,3614

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
	33	163	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	Buah	1,38584
	34	164	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	%	31,9966
	35	165	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	34,6449
	36	166	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	Dok	0
	37	167	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati		
	38	168	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		3
	39	169	Jumlah arus penumpang angkutan Umum		14099,6
	40	170	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	1,23126
	41	171	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	%	92,4
	42	172	Pemasangan Rambu-Rambu		66,01
	43	173	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum		26480
	44	174	Rasio Ijin Trayek		0,008

PROGRAM

1	Program Pengelolaan Dan Pengembangansistem Air Limbah	Rp	4.829.108.000
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	100.181.300
3	Program Penyelenggaraan Penataanruang	Rp	128.748.000
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	18.162.145.885
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	96.808.259.724
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rp	11.172.484.676
7	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	8.196.132.000
8	Program Kawasan Permukiman	Rp	12.620.344.990
9	Program Peningkatan Prasarana,Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Rp	297.797.100

10	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp	133.311.080
11	Program Pengembangan Perumahan	Rp	425.801.180
12	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	36.945.565.000
13	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	7.759.548.273
14	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	285.796.000
15	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	425.300.200
16	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Ataukerusakan Lingkungan Hidup	Rp	290.846.728
17	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Danberacun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Danberacun (Limbah B3)	Rp	51.005.500
18	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadapizin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Danpengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Rp	20.556.600
19	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihandan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untukmasyarakat	Rp	53.952.700
20	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup	Rp	14.730.600
21	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya	Rp	49.739.600
22	Program Penyelenggaraan Lalu Lintasdan Angkutan Jalan (Llaj)	Rp	2.133.112.800

Rp

TOTAL SASARAN 9

200.904.467.936

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
10	Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, perindustrian, UMKM dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	1	175	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	11,08	%
		2	176	Persentase koperasi aktif	%	74,73
		3	177	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	98,43
		4	178	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		0,72
		5	179	Jumlah Pasar	Unit	43
		6	180	Cakupan bina kelompok pengrajin		0,168

PROGRAM**ANGGARAN**

1	Program Hubungan Industri	Rp	26.926.300
2	Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam	Rp	28.721.800
3	Program Pemberdayaan UMKM	Rp	591.196.577
4	Program Pengembangan UMKM	Rp	940.055.000
5	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Rp	80.666.900.550
6	Program Perencanaan dan pembangunan industri	Rp	314.133.200
7	Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Rp	187.487.500
8	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	24.883.000
9	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Rp	80.225.740
10	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp	404.200.000
11	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp	37.422.000
12	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp	55.121.000
13	Program Pengembangan Ekspor	Rp	58.485.000
14	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp	17.206.700
15	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	121.445.000
TOTAL SASARAN 10		Rp	83.554.409.367

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
11	Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas)	1	181	Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi	100	%
		2	182	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	88,926
		3	183	Persentase wirausaha muda		3,13
		4	184	Cakupan Pembinaan Olahraga		22,1738
		5	185	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan		36,204
		6	186	Cakupan pembinaan atlet muda		48,4293
		7	187	Jumlah atlet berprestasi		18,2
		8	188	Jumlah prestasi olahraga		3,2375
		9	189	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	68,95
		10	190	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	26,67

PROGRAM		ANGGARAN
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 3.843.555.126
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 100.000.000
3	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp 4.957.690.373
TOTAL SASARAN 11		Rp 8.901.245.499

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
12	Meningkatnya kemandirian desa dalam pembangunan daerah melalui pengembangan kawasan perdesaan	1	191	Persentase Desa Mandiri	28	%
		2	192	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	100,00
		3	193	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Pkk	%	146,00
		4	194	Persentase Lsm Aktif	%	100,00
		5	195	Persentase Pkk Aktif	%	100,00
		6	196	Persentase Posyandu Aktif	%	100,00
		7	197	Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	100,00
		8	198	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	%	93,00

PROGRAM		ANGGARAN
1	Program Penataan Desa	Rp 79.830.000
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp 23.824.000
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 1.174.061.400
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 273.470.000
TOTAL SASARAN 12		Rp 1.551.185.400

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
13	Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	1	199	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	100	%
		2	200	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (Lpp)	%	0,54
		3	201	Total Fertility Rate (Tfr)	%	2,44
		4	202	Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	73,59
		5	203	Persentase Perangkat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	14,99
		6	204	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	%	1,00
		7	205	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan		1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB
		8	206	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,		1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM
		9	207	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	18,19
		10	208	Ratio Akseptor Kb	%	16,92
		11	209	Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49	%	75,16
		12	210	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		89,79

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
		13	211	Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	4,41
		14	212	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	12,48
		15	213	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	37,32
		16	214	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	46,97
		17	215	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	%	92,61
		18	216	Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb	%	74,96
		19	217	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- Kb	%	81,76
		20	218	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Di Setiap Kecamatan	%	10,00
		21	219	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	1,39
		22	220	Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bdang Pengendalian Penduduk	%	100,00
		23	221	Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri	%	0,26
		24	222	Rasio Petugas Pembantu Pembina Kb Desa (Ppkbd) Setiap Desa/Kelurahan	%	100,00
		25	223	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100,00
		26	224	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	38,85

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			TARGET	
		27	225	Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa	%	100,00
		28	226	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Sesual (Ims)	%	0,00
		29	227	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100,00
		30	228	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	38,38
		31	229	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	22,64
		32	230	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes	%	0,01
		33	231	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		0,31
		34	232	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100,00
		35	233	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota		0,00303
		36	234	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100,00
		37	235	Persentase Penegakan Perda	%	100,00
		38	236	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	4,36
		39	237	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	24,00
		40	238	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%	83,62
		41	239	Rasio KDRT		0,00
		42	240	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	96,91
		43	241	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu		100,00

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
	44	242	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit	77,25
	45	243	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	100,00
	46	244	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada
	47	245	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada
	48	246	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada

PROGRAM

ANGGARAN

1	Program Penanggulangan bencana	Rp	14.581.039.500
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	3.115.899.410
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	3.259.330.000
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	989.278.838
5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha) Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Rp	33.714.300
6	Program Perlindungan Perempuan	Rp	219.773.750
7	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	329.980.250

8	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp	45.739.860
9	Program Pengarusutamaan Gender Dan pemberdayaan Perempuan	Rp	199.999.600
10	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	152.000.000
11	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp	120.000.000
12	Program Pengendalian Penduduk	Rp	226.242.730
13	Program Pembinaan Keluarga Berencana(Kb)	Rp	3.273.019.025
14	Program Pemberdayaan Dan Peningkatankeluarga Sejahtera (Ks)	Rp	2.862.161.000
15	Program Dukungan Pelaksanaan tugas Dan Fungsi DPRD	Rp	8.102.615.900
TOTAL SASARAN 13		Rp	37.510.794.163